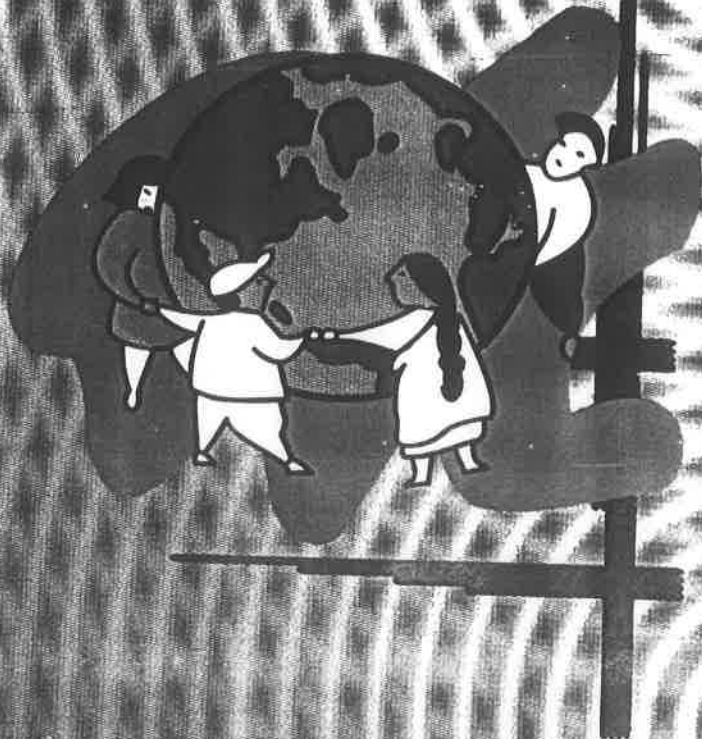


# PROFIL KETAHAPAN & PERLINDUNGAN ANAK PROPINSI LAMPUNG

Sindung Harjanto  
Handi Mulyaningih



KELOMPOK KAJIAN JENDER & PEMBANGUNAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL & ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
2004

# **PROFIL**

## **KESEJAHTERAAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROPINSI LAMPUNG**

**Penyusun:**  
**Sindung Haryanto**  
**Handi Mulyaningsih**

**Desain Sampul:**  
**KIKJP FISIP Universitas Lampung**

**Penerbit:**  
**Universitas Lampung 2004**

Perpustakaan Nasional RI: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

**Sindung Haryanto dan Handi Mulyaningsih**

**Profil Kesejahteraan dan Perlindungan Anak Propinsi Lampung**

**Bandar Lampung: Penerbit Universitas Lampung, 2004**

**vii, 105 hlm.; 16 x 21 cm.**

**ISBN 979-8287-63-0**

**Copy right © pada Penulis**

*Hak cipta dilindungi Undang-Undang*

*Dilarang memperbanyak isi buku ini dengan cara apapun  
tanda izin tertulis dari Penulis*

**Penerbit Universitas Lampung  
Cetakan Pertama, April 2004**

## KATA PENGANTAR

Penyusunan Profil Kesejahteraan dan Perlindungan Anak Propinsi Lampung dilaksanakan atas kerjasama antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia melalui Proyek Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Kesejahteraan Anak (PK3A) Tahun 2003, dengan Kelompok Kajian Jender dan Pembangunan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.

Penyusunan Profil ini bertujuan antara lain untuk memperoleh data dan informasi yang akurat tentang berbagai variabel dan indikator sesuai kluster hak anak yakni: (1) Hak sipil dan kebebasan, (2) Lingkungan keluarga dan perawatan alternatif, (3) Kesehatan dan kesejahteraan sosial, (4) Pendidikan, kegiatan budaya dan waktu luang, dan (5) Perlindungan khusus; serta untuk memperoleh gambaran permasalahan anak yang ada di Propinsi Lampung, sebagai landasan harmonisasi kebijakan program dan kegiatan. Profil ini diharapkan dapat menjadi instrumen untuk melihat kemajuan Pembangunan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak serta untuk melakukan pemantauan tentang keberhasilan Pembangunan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak yang telah ada dan sedang dilaksanakan.

Ucapan terima kasih, kami sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam penyusunan profil ini. Penghargaan dan ucapan terimakasih yang setinggi-tingginya, kami sampaikan kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan R.I. atas kerjasamanya sehingga tersusun profil KPA Propinsi Lampung.

Penyusun menyadari bahwa profil ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu segala kritik, saran dan usul konstruktif dari sidang pembaca demi sempurnanya profil ini sangat diharapkan. Akhirnya penyusun berharap, agar profil ini dapat memberikan kontribusi bagi upaya perbaikan kesejahteraan dan perlindungan, khususnya di Propinsi Lampung.

# DAFTAR ISI

	Hal.
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	v
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Geografis.....	4
1.2. Admistrasi Pemerintahan .....	4
1.3. Penduduk .....	5
1.4. Permasalahan Kependudukan Di Propinsi Lampung.....	6
<b>BAB II HAK SIPIL DAN KEBEBASAN .....</b>	<b>13</b>
2.1. Identitas Kelahiran .....	13
2.2. Kebebasan Berpendapat .....	15
2.3. Tindak Kekerasan terhadap anak.....	17
<b>BAB III LINGKUNGAN KELUARGA DAN PERAWATAN ALTERNATIF.....</b>	<b>23</b>
3.1. Anak Jalanan .....	23
3.2. Anak Penyandang Masalah Kesejahteraan Lain .....	26
3.3. Anak Asuh.....	27
3.4. Anak Adopsi .....	31
<b>BAB IV KESEHATAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL .....</b>	<b>33</b>
4.1. Indikator Kesehatan Balita .....	35
4.2. Imunisasi.....	38
4.3. Status Gizi Balita .....	41
4.4. Anak Penyandang Cacat .....	42
<b>BAB V PENDIDIKAN, KEGIATAN BUDAYA DAN WAKTU LUANG .....</b>	<b>45</b>
5.1. Angka Partisipasi Kasar .....	45
5.2. Angka Partisipasi Murni .....	46
5.3. Angka Partisipasi Sekolah.....	47
5.4. Angka Putus Sekolah.....	48
<i>Profil Kesejahteraan dan Perlindungan Anak Propinsi Lampung</i>	<b>iii</b>

5.5. Cakupan Program Pendidikan Luar Sekolah (PLS) .....	55
5.6. Cakupan BKB/PADU/Play Group/TK/TPA.....	54
5.7. Pemanfaatan Waktu Luang, Kegiatan Rekreasi dan Budaya .....	56
<b>BAB VI PERLINDUNGAN KHUSUS.....</b>	<b>59</b>
6.1. Anak yang Berkonflik dengan Hukum .....	60
6.2. Anak yang Mengalami Eksploitasi .....	63
6.3. Penyalahgunaan dan Kesalahgunaan NAPZA.....	69
<b>BAB VII PENUTUP.....</b>	<b>73</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>77</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>81</b>

# DAFTAR TABEL

No.	Judul Tabel	Hal.
1	Peta Situasi Anak Indonesia, Tahun 2003.....	3
2	Wilayah Administratif Propinsi Lampung berdasarkan Kabupaten/Kota, Ibukota, Luas Wilayah, Jumlah Kecamatan, dan Jumlah desa/Kelurahan, Tahun 2001.....	5
3	Luas wilayah, Jumlah Penduduk, Kepadatan Penduduk, dan Laju Pertumbuhan Penduduk Propinsi Lampung Berdasarkan Daerah Tingkat II, Tahun 1990 dan Tahun 2000.....	7
4	Persentase Balita Propinsi Lampung menurut Penolong Kelahiran dan Daerah Tingkat II, Tahun 1997 dan 1999.....	9
5	Indikator Kualitas Sumberdaya Manusia Propinsi Lampung tahun 2000.....	11
6	Jumlah Kelahiran, Akta Kelahiran, dan Surat Kenal Lahir yang Dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten/Kota se-Propinsi Lampung Tahun 2002.....	14
7	Jumlah Penduduk Usia 0-18 Tahun Propinsi Lampung Menurut Kelompok Usia, Jenis Kelamin, dan Daerah Tingkat II, Tahun 2000.....	15
8	Rasio Tempat Peribadatan-Umat Beragama di Propinsi Lampung, Tahun 2001.....	16
9	Pengalaman Tindak Kekerasan Terhadap Anak Jalanan di Bandar Lampung Selama Berada di Jalanan Menurut Jenis Kelamin, Tahun 1999.....	18
10	Perkembangan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan Berdasarkan Usia Korban dan Usia Pelaku, Propinsi Lampung, Tahun 1998-2001.....	20
11	Jumlah Anak Propinsi Lampung yang Mengalami Tindak Kekerasan Berdasarkan Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota, Tahun 2001.....	21
12	Penghasilan Rata-rata Anak Jalanan di Bandar Lampung Sebelum dan Sesudah Krisis Moneter Menurut Jenis Kelamin dan Jenis Pekerjaan (dalam rupiah/hari).....	25

No.	Judul Tabel	Hal.
13	Jumlah Anak Terlantar, Anak Nakal, Balita Terlantar, dan Arak Jalanan Menurut Kabupaten/Kota di Propinsi Lampung, Tahun 2001.....	27
14	Jumlah Anak Yatim/Anak Asuh Propinsi Lampung yang Diasuh dalam panti Asuhan /Yayasan, Tahun 2001 .....	29
15	Jumlah Anak Asuh dan Besarnya Dana Bantuan Menurut Kabupaten/Kota dan Tingkat Pendidikan, Tahun 2001 .....	30
16	Jumlah Anak yang Diadopsi Melalui Pengadilan Negeri Kelas I a Bandar Lampung, Tahun 2002.....	32
17	Perkembangan Angka Kematian Bayi dan Angka Harapan Hidup Propinsi Lampung, Tahun 1997-2001 .....	36
18	Indikator Kesehatan Balita Propinsi Lampung, Tahun 1998-2001 .....	37
19	Persentase Kelahiran Bayi Menurut Penolong Kelahiran Propinsi Lampung, Tahun 1998-2001.....	38
20	Cakupan (%) Imunisasi Bayi Propinsi Lampung Menurut Jenis Imunisasi dan Kabupaten/Kota, Tahun 2002 .....	39
21	Fasilitas Kesehatan Masyarakat Propinsi Lampung Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2001 .....	40
22	Jumlah anak Penyandang Cacat Propinsi Lampung Menurut Jenis Kecacatan, Jenis Kelamin, dan Kabupaten/ Kota, Tahun 2001 .....	43
23	Perkembangan Angka Partisipasi Kasar Tingkat SD/MI + Paket A di Propinsi Lampung, tahun 1996-2001 .....	46
24	Perkembangan angka Partisipasi Kasar Tingkat SLTP/MTS + Paket B di Propinsi Lampung, Tahun 1996-2001 .....	47
25	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Kabupaten/Kota dan Kelompok Umur di Propinsi Lampung, Tahun 2000.....	48
26	Jumlah Penerima Bea Siswa JPS, Bantuan Khusus Murid (BKM), dan Bea Siswa Bakat dan Motivasi, Propinsi Lampung Menurut Tingkat Pendidikan dan Kabupaten/ Kota, Tahun 2002.....	49
27	Angka Putus Sekolah (APTS) Menurut Kabupaten/Kota dan kelompok Umur di Propinsi Lampung, Tahun 2000 .....	50
28	Perkawinan di Bawah Umur Propinsi Lampung Berdasarkan Status Perkawinan, Kelompok Umur, dan Kabupaten/ Kota, Tahun 2000.....	51



<b>No.</b>	<b>Judul Tabel</b>	<b>Hal.</b>
29	Jumlah Cerai Mati Perkawinan di Bawah Umur Propinsi Lampung Berdasarkan Kelompok Umur, jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota, Tahun 2000 .....	52
30	Jumlah Warga Belajar yang mengikuti Program Belajar PLS Propinsi Lampung Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2002..	53
31	Jumlah Taman Kanak-kanak / Raudhatul Atfal dan Jumlah Peserta Didik Propinsi Lampung Tahun 2002.....	56
32	Jumlah Anggota Pramuka Menurut Tingkatan dan Kabupaten/Kota di Propinsi Lampung, Tahun 2001 .....	57
33	Jumlah Anak Yang Berkonflik dengan Hukum di Propinsi Lampung, Berdasarkan Jenis Tindak Pidana, tahun 2002.....	61
34	Jumlah Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Propinsi Lampung Berdasarkan Jenis Tindak Pidana .....	62
35	Perkembangan Jumlah Angkatan Kerja Usia 15-19 Tahun Menurut Jenis Kelamin Propinsi Lampung, Tahun 1996-2001 .....	66
36	Jumlah Anak Usia Kurang dari 18 Tahun yang Bekerja dan Berstatus Buruh Menurut Jenis Kelamin di Propinsi Lampung, Tahun 2001.....	67
37	Jumlah Anak Propinsi Lampung Yang Mengalami Eksploitasi Seksual.....	69
38	Perkembangan Kasus Penyalahgunaan dan Kesalahgunaan NAPZA Propinsi Lampung Tahun 2000-2002.....	70

## BAB I PENDAHULUAN

Kesejahteraan dan perlindungan terhadap anak pada prinsipnya menjadi tanggungjawab setiap elemen masyarakat. Secara legal formal, negara mengeluarkan berbagai peraturan sebagai landasan upaya pemajuan kesejahteraan dan perlindungan terhadap anak. Beberapa peraturan perundang-undangan yang menyangkut kehidupan anak saat ini adalah Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 sebagai ratifikasi Konvensi Hak Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sebagai implementasinya, negara berkewajiban melakukan upaya pemajuan, perlindungan dan pemenuhan hak anak. Langkah awal yang harus ditempuh untuk maksud tersebut adalah tersedianya data dan informasi tentang kondisi anak yang akurat dan komprehensif sebagai landasan penyusunan berbagai kebijakan pembangunan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak (KPA).

Seiring dengan pelaksanaan kebijakan otonomi daerah, maka peran aktif daerah menjadi strategis untuk melaksanakan upaya-upaya pemajuan, perlindungan dan pemenuhan hak anak. Untuk itu, diperlukan masukan (input) data pelaksanaan pembangunan KPA yang merupakan hasil pendataan yang langsung diperoleh dari lapangan atau disebut data dasar (*basic statistics*) maupun data estimasi atau proyeksi (*derived statistics*) sesuai dengan indikator kesejahteraan dan perlindungan anak yang ditetapkan. Data tersebut diharapkan dapat menjadi dasar kesepakatan dari para pemangku kepentingan di legislatif (DPRD), eksekutif, dan lembaga-lembaga yudikatif, dalam melaksanakan aksi konkrit pembangunan KPA.

Data tersebut tersusun dalam bentuk profil Kesejahteraan dan Perlindungan Anak (KPA) propinsi. Selama ini data dan informasi mengenai anak yang tersusun dalam bentuk profil baik pada tingkat propinsi maupun kabupaten belum tersedia. Hal ini perlu disadari mengingat profil anak merupakan bahan baku bagi penyusunan berbagai program dan rencana aksi pengembangan kesejahteraan dan perlindungan anak. Dari profil tersebut para pemangku kepentingan dapat menentukan prioritas permasalahan, menganalisis, dan menetapkan program-program pemecahan masalah. Harapannya, dengan dilakukan berbagai intervensi kebijakan maka profil

KPA menjadi lebih baik untuk masa mendatang. Pengembangan KPA ini dilakukan mengingat beberapa permasalahan krusial saat ini seperti:

1. Terdapat sejumlah besar anak yang menghadapi bahaya yang mengancam pertumbuhan dan perkembangan anak, misalnya kekerasan yang terjadi di lingkungan hidup anak, baik lingkungan keluarga, tempat bermain, masyarakat, sampai dengan peperangan, pengungsian, diskriminasi rasial, eksploitasi seks, eksploitasi tenaga kerja, kurangnya perhatian terhadap perlindungan dan hak anak serta kecacatan pada anak.
2. Setiap hari, tidak kurang dari 40.000 anak di dunia meninggal dunia akibat penyakit, kekurangan gizi, infeksi HIV/AIDS, kurangnya sarana air bersih dan sanitasi lingkungan yang buruk, dan penyalahgunaan obat. Sembilan puluh persen (90%) anak laki dan perempuan di bawah usia 18 tahun yang terlibat dunia pelacuran di 12 kota besar di Indonesia, ternyata diketahui terlibat penggunaan obat terlarang. Setiap hari jutaan anak di dunia menderita akibat kemiskinan dan kerusakan lingkungan, yang mengakibatkan hilangnya generasi mendatang (*loss generation*).
3. Pemerksaan hak anak oleh pelaku pendidikan yang tidak memahami pedagogi pendidikan anak. Secara tidak proporsional anak didik TK (Taman Kanak-kanak) telah "dipaksa" untuk mampu baca tulis serta matematika, sekalipun hitungan-hitungan ringan. Padahal kebutuhan emosional anak yang seharusnya pertama kali dirangsang. Rangsangan terhadap kemampuan rasional anak-anak yang terlalu dini, mengakibatkan terbentuknya manusia-manusia yang sulit menerima pendapat orang lain, mudah konflik dan lain-lain (RIP-KPA, Kementerian PP R.I., 2002).

Selain itu permasalahan lain yang dihadapi anak antara lain: (1) masih banyak anak yang belum mempunyai akte kelahiran, (2) masih belum semua anak diasuh oleh orang tua, keluarga maupun orangtua asuh atau wali dengan baik, (3) masih belum semua anak mendapatkan pendidikan yang memadai (4) masih belum semua anak mempunyai kesehatan optimal, (5) masih belum semua anak-anak dalam pengungsian, daerah konflik, korban bencana alam, anak-anak korban eksploitasi, kelompok minoritas dan anak yang berhadapan dengan hukum mendapat perlindungan khusus.

Tabel 1  
Peta Situasi Anak Indonesia, Tahun 2003

No.	Kriteria	Jumlah (Perkiraan)
1	Anak jalanan	40.000-50.000 (16% perempuan)
2	Pekerja anak	1,6 juta
3	Anak korban eksploitasi seksual	40.000 – 70.000
4	Anak dalam Pengungsian	400.000
5	Anak dengan masalah hukum	4.000
6	Anak putus sekolah	11,7 juta
7	Anak menderita cacat	5,43% dari jumlah total anak
8	Balita Gizi Buruk	2,1 juta
9	Anemia	51%
10	Kematian bayi	44 per 1000 kelahiran hidup
11	Kematian balita	44,71 per 1000 kelahiran hidup

Sumber: Kebijakan Nasional Pembangunan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak, Meneg PP, 2003.

Gambaran permasalahan anak secara nasional tersebut, tidak terlalu jauh berbeda dengan kondisi anak di Lampung saat ini. Beberapa permasalahan anak yang menonjol di Lampung adalah anak jalanan, pekerja anak (terutama di bidang pertanian), dan anak putus sekolah. Sejak krisis ekonomi pertengahan tahun 1997, permasalahan anak ini semakin berat, antara lain adalah meningkatnya anak jalanan dan pekerja anak. Berdasarkan Survei yang dilakukan Universitas Atmajaya dan BKSNI tahun 1999, terdapat peningkatan rata-rata nasional sebesar 48% anak jalanan yang baru turun ke jalan pada tahun 1998. Alasan ekonomi menjadi faktor utama yang mendorong anak untuk turun ke jalan menjadi anak jalanan. Meskipun anak jalanan di Lampung masih memiliki komunitas (dalam hal ini keluarga) dan lembaga itu masih berfungsi sebagai *reference group*, namun berbagai tindak kekerasan sering dialami anak jalanan dan ironisnya respon masyarakat justru cenderung "menyalahkan korban". Respon yang cenderung negatif tersebut juga ditunjukkan minimnya bantuan yang diberikan masyarakat terhadap anak jalanan (Laporan Hasil Survei dan Mapping, 2000).

## 1.1. Geografis

Daerah Propinsi Lampung meliputi areal seluas 35.288,35 Km<sup>2</sup> termasuk pulau-pulau yang terletak pada bagian sebelah paling ujung tenggara pulau Sumatera. Propinsi Lampung dengan ibukota Bandar Lampung, yang merupakan gabungan dari kota kembar Tanjung Karang dan Teluk Betung, memiliki wilayah yang relatif luas, dan menyimpan potensi kelautan. Pelabuhan utamanya bernama Panjang dan Bakauheni serta pelabuhan nelayan seperti Pasar Ikan (Teluk Betung), Tarahan, dan Kalianda di Teluk Lampung. Sedangkan di Teluk Semangka adalah Kota Agung, dan di Laut Jawa terdapat pula pelabuhan nelayan seperti Labuhan Maringgai dan Ketapang. Di samping itu, kota Menggala juga dapat dikunjungi kapal-kapal nelayan dengan menyusuri sungai Way Tulang Bawang, adapun di Samudera Indonesia terdapat pelabuhan Krui. Lapangan terbang utamanya adalah "Raden Inten II", yaitu nama baru dari "Branti", yang terletak 28 km dari ibukota melalui jalan negara menuju Kota Bumi, dan lapangan terbang AURI terdapat di Menggala yang bernama Astra Ksetra.

Secara Geografis, Propinsi Lampung terletak pada kedudukan:

Timur - Barat antara : 103° 40' - 105° 50' Bujur Timur dan

Utara - Selatan antara : 6° 45' - 3° 45' Lintang Selatan.

## 1.2. Administrasi Pemerintahan

Propinsi Lampung sebelum tanggal 18 Maret 1964, merupakan Karesidenan Lampung, yang berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 1964, yang kemudian menjadi Undang-Undang No. 14 Tahun 1964, Karesidenan Lampung ditingkatkan menjadi Propinsi Lampung dengan Ibukota Tanjung Karang - Teluk Betung. Secara administratif Propinsi Lampung dibagi menjadi 10 kabupaten/kota, yang selanjutnya terdiri dari beberapa wilayah kecamatan dan wilayah desa/kalurahan dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 2

Wilayah Administratif Propinsi Lampung berdasarkan Kabupaten/Kota, Ibukota, Luas Wilayah, Jumlah Kecamatan, dan Jumlah desa/Kelurahan, Tahun 2001

Kabupaten/Kota	Ibukota	Luas Wilayah (km <sup>2</sup> )	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa
Lampung Barat	Liwa	4.950,40	14	169
Tanggamus	Kota Agung	3.356,61	17	313
Lampung Selatan	Kalianda	3.180,78	23	350
Lampung Timur	Sukadana	4.337,89	23	235
Lampung Tengah	Gunung Sugih	4.789,82	26	285
Lampung Utara	Kota Bumi	2.725,63	16	219
Way Kanan	Blambangan Umpu	3.921,63	12	193
Tulang Bawang	Menggala	7.770,84	16	215
Bandar Lampung	Bandar Lampung	192,96	13	98
Metro	Metro	61,79	5	22
Propinsi	Bandar Lampung	35.288,35	165	2.099

Sumber: BPS Propinsi Lampung, Lampung dalam Angka 2001.

### 1.3. Penduduk

Penduduk Propinsi Lampung berdasarkan Sensus Penduduk (SP) tahun 1961, 1971, 1980, 1990, 2000 masing-masing sebesar 1.667.511, 2.775.695, 4.624.785, 6.015.803, dan 6.659.869 orang. Pertumbuhan penduduk pada periode 1971-1980 adalah sebesar 5,77% per tahun, pada periode 1980-1990 menjadi sebesar 2,67% per tahun. Periode 1990-2000 pertumbuhan penduduk sebesar 1,05% per tahun. Apabila dilihat dari laju pertumbuhan penduduk, Propinsi Lampung merupakan yang tertinggi dibandingkan dengan propinsi lainnya baik pada periode 1971-1980 maupun periode 1980-1990. Sedangkan pada periode 1990-2000 laju pertumbuhan penduduk Propinsi Lampung di bawah laju pertumbuhan penduduk Indonesia. Seperti diketahui secara keseluruhan laju pertumbuhan penduduk di Indonesia pada periode 1990-2000 adalah sebesar 1,35% per tahun.

Penduduk Propinsi Lampung tahun 2000 berdasarkan hasil Sensus Penduduk tahun 2000 adalah sebesar 6.649.181 orang dan rata-rata kepadatan penduduk per kabupaten/kota di Propinsi Lampung/km<sup>2</sup> tahun 2000

berturut-turut adalah: Kabupaten Lampung Barat 74; Kabupaten Tanggamus 238; Kabupaten Lampung Selatan 356; Kabupaten Lampung Timur 200; Kabupaten Lampung Tengah 218; Kabupaten Lampung Utara 195; Kabupaten Way Kanan 89; Kabupaten Tulang Bawang 74; Kota Bandar Lampung 3.300; dan Kota Metro 1.910.

#### 1.4. Permasalahan Kependudukan

Masalah kesejahteraan anak erat kaitannya dengan masalah kependudukan, terutama yang menyangkut pertumbuhan penduduk di suatu wilayah. Laju pertumbuhan penduduk yang cepat akan berdampak pada peningkatan jumlah penduduk usia muda. Konsekuensinya, pemerintah (daerah) setempat semakin dituntut untuk memberikan perhatian yang lebih besar bagi peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak. Hal ini disebabkan karena pertumbuhan penduduk yang tinggi pada umumnya disertai berbagai permasalahan sosial yang menyangkut kesejahteraan dan perlindungan anak. Secara umum permasalahan kependudukan di propinsi Lampung saat ini meliputi tiga permasalahan utama. Permasalahan tersebut adalah: (1) Jumlah penduduk yang cukup besar, (2) Penyebaran penduduk yang tidak merata, (3) Kemampuan/kualitas penduduk yang rendah.

Permasalahan pertama dan kedua merupakan kendala untuk meningkatkan kualitas penduduk, karena dengan jumlah penduduk yang besar dan penyebaran tidak merata, akan lebih sulit untuk menjadikan penduduk yang berkemampuan/kualitas tinggi. Jumlah penduduk yang besar dengan kualitas sumberdaya manusia yang rendah merupakan beban pembangunan yang cukup berat. Kebijakan pemerintah untuk mengurangi laju pertumbuhan penduduk yang tinggi adalah program Keluarga Berencana. Pada era pemerintahan Orde Baru, program tersebut lebih ditekankan pada penurunan tingkat fertilitas. Namun pada masa era reformasi, program tersebut diarahkan pada peningkatan kualitas dan kesejahteraan keluarga.

Ciri pokok penduduk di negara yang sedang berkembang seperti Indonesia, selain jumlahnya yang besar, juga persebarannya yang tidak merata. Propinsi Lampung yang terletak di bagian selatan pulau Sumatera, juga mempunyai ciri semacam itu. Seperti yang terlihat pada tabel 4, persebaran dan kepadatan penduduk propinsi Lampung memiliki variasi antar wilayah kabupaten/kota. Kota Bandar Lampung merupakan wilayah yang memiliki

kepadatan penduduk tertinggi, sedangkan kabupaten Lampung Barat merupakan wilayah yang memiliki tingkat kepadatan paling rendah.

Sementara itu laju pertumbuhan penduduk propinsi Lampung mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Pada periode 1971-1980, laju pertumbuhan penduduk masih berada pada angka 5,77%/tahun. Angka tersebut turun menjadi 2%/tahun pada periode 1980-1990, dan kemudian turun menjadi 1,03%/tahun pada periode 1990-2000 (Sensus Penduduk 1971, 1980, 1990 dan 2000). Penurunan laju pertumbuhan penduduk ini diduga karena meningkatnya arus migrasi ke luar propinsi Lampung, baik karena alasan pekerjaan maupun alasan pendidikan.

Tabel 3

Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, Kepadatan Penduduk, dan Laju Pertumbuhan Penduduk Propinsi Lampung Berdasarkan Kabupaten/Kota Tahun 1990 dan Tahun 2000

Kabupaten/Kota	Luas Wilayah (km <sup>2</sup> )	Jumlah Penduduk		Kepadatan (j/wa/km <sup>2</sup> )		Laju Pertum. (%/th)
		1990	2000	1990	2000	1990-2000
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Tanggamus	3.357	778.642	800.211	232	238	0,28
Lampung Selatan	3.181	1.045.345	1.133.124	329	356	0,83
Lampung Timur	4.338	827.382	869.428	191	200	0,51
Lampung Tengah	4.790	961.390	1.046.167	201	218	0,88
Metro	62	111.608	118.448	1.800	1.910	0,61
Lampung Utara	2.716	506.516	530.941	186	195	0,48
Way Kanan	3.922	352.369	349.807	90	89	-0,07
Tulang Bawang	7.771	487.083	691.822	63	89	3,65
Lampung Barat	4.950	309.050	366.484	62	74	1,75
Bandar Lampung	193	636.706	742.749	3.300	3.848	1,58
<b>Jumlah</b>	<b>35.288</b>	<b>6.016.091</b>	<b>6.649.181</b>	<b>170</b>	<b>188</b>	<b>1,03</b>

Sumber: BPS, 2001. Profil Kependudukan Propinsi Lampung, 2000 (diolah kembali).

Apabila dilihat dari struktur penduduk, propinsi Lampung termasuk propinsi yang memiliki struktur umur penduduk muda. Hal ini ditandai dengan tingginya persentase penduduk berusia muda. Namun demikian struktur penduduk ini secara perlahan mengalami perubahan (transisi) ke struktur penduduk tua. Persentase Penduduk muda usia 0-14 tahun, terus



mengalami penurunan dari 48,04% pada tahun 1971, menjadi 45,57% pada tahun 1980, 41,05% pada tahun 1990 dan turun menjadi 32,79% pada tahun 2000. Sebaliknya per-sentase penduduk produktif (15-64 tahun) mengalami peningkatan yakni dari 50,57% pada tahun 1971 menjadi 52,52% pada tahun 1980, 56,32% pada tahun 1990 dan meningkat lagi menjadi 63,50% pada tahun 2000. Demikian pula penduduk usia lanjut (lansia) mengalami peningkatan dari 1,39% pada tahun 1971 menjadi 1,91% pada tahun 1980, 2,63% pada tahun 1990 dan 3,69% pada tahun 2000 (SP 1971,1980,1990,2000).

Kecenderungan tersebut secara langsung berdampak terhadap turunnya angka (rasio) ketergantungan (*dependency ratio*), yakni beban tanggungan ekonomi kelompok usia produktif (15-64) tahun terhadap kelompok usia muda (kurang dari 15 tahun) dan usia tua (65 tahun lebih). Pada tahun 1971 rasio ketergantungan berada pada angka 97,75 turun menjadi 90,40 pada tahun 1980, turun lagi menjadi 77,45 pada tahun 1990, dan pada tahun 2000 angka ketergantungan menjadi 57,45. Sementara itu di sisi lain, meningkatnya persentase penduduk usia produktif memiliki implikasi sosial yang sangat luas antara lain berupa peningkatan tuntutan penyediaan infrastruktur sosial dan lapangan kerja. Tuntutan semacam ini tidak mudah dipenuhi mengingat kondisi perekonomian yang belum membaik.

Permasalahan kependudukan yang ketiga adalah rendahnya kualitas penduduk. Hal ini ditandai dengan berbagai indikator, yang salah satunya adalah angka kematian bayi (AKB). Selama kurun waktu tiga dasa warsa, AKB di propinsi Lampung terus mengalami penurunan. Pada tahun 1971, AKB propinsi Lampung berada pada angka 146 (SP 1971), angka ini turun menjadi 48 pada tahun 1995 (SUPAS 1995). Angka ini sedikit lebih rendah dari AKB nasional yang berada pada angka 51 (SUPAS 1995). Penurunan AKB ini diduga merupakan dampak kesadaran masyarakat yang semakin tinggi akan kesehatan ibu hamil dan bayi. Meskipun demikian, angka kematian bayi atau *infant mortality rate* (IMR) di Lampung pada khususnya dan di Indonesia pada umumnya dirasakan masih sangat tinggi, terutama jika dibandingkan dengan negara-negara ASEAN.

Angka kematian bayi yang masih relatif tinggi ini berkaitan dengan berbagai faktor terutama nilai-nilai sosial budaya yang berkembang di masyarakat. Nilai-nilai tersebut mempengaruhi perilaku masyarakat dalam pengasuhan anak (bayi). Pada sebagian masyarakat masih berkembang mitos-mitos yang sangat merugikan bagi kesehatan bayi. Mitos-mitos

tersebut seperti misalnya mentabukan pemberian susu pertama (kolostrum) pada bayi, larangan (pentabuan) jenis-jenis makanan tertentu yang sebenarnya memiliki gizi tinggi bagi ibu yang sedang menyusui bayi. Sementara itu pada masyarakat perkotaan terjadi kecenderungan menurunnya lamanya menyusui bayi, oleh karena berbagai alasan. Berdasarkan hasil SUSENAS tahun 1999, lebih dari sepertiga seluruh balita yang pernah disusui di Propinsi Lampung, disusui selama 24 bulan lebih. Hampir seluruh daerah tingkat II memiliki pola yang sama dengan pola propinsi, kecuali untuk Kota Bandar Lampung yang memiliki persentase terbesar disusui untuk yang lamanya 12-17 bulan (BPS, 2000).

Faktor lain yang memberi kontribusi bagi tingginya angka kematian bayi adalah masih tingginya persentase bayi yang mendapatkan imunisasi tidak lengkap. Hasil Susenas menunjukkan bahwa bayi yang mendapatkan imunisasi tidak lengkap masih di atas 60%. Penolong kelahiran bayi juga merupakan faktor yang mempengaruhi angka kematian bayi. Persentase bayi yang ditolong oleh tenaga kurang terdidik masih cukup tinggi seperti terlihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 4

Persentase Balita Propinsi Lampung menurut Penolong Kelahiran dan Daerah Tingkat II, Tahun 1997 dan 1999

Kabupaten/Kota	Penolong Kelahiran			
	Tenaga Terdidik *)		Tenaga Kurang Terdidik **)	
	1997	1999	1997	1999
Lampung Selatan 1)	51,0	57,1	49,0	42,9
Lampung Tengah 2)	53,2	51,1	46,9	48,9
Lampung Utara 3)	29,4	33,5	70,6	66,5
Lampung Barat	43,9	32,9	56,1	67,1
Bandar Lampung	90,1	90,2	9,9	9,8
Propinsi	50,3	52,6	49,7	47,4

Sumber: SUSENAS 1997 DAN 1999.

- Keterangan:
- \*) termasuk : dokter, bidan dan tenaga medis lainnya
  - \*\*\*) termasuk : dukun, famili dan lainnya.
  - 1) termasuk kabupaten Tanggamus
  - 2) termasuk kabupaten Lampung Timur dan Kota Metro
  - 3) termasuk kabupaten Way Kanan dan Tulang Bawang

Beberapa indikator lain yang menunjukkan rendahnya kualitas sumberdaya manusia di propinsi Lampung, antara lain:

1. Rendahnya tingkat Angka Partisipasi Sekolah (APS) terutama untuk tingkat pendidikan SLTA (umur 16-18 tahun). Hasil perhitungan Modul Kependudukan tahun 2000, APS untuk kelompok umur 13-15 (SLTP) sebesar 81,46 dan untuk kelompok umur 16-18 (SLTA) sebesar 47,09 (BPS, 2002).
2. Rendahnya tingkat melek huruf terutama untuk kelompok usia di atas 45 tahun. Hasil perhitungan modul kependudukan tahun 2000, persentase melek huruf (PMH) untuk kelompok usia 45 tahun ke atas sebesar 74,7. Hal ini berarti bahwa masih terdapat sekitar 25% penduduk usia 45 tahun ke atas yang buta huruf (BPS, 2002).
3. Rendahnya tingkat pendidikan yang ditamatkan terutama untuk tingkat pendidikan tinggi (PT). Hasil penghitungan modul kependudukan tahun 2000, menunjukkan bahwa penduduk yang tamat perguruan tinggi hanya sebesar 3,0% untuk laki-laki dan 2,6% untuk penduduk perempuan (BPS, 2002).
4. Rendahnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), yang pada tahun 2000 sebesar 54,48. Selain itu juga terdapat kesenjangan jender dalam TPAK. Jika TPAK laki-laki menunjukkan angka sebesar 72,62 maka TPAK perempuan hanya sebesar 38,31 (BPS, 2002).
5. Tingginya tingkat pengangguran terbuka dan setengah pengangguran. Pada tahun 2000, angka pengangguran terbuka (APT) sebesar 2,9; sedangkan angka setengah pengangguran (penduduk yang bekerja di bawah 35 jam) adalah sebesar 44,4% (BPS, 2002).

Selain itu masih terdapat indikator lain yang berkaitan dengan mutu modal manusia di propinsi Lampung, seperti yang terlihat dalam tabel 6. Beberapa indikator yang berkaitan dengan kesehatan masyarakat yang masih merupakan permasalahan besar di propinsi Lampung antara lain adalah tingginya angka prevalensi gizi buruk balita. Menurut hasil survai NSS (*Nutrition Surveilance Survey*) tahun 2001, angka prevalensi gizi buruk di Propinsi Lampung adalah sekitar 5,1%. Untuk mengantisipasi munculnya kasus gizi buruk akibat krisis ekonomi, pemerintah daerah melakukan pemantauan status gizi secara berkala. Pemantauan status gizi pada salah satu kelompok umur (dalam hal ini kelompok balita) merupakan salah satu metode penilaian status gizi pada penduduk kelompok yang paling representatif untuk menggambarkan prevalensi status gizi masyarakat secara keseluruhan.

Tabel.5  
Indikator Kualitas Sumberdaya Manusia Propinsi Lampung  
tahun 2000

Indikator	Data Base 2000
Dokter per 10.000 penduduk	1,28
Tempat tidur rumah sakit per 10.000 penduduk	2,61
Puskesmas/pustu per kecamatan	11,65
Dokter per Puskesmas	2,95
Rata-rata Jarak ke Puskesmas (km)	7,08
Rata-rata Jarak ke Pustu (km)	4,40
Angka Kematian Bayi	49
Angka Kematian Kasar	n.a
Angka Harapan Hidup Waktu Lahir (e <sup>o</sup> )	67
Tingkat Partisipasi Pendidikan Dasar	95,54
Tingkat Partisipasi Pendidikan Menengah Atas	47,09
Angka Melek Huruf Dewasa	80,0
Persentase Balita Bergizi Baik	n.a
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Anak (10-14)	54,48

Sumber: BPS Propinsi Lampung, Profil Penduduk Propinsi Lampung 2000.

Keterangan: n.a. (not available=data tidak tersedia).

Berdasarkan data di atas, nampak bahwa permasalahan kependudukan terutama yang berkaitan dengan peningkatan kualitas penduduk merupakan permasalahan yang berat dan memerlukan perhatian serius dari semua elemen masyarakat. Apalagi jika dikaitkan dengan tujuan pembangunan milenium yang telah disepakati oleh semua negara di dunia pada konferensi UNDP beberapa bulan yang lalu. Pada konferensi tersebut telah ditentukan 8 tujuan pembangunan yang harus dicapai oleh semua negara pada tahun 2015. Adapun ke-8 tujuan pembangunan tersebut adalah:

1. 50 % pengurangan orang miskin.
2. 100% anak menyelesaikan pendidikan dasar.
3. 100% orang dewasa melek huruf.
4. Tidak ada disparitas jender di pendidikan dasar dan menengah.
5. 2/3 pengurangan angka kematian bayi
6. 4/5 pengurangan angka kematian ibu melahirkan.
7. Akses menyeluruh untuk air minum yang aman.
8. Akses menyeluruh untuk tempat tinggal dengan kualitas minimum (rumah tanpa lantai tanah).

## BAB II HAK SIPIL DAN KEBEBASAN

### 2.1. Identitas Kelahiran

Hingga saat ini belum ada data lengkap tentang situasi yang berkaitan dengan pemenuhan hak-hak sipil dan hak-hak kebebasan anak. Menurut studi *Plan Internasional* tahun 1998 terhadap sampel 400 anak dari 58.000 populasi pada 16 unit program, ternyata baru (26%) anak yang memiliki akte kelahiran. Faktor-faktor yang mempengaruhi adalah: ketidaktahuan kegunaan akte (37%), biaya kepengurusan terlalu mahal (26%), ketidaktahuan cara kepengurusan (14%), menganggap akte tidak penting, letak kantor catatan sipil terlalu jauh dan kepemilikan akte bukan merupakan kebiasaan setempat (23%). Outlet pelayanan masih terbatas dan belum dijadikannya akte kelahiran sebagai suatu yang bermakna secara administratif juga memberikan kontribusi mengapa kepemilikan akte kelahiran masih rendah (RIP-KPA, 2001).

Kondisi seperti ini nampaknya juga terjadi di Lampung. Hingga saat ini, data tentang jumlah anak berdasarkan kepemilikan identitas kelahiran, belum tersedia. Data yang tersedia di kantor catatan sipil pada umumnya hanya menunjukkan jumlah akte kelahiran yang dikeluarkan dalam kurun waktu satu tahun. Data tersebut dikirimkan antara lain salahsatu tembusannya adalah ke Biro Tata Pemerintahan Propinsi Lampung setiap 3 bulan (tri wulan). Namun laporan tersebut tidak secara rutin dilakukan oleh setiap kantor catatan sipil yang ada di masing-masing kabupaten/kota, sehingga pihak pemerintah propinsi kesulitan untuk dapat mengetahui secara pasti jumlah akta-akta yang telah dikeluarkan.

Format laporan dalam bentuk tabel-tabel yang memungkinkan untuk dapat merekam data kependudukan termasuk data tentang catatan sipil sebenarnya sudah disediakan oleh Biro Tata Pemerintahan Propinsi Lampung. Dalam kenyataannya data tentang catatan sipil (jumlah akte-akte yang dikeluarkan) tidak secara rutin dan lengkap dilaporkan oleh pemerintah kabupaten/kota. Berikut ini data tentang jumlah kelahiran dan jumlah akte kelahiran (surat kenal lahir) di Propinsi Lampung.

Tabel 6

Jumlah Kelahiran, Akta Kelahiran dan Surat Kenal Lahir yang Dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten/Kota se-Propinsi Lampung, Tahun 2002

Kabupaten/Kota	Jumlah Kelahiran	Akta Kelahiran	Surat Kenal Lahir
Lampung Selatan	559	10.437 **	450
Lampung Tengah	111	12.710 ***	-
Lampung Utara	390	7.585 ****	-
Lampung Barat	114	2.627 **	-
Tulang Bawang	3.317	9.150 ****	-
Lampung Timur	537	4.477 ***	-
Way Kanan	522	2.071 **	-
Bandar Lampung	1.002	2.634 *	-
Metro	63	9.865 *	-
Tanggamus	618	3.578 ***	-
Propinsi	7.233	65.134	450

Sumber: Biro Tata Pemerintahan Pemerintah Propinsi Lampung, 2003.

Keterangan:

\* : sampai dengan tri wulan I                    \*\*\* : sampai dengan tri wulan III  
 \*\* : sampai dengan tri wulan II                \*\*\*\* : sampai dengan tri wulan IV

Akta kelahiran yang dikeluarkan oleh kantor catatan sipil meliputi tiga macam yakni akta kelahiran umum, akta kelahiran dispensasi dan akta kelahiran istimewa. Jika dibandingkan antara jumlah kelahiran dalam satu tahun dengan jumlah akta kelahiran yang dikeluarkan, dapat dibaca adanya kecenderungan masyarakat dalam mengurus akta kelahiran anaknya. Pengurusan akta kelahiran tidak dilakukan segera setelah kelahiran anak, melainkan jauh setelah anak tumbuh besar. Pengurusan akta tersebut kemungkinan berkaitan dengan kepentingan anak itu sendiri misalnya dalam mendaftar sekolah atau melamar pekerjaan. Faktor yang mempengaruhi kecenderungan tersebut antara lain adalah biaya pengurusan yang mahal. Perlu diketahui bahwa hampir semua Pemerintah Kabupaten/Kota, hingga saat ini masih menerapkan kebijakan pengurusan akte kelahiran sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini sebenarnya tidak sesuai dengan Konvensi Hak Anak, karena pada dasarnya dalam konvensi tersebut secara tegas dinyatakan bahwa negara berkewajiban memberikan identitas kelahiran bagi setiap anak. Permasalahan ini nampaknya menjadi pelik mengingat, secara umum sumber-sumber pendapatan pemerintah kabupaten/kota hingga saat ini sangat terbatas.

Tabel 7

Jumlah Penduduk Usia 0-18 Tahun Propinsi Lampung  
Menurut Kelompok Usia, Jenis Kelamin, dan Kabupaten/Kota, Tahun 2000

Kabupaten	Kelompok Usia/Jenis Kelamin							
	0 - 4 Tahun		5 - 9 Tahun		10 - 14 Tahun		15 - 18 Tahun	
	Laki	Prp	Laki	Prp	Laki	Prp	Laki	Prp
Lampung Selatan	61.338	57.625	66.359	60.413	71.488	65.494	57.842	50.865
Lampung Utara	29.156	27.732	31.332	30.038	34.653	33.096	26.006	24.465
Lampung Barat	20.300	19.992	21.585	20.371	21.430	20.217	16.320	13.850
Lampung Timur	45.342	42.393	45.992	42.945	49.387	45.701	30.684	35.634
Lampung Tengah	54.022	50.525	56.858	52.144	60.668	56.334	48.911	43.840
Tanggamus	42.645	40.397	45.138	41.905	50.839	47.036	48.101	42.595
Tulang Bawang	40.801	37.233	42.441	38.080	40.977	36.352	30.395	26.315
Way Kanan	19.269	19.171	21.078	20.166	22.715	21.901	16.460	14.589
Bandar Lampung Metro	38.160 5.736	35.968 5.441	36.950 5.384	35.175 5.364	38.962 5.863	38.301 5.816	35.729 5.536	38.113 5.762
<b>Jumlah</b>	<b>356.769</b>	<b>336.477</b>	<b>373.117</b>	<b>346.601</b>	<b>396.982</b>	<b>370.248</b>	<b>315.984</b>	<b>296.028</b>

Sumber: BPS Lampung, Karakteristik Penduduk Propinsi Lampung, Hasil SP, 2000.

Jika diasumsikan separoh dari anak di Propinsi Lampung sebagaimana terlihat dalam tabel di atas belum mempunyai akte kelahiran, maka diperlukan dana sangat besar untuk menerbitkan akte kelahiran bagi seluruh anak. Selain itu konsekuensi yang harus ditanggung oleh masing-masing pemerintah kabupaten/kota adalah kehilangan potensi pendapatan yang cukup besar, dan hal itu tidak mudah untuk dicari penggantinya. Dengan demikian pelaksanaan Konvensi Hak Anak khususnya dalam hal identitas kelahiran ini menghadapi tantangan berat dalam era otonomi daerah saat ini.

## 2.2. Kebebasan Berpendapat

Anak berhak atas kemerdekaan berpikir, hati nurani, dan beragama, juga menghormati hak dan kewajiban orang tua untuk memberi pengarahan kepada anak dalam menerapkan haknya dengan cara yang sesuai dengan perkembangan anak. Namun demikian negara juga menggariskan agar manifestasi kebebasan tersebut harus tunduk pada pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang yang diperlukan untuk melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan umum, dan moral atau hak asasi dan kebebasan orang lain.

Untuk mengetahui kondisi kebebasan anak dalam beragama di suatu wilayah misalnya digunakan pendekatan kebebasan pemeluk agama pada umumnya dalam menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya. Indikator yang digunakan untuk maksud tersebut antara lain adalah rasio rumah ibadah terhadap pemeluknya. Rasio ini merupakan angka yang menunjukkan perbandingan antara jumlah tempat/rumah ibadah dengan pemeluk agamanya di suatu wilayah pada suatu tahun tertentu. Rasio ini menunjukkan ketersediaan pelayanan publik berupa fasilitas tempat ibadah di suatu wilayah. Semakin kecil rasionya berarti semakin banyak tempat ibadah yang tersedia, dan semakin baik pula pelayanan publik yang berarti semakin mudah penduduk untuk melaksanakan ibadah sesuai ajaran agamanya. Data berikut ini menunjukkan bahwa rasio tempat peribadatan-pemeluk agama di Propinsi Lampung bervariasi antar daerah (kabupaten/kota) dan antar agama. Variasi itu terutama untuk agama Katholik, Hindu dan Budha.

Tabel 8  
Rasio Tempat Peribadatan-Umat Beragama di Propinsi Lampung,  
Tahun 2001

Kabupaten/Kota	Agama				
	Islam	Katholik	Protestan	Hindu	Budha
Lampung Barat	321	950	16	175	327
Tanggamus	390	195	69	198	273
Lampung Selatan	532	2.282	254	1.641	564
Lampung Timur	298	414	142	315	530
Lampung Tengah	186	242	64	307	523
Lampung Utara	294	788	60	249	767
Way Kanan	293	235	110	254	450
Tulang Bawang	238	852	99	834	1.954
Bandar Lampung	287	266	75	575	497
Metro	433	2.551	346	542	444

Sumber: BPS Propinsi Lampung, Lampung dalam Angka 2001 (diolah kembali)

Secara umum Kota Bandar Lampung memiliki rasio yang relatif paling baik untuk hampir semua agama dibandingkan daerah lain. Sementara itu Kabupaten Lampung Selatan memiliki rasio yang paling buruk, juga untuk semua agama. Tantangan ke depan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyediaan fasilitas publik dan pelayanan sosial lain dalam bidang pembinaan kehidupan beragama perlu mempertimbangkan faktor



penyebaran penduduk berdasarkan agama. Meskipun persentase umat Islam di Propinsi Lampung mencapai kurang lebih 90%, namun bukan berarti tingkat homogenitas umat beragama sama untuk unit wilayah yang lebih kecil.

Data mengenai jumlah anak berdasarkan agama yang dianut hingga saat ini tidak tersedia. Demikian pula data mengenai pembinaan keagamaan bagi anak-anak masih sangat terbatas. Keterbatasan data tersebut merupakan eksekutif Otonomi Daerah. Fenomena yang muncul adalah bahwa Daerah Tingkat II (kabupaten/kota) merasa tidak lagi mempunyai "kewajiban" untuk memberikan data dan laporan lainnya kepada Daerah Tingkat I (propinsi). Akibatnya Pemerintah Propinsi dalam banyak hal mengalami kesulitan dalam penyediaan data yang dapat menggambarkan kondisi keseluruhan wilayah propinsi. Berikut ini data mengenai Jumlah TK Al-Qur'an (TKA) dan Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA) Propinsi Lampung, tahun 2000. Adapun data tentang jumlah murid yang dibina dalam lembaga tersebut tidak tersedia.

### 2.3. Tindak Kekerasan terhadap Anak

Menurut Ikram (1998), ada empat macam penganiayaan dan kekerasan yang terjadi pada anak terutama anak jalanan, yaitu (1) *physical abuse* (aniaya fisik), (2) *child neglect* (pengabaian), (3) *emotional maltreatment*, dan (4) *sexual abuse* (aniaya seksual) (Buletin Emper, 1998:5). Apabila dilihat dari tempat terjadinya, kekerasan terhadap anak jalanan terbagi menjadi dua yakni kekerasan yang terjadi dalam keluarga, dan kekerasan yang dialami di jalan. Pengalaman kekerasan yang dialami dalam keluarga dapat mendorong anak untuk turun ke jalan sebagai anak jalanan. Namun demikian data mengenai kekerasan terhadap anak baik anak jalanan maupun yang bukan anak jalanan, sangat sulit untuk diperoleh. Data berikut ini merupakan data kasus tindak kekerasan terhadap anak jalanan di Bandar Lampung.

Tabel 9  
Pengalaman Tindak Kekerasan Terhadap Anak Jalanan di Bandar Lampung  
Selama Berada di Jalanan Menurut Jenis Kelamin,  
Tahun 1999

No.	Jenis Tindak Kekerasan	Laki-laki		Perempuan	
		Diri	Teman	Diri	Teman
1	Dipukuli/dikeroyok	112	215	8	23
2	Diperas/ditodong	120	168	3	11
3	Digaruk/ditangkap kamtib (polisi)	17	73	-	5
4	Terserempet kendaraan	88	129	8	11
5	Tertabrak/terlindas kendaraan	20	54	4	2
6	Jatuh dari kendaran	35	62	2	2
7	Disodomi	-	1	-	-
8	Diperkosa	-	-	-	-
9	Dibunuh	-	-	-	-
10	Lainnya	8	15	-	-

Sumber: Laporan Hasil Survei dan Mapping Anak Jalanan, 1999.

Anak jalanan sangat rentan terhadap berbagai tindak kekerasan yang dilakukan oleh sesama anak jalanan maupun kelompok preman (*adult petty criminals*). Selain itu anak jalanan juga sangat rentan terhadap berbagai bahaya yang mengancam kesehatan dan keselamatan jiwanya. Berbagai bentuk tindak kekerasan dan pelanggaran HAM terhadap anak jalanan selama ini sangat sulit dipantau. Meskipun Indonesia telah memiliki UU No. 9 Tahun 1974 Tentang Kesejahteraan Anak dan meratifikasi Konvensi Hak Anak melalui Kepres No. 36/1990, serta Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, masalah tersebut masih sangat sulit diatasi. Salahsatu sumber permasalahan tersebut pada dasarnya terletak pada kesulitan mendeteksi kasus-kasus tindak kekerasan dan pelanggaran HAM anak, oleh karena berbagai sebab.

Pertama, ketidakberanian anak untuk melaporkan kasus-kasusnya kepada pihak-pihak yang berwenang sehingga kasus-kasus tersebut menjadi relatif "tersembunyi" serta tidak menjadi urusan publik. Sebab yang pertama tadi sangat berkaitan dengan tekanan-tekanan yang sering diberikan pelaku tindak kekerasan, serta reaksi negatif dari masyarakat atau bahkan dari para aparat penegak hukum yang cenderung bersikap "*blamed it to the victim*". Kedua, lemahnya upaya penegakan hukum terhadap kasus-kasus tersebut

yang hal ini berkaitan dengan persepsi bahwa tindak kekerasan dan pelanggaran HAM terhadap anak jalanan merupakan masalah intern atau bahkan merupakan "resiko" yang harus ditanggung anak jalanan itu sendiri sebagai "konsekuensi" logis menjalani kehidupannya di jalanan.

Keberadaan anak di jalanan atau tempat-tempat strategis secara ekonomis termasuk *public sphere* sudah dapat dipastikan banyak mengandung resiko atau kerawanan sosial baik bagi diri anak jalanan maupun orang lain. Situasi sosial yang demikian merupakan fenomena yang dapat dilihat dalam kehidupan anak selama berada di jalanan. Peristiwa-peristiwa seperti persaingan, cemburu sosial, saling cemooh, penekanan/pemerasan merupakan suatu peristiwa yang dianggap biasa.

Pengalaman tindak kekerasan terhadap anak tidak saja dialami oleh anak jalanan, melainkan juga anak-anak lain pada umumnya. Tindak kekerasan tersebut biasanya dilakukan oleh orang tua atau orang-orang lain terdekat yang lebih dewasa. Namun demikian kasus-kasus tindak kekerasan tersebut sulit untuk dideteksi. Sebagaimana tindak kekerasan terhadap perempuan, tindak kekerasan terhadap anak dalam lingkungan keluarga dianggap oleh sebagian besar masyarakat sebagai "urusan" domestik. Tindak kekerasan terhadap anak akan menjadi urusan publik jika terjadi di luar rumah dan dilakukan oleh orang lain. Hal itupun akan terjadi jika pihak keluarga melakukan pengaduan kepada pihak yang berwajib. Dalam kenyataannya, diduga banyak kasus tindak kekerasan terhadap anak yang tidak dilaporkan oleh pihak keluarga, dan diselesaikan secara "kekeluargaan" antara pihak keluarga dengan pihak yang melakukan tindak kekerasan.

Sementara itu sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat di Bandar Lampung yakni "Damar" yang khusus bergerak dalam bidang advokasi terhadap perempuan dan anak secara rutin terus melakukan pencatatan terhadap berbagai tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak mulai dari tahun 1998. Sumber data tersebut berasal dari mass media (cetak) setempat (harian "Lampung Post" dan "Radar Lampung") dan dari pelayanan pengaduan yang disediakan oleh lembaga tersebut. Beberapa perempuan yang mengalami tindak kekerasan (sebagian merupakan korban perkosaan) melakukan pengaduan dan selanjutnya diupayakan bantuan hukum (pendampingan) selain upaya pendampingan non litigasi. Di Propinsi Lampung juga terdapat lembaga lain yang menerima pengaduan semacam itu yakni yang berada di rumah sakit Abdoel Moeloek. Hasil pencatatan LSM Damar tersebut disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 10

Perkembangan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan Berdasarkan Usia Korban dan Usia Pelaku, Propinsi Lampung, Tahun 1998-2001

No.	Uraian	Tahun			
		1998	1999	2000	2001
1	Usia Korban (Tahun)				
	< 18	38	34	75	82
	> 18	18	27	68	113
	Tidak diketahui	18	5	13	7
	Total	68	66	156	202
2	Usia Pelaku				
	< 18	22	2	14	12
	> 18	48	51	88	160
	Tidak diketahui	44	30	61	46
	Total	94	84	163	218

Sumber: LSM "Damar" Tahun 2002.

Tabel di atas menunjukkan bahwa anak perempuan merupakan kelompok penduduk yang rentan terhadap tindak kekerasan. Hal ini terlihat dari korban anak kekerasan terhadap perempuan yang cenderung meningkat dari tahun 1998 hingga 2001. Tabel tersebut memang tidak menyebutkan secara rinci jenis tindak kekerasan yang menimpa anak perempuan, namun dapat diduga bahwa sebagian besar tindak kekerasan tersebut berupa perkosaan/pencabulan. Jika dugaan ini benar, maka yang perlu diperhatikan adalah model penanganan terhadap korban dan tinjauan terhadap hukuman bagi pelaku. Korban perkosaan pada umumnya mengalami trauma yang sangat mendalam, sehingga diperlukan pendekatan dan penanganan yang khusus. Kehadiran lembaga semacam "*women crisis center*" bagi perempuan korban perkosaan dan tindak kekerasan lainnya di masa depan merupakan kebutuhan mendesak mengingat kecenderungan meningkatnya kasus-kasus tindak kekerasan terhadap perempuan.

Sementara itu dari sisi pelaku, hingga saat ini fenomena hukuman ringan bagi pelaku perkosaan masih sering terjadi dalam kebanyakan kasus. Mengenai hukuman bagi pelaku perkosaan ini di masa depan perlu ditinjau

ulang, agar hukuman tersebut benar-benar dapat memberikan efek "penjeraan". Banyak kalangan yang saat ini menganggap bahwa hukuman bagi pelaku perkosaan sangat ringan, padahal efek yang ditimbulkan bagi korban dapat berlangsung seumur hidup.

Tabel 11

Jumlah Anak Propinsi Lampung yang Mengalami Tindak Kekerasan Berdasarkan Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota, Tahun 2001

No.	Kabupaten/Kota	Jenis Kelamin	
		Laki-laki	Perempuan
1	Bandar Lampung	29	21
2	Lampung Selatan	17	13
3	Lampung Utara	21	12
4	Lampung Tengah	11	14
5	Lampung Barat	19	12
6	Tanggamus	14	9
7	Tulang Bawang	17	19
8	Lampung Timur	13	16
9	Way Kanan	18	21
10	Mota Metro	7	6
	Jumlah	166	143

Sumber: Dinas Kesejahteraan Sosial Propinsi Lampung, 2001.

Tabel tersebut di atas merupakan data tentang jumlah anak yang mengalami tindak kekerasan di Propinsi Lampung. Dalam kenyataan yang sebenarnya, kemungkinan jumlah anak yang mengalami tindak kekerasan jauh lebih besar dari angka yang tercantum dalam tabel di atas. Hal ini mengingat bahwa tindak kekerasan terhadap anak yang pada umumnya dilakukan oleh orangtua atau orang yang lebih dewasa, pada dasarnya serupa dengan fenomena "puncak gunung es di tengah lautan". Seperti halnya dengan tindak kekerasan terhadap perempuan, banyak kasus tindak kekerasan yang menimpa anak tidak dilaporkan atau tidak diketahui oleh publik, oleh karena sebagian orang tua menganggap bahwa hal itu merupakan masalah domestik. Hal yang lebih memprihatinkan adalah persepsi sebagian besar orang tua masih mempunyai anggapan bahwa tindak kekerasan terhadap anak merupakan bagian "pendidikan moral" agar anak lebih patuh kepada orang tua.

### BAB III

## LINGKUNGAN KELUARGA DAN PERAWATAN ALTERNATIF

Setiap anak mempunyai hak atas kelangsungan hidup, hak untuk tumbuh dan berkembang, hak atas perlindungan, dan hak berpartisipasi dalam kehidupan keluarga, sosial, dan budaya. Namun karena berbagai hal, khususnya kemiskinan, banyak anak di Indonesia yang tidak atau belum menikmati hak-hak itu. Kemiskinan mengakibatkan banyak orangtua meninggalkan anak-anaknya untuk bekerja di kota atau tempat lain, bahkan ada yang menjadi pekerja di luar negeri. Akibatnya anak kurang memperoleh perhatian dan pengawasan. Selain itu banyak anak yang memang hidup tanpa keluarga. Mereka hidup di jalanan, tidur di stasiun, pasar, atau emperan toko.

### 3.1. Anak Jalanan

Krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak pertengahan tahun 1997 telah membawa dampak yang luas bagi masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang merosot hingga mencapai minus 20% telah mengakibatkan penurunan berbagai indikator kesejahteraan masyarakat. Salahsatu indikasinya adalah tingkat pendapatan perkapita masyarakat yang tidak mengalami peningkatan, menyebabkan secara riil pendapatan tersebut makin merosot karena di sisi lain telah terjadi eskalasi harga berbagai barang kebutuhan pokok. Dampak ikut-an dari krisis ekonomi tersebut menyentuh hampir seluruh sendi kehidupan masyarakat, termasuk dalam hal ini adalah meningkatnya permasalahan sosial baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya.

Salahsatu fenomena yang muncul kemudian akibat permasalahan tersebut adalah meningkatnya jumlah anak jalanan di daerah perkotaan. Aktivitas sebagai anak jalanan merupakan alternatif solusi yang paling dapat dilakukan dalam mengatasi kesulitan ekonomi keluarga. Studi intensif mengenai dampak krisis ekonomi terhadap peningkatan jumlah anak jalanan memang belum banyak dilakukan. Namun demikian peningkatan jumlah anak jalanan setelah terjadinya krisis dirasakan terjadi di berbagai kota (besar) di Indonesia. Untuk Propinsi Lampung, peningkatan jumlah anak jalanan ini juga disebabkan karena migrasi anak jalanan dari daerah lain seperti Jakarta

dan Palembang. Kondisi ini selanjutnya mengakibatkan tingkat persaingan dan konflik sosial di antara anak jalanan makin meningkat.

Peningkatan jumlah anak jalanan yang mencari nafkah dalam membantu ekonomi keluarga perlu mendapat perhatian serius. Hal ini disebabkan anak yang bekerja di jalanan mempunyai resiko yang sangat tinggi bagi tumbuh kembang anak itu sendiri. Hasil survai yang dilakukan oleh Universitas Artma Jaya bekerjasama dengan Asian Development Bank dan Departemen Sosial Propinsi Lam-pung, pada tahun 1999, menunjukkan bahwa secara keseluruhan anak jalanan yang ada di Bandar Lampung merupakan anak jalanan yang masih memiliki komunitas (dalam hal ini adalah keluarga). Keterlibatan anak dalam aktivitas ekonomi di jalanan lebih disebabkan karena keterbatasan kemampuan keluarga dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Aktivitas di jalanan pada umumnya dilakukan pada sela waktu sebelum atau sesudah sekolah. Meskipun lamanya beraktivitas di jalanan ini masih terbatas, pengalaman tindak kekerasan dan pelanggaran HAM sering dialami oleh anak jalanan. Diantara aktivitas anak jalanan tersebut adalah: pengamen, pemulung, pengasong, pengemis, perantara/calo, kuli/buruh pasar, penyemir sepatu, parkir mobil, kernet, pencuci mobil, berkeliaran tidak menentu, pekerja seks, dan lain-lain. Aktivitas yang termasuk lain-lain ini misalnya terdapat sejumlah kecil anak jalanan yang pada jam-jam tertentu mengambil makanan afkir (tidak layak saji) di salahsatu restoran waralaba terkenal di Bandar Lampung. Di kalangan anak jalanan, pekerjaan ini mereka sebut sebagai "oyen". Aktivitas yang dilakukan di jalanan rata-rata mencapai 5,5 jam per hari, dengan rentang waktu antara pukul 06.00 - 11 00 di pagi hari dan pukul 13.00 - 18.00 di sore hari. Aktivitas tersebut sangat berkaitan dengan jadwal sekolah masing-masing anak.

Dari sampel sebanyak 496 anak, terdapat 49 anak (9,9%) anak yang menyatakan pendapatannya lebih rendah, 274 anak (55,2%) menyatakan pendapatannya relatif stabil dan hanya 74 anak (14,9%) yang menyatakan pendapatannya meningkat setelah krisis moneter. Sementara itu, 99 anak lainnya merupakan anak jalanan "baru", yakni mereka yang beraktivitas di jalan setelah terjadinya krisis. Penghasilan yang mereka peroleh pada umumnya digunakan untuk membantu keluarga memenuhi kehidupannya dan juga untuk biaya sekolah. Kondisi yang paling dirasakan anak jalanan

setelah krisis adalah tingkat persaingan yang semakin tinggi untuk memperoleh penghasilan. Persaingan tersebut terjadi akibat meningkatnya jumlah anak jalanan yang juga berasal dari propinsi lain seperti Sumatera Selatan, Jawa Barat maupun juga Jakarta. Berikut ini adalah gambaran tingkat penghasilan yang diperoleh anak jalanan di Bandar Lampung tahun 1999.

Tabel 12

Penghasilan Rata-rata Anak Jalanan di Bandar Lampung Sebelum dan Sesudah Krisis Moneter Menurut Jenis Kelamin dan Jenis Pekerjaan (dalam Rupiah/hari).

Jenis Pekerjaan	Sebelum Krisis				Sesudah Krisis			
	Lk	Pengh	Pr	Pengh	Lk	Pengh	Pr	Pengh
Pengamen	2	11.000	-	-	6	7.750	-	-
Pemulung	61	6.000	8	6.800	78	5.500	13	5.600
Pengasong/pedagang	124	7.000	14	4.600	20	6.000	27	4.000
Pengemis	1	1.250	-	-	2	6.100	-	-
Perantara/calo	1	7.500	-	-	1	7.500	-	-
Kuli/buruh pasar	15	6.500	1	2.500	19	6.600	3	3.100
Penyemir sepatu	28	7.500	-	-	39	5.800	1	4.250
Parkir Mobil	2	17.500	-	-	4	10.250	-	-
Kernet	5	5.500	-	-	7	7.800	-	-
Pencuci mobil	42	5.250	-	-	58	4.800	-	-
Pekerja Seks	-	-	1	1.250	-	-	1	12.500
Berkelaran tak menentu	2	5.250	-	-	2	5.250	-	-
Lainnya	8	9.500	-	-	12	1.250	1	3.250

Sumber: Laporan Hasil Survei dan Mapping anak Jalanan, 1999.

Bantuan yang diberikan masyarakat maupun pemerintah terhadap anak jalanan dapat dikatakan masih terbatas dan tidak sampai sasaran. Dalam beberapa tahun belakang ini memang terdapat sejumlah dana yang dialokasikan untuk anak jalanan. Bantuan tersebut disalurkan melalui rumah singgah yang merupakan "crisis center" bagi anak jalanan. Pada tahun 2003 ini bantuan dana yang dialokasikan untuk anak jalanan di seluruh Propinsi Lampung mencapai 1,8 mil-yar rupiah. Rumah singgah yang mendapatkan bantuan tersebut meliputi 9 dari 14 di Bandar Lampung, 2 di Lampung Selatan, 3 di Lampung Tengah, 2 di Kota Metro, 2 di Tanggamus dan 2 di Lampung Utara. Rumah singgah yang mendapat



bantuan tersebut telah diseleksi, oleh karena ada kecenderungan sebagian rumah singgah yang segera menutup rumah singgah begitu memperoleh dana bantuan (Lampung Post, 7 Juli 2003). Hal ini mengisyaratkan bahwa bantuan tersebut diduga hanya sebagian kecil dapat dinikmati anak jalanan, oleh karena telah disalahgunakan oleh oknum pengurus rumah singgah.

### 3.2. Anak Penyandang Masalah Kesejahteraan lain

Dalam Konvensi Hak Anak disebutkan bahwa anak berhak tidak akan dipisahkan dari orangtuanya bertentangan dengan keinginan anak, kecuali bila penguasa yang berwenang yang tunduk pada peninjauan kembali oleh pengadilan menetapkan, sesuai dengan undang-undang dan prosedur yang berlaku, bahwa pemisahan tersebut diperlukan untuk kepentingan yang terbaik dari anak itu sendiri. Penetapan seperti itu, mungkin diperlukan dalam kasus khusus seperti kasus yang melibatkan penyalahgunaan atau penelantaran anak oleh orang tuanya, atau kasus dimana kedua orangtuanya terpisah, dan suatu keputusan yang harus menetapkan tempat tinggal anak tersebut. Untuk anak yang terpaksa terpisah dari orangtuanya negara menjamin untuk mempertahankan hubungan pribadi dan hubungan langsung secara tetap dengan kedua orangtuanya, kecuali jika bertentangan dengan kepentingan terbaik anak.

Anak-anak penyandang masalah kesejahteraan sosial merupakan kategori anak yang membutuhkan perlindungan khusus. UNICEF mengidentifikasi enam kategori anak yang dapat merugikan anak-anak sehingga mereka membutuhkan perlindungan khusus, yaitu:

1. Kondisi merugikan pada pekerja anak.
2. Perang dan segala bentuk kekerasan yang terorganisir atau berskala luas.
3. Eksploitasi atau perlakuan salah secara seksual.
4. Kecacatan (fisik/mental/inderawi)
5. Kehilangan keluarga dan/atau pengaruh utama secara permanen atau temporal.
6. Hukum yang kurang menguntungkan dan/atau perlakuan salah dalam proses hukum dan pengadilan.

Upaya perlindungan tersebut memerlukan peran serta aktif dan berkesinambungan dari setiap elemen masyarakat. Idealnya terdapat berbagai

lembaga di masyarakat yang secara khusus menangani permasalahan anak. Lembaga tersebut dalam operasionalisasinya memiliki program kerja yang jelas dan didasarkan pada kebutuhan dan kepentingan anak. Penyandang masalah kesejahteraan sosial menurut Dinas Kesejahteraan sosial meliputi 12 kategori. Data yang tersedia pada Dinas Kesejahteraan Sosial Propinsi Lampung tentang penyandang masalah kesejahteraan sosial ini, beberapa kategori diantaranya masih tercampur antar kelompok umur. Adapun data yang sudah terpilah antar kelompok umur antara lain meliputi anak jalanan, anak terlantar, anak nakal, dan balita terlantar. Gambaran mengenai anak penyandang masalah kesejahteraan sosial di Propinsi Lampung terlihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 13

Jumlah Anak Terlantar, Anak Nakal, Balita Terlantar dan anak Jalanan Menurut Kabupaten/Kota di Propinsi Lampung, Tahun 2001

Kabupaten/Kota	Jenis Masalah			
	Anak Terlantar	Anak Nakal	Balita Terlantar	Anak Jalanan
Lampung Barat	12.432	78	598	275
Tanggamus	10.897	2.008	-	282
Lampung Selatan	13.123	472	340	188
Lampung Timur	3.412	698	120	76
Lampung Tengah	6.661	377	9	95
Lampung Utara	30.809	3.390	1.427	1.008
Way Kanan	62	10	37	-
Tulang Bawang	13.689	4.847	25.212	-
Bandar Lampung	1.319	1.163	21	4.069
Metro	11.292	1.329	892	820
Propinsi	103.696	14.372	27.598	5.897

Sumber: BPS Propinsi Lampung, Lampung dalam Angka 2001.

### 3.3. Anak Asuh

Dalam Konvensi Hak Anak disebutkan bahwa, negara akan membuat upaya terbaik untuk menjamin pengakuan atas prinsip bahwa kedua orang tua memikul tanggung jawab bersama untuk membesarkan dan mengembangkan anak. Orangtua atau walinya yang sah memikul tanggungjawab utama untuk membesarkan dan mengembangkan anak yang bersangkutan.

Kepentingan terbaik anak akan menjadi perhatian utama. Untuk menjamin dan meningkatkan hak-hak anak yang dinyatakan dalam Konvensi ini, negara akan memberi bantuan yang layak kepada orang tua atau wali yang sah dalam pelaksanaan tanggungjawab membesarkan anak dan akan menjamin pengembangan lembaga-lembaga, fasilitas, dan pelayanan untuk memelihara anak.

Dalam kenyataannya, oleh karena berbagai sebab, tidak semua orangtua mampu memikul tanggungjawab untuk membesarkan dan mengembangkan anak. Oleh karena itu dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2003, disebutkan bahwa pengasuhan anak ditujukan kepada anak yang orangtuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anaknya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. Pengasuhan anak tersebut dilakukan oleh lembaga yang mempunyai kewenangan untuk itu. Lembaga berupa panti asuhan anak yang banyak berdiri merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam ikut menanggulangi berbagai permasalahan sosial khususnya yang berkaitan dengan kesejahteraan dan perlindungan anak.

Jumlah panti asuhan di Propinsi Lampung hingga saat ini mencapai 34 buah dengan jumlah binaan sebanyak 1.187 orang. Dari jumlah tersebut, panti asuhan yang mengasuh anak-anak sebanyak 16 buah dengan jumlah anak asuh sebanyak 1.062 anak. Sebanyak 16 panti asuhan yang lain pada saat ini tidak lagi menampung anak asuh. Sementara itu dua panti asuhan yakni Sarana Tresna Werdha "Bhakti Yusna" dan Sarana Rahabilitasi Penderita Cacat Netra "Indra Kesuma" dikhususkan untuk orang dewasa. Beberapa program pendidikan dan pelatihan yang diberikan kepada anak asuh antara lain adalah pembuatan tapis, kerajinan, jahit menjahit, perikanan/pertanian, pendidikan agama dan bela diri. Program-program tersebut dimaksudkan agar anak asuh memiliki kualitas dan kemampuan yang sama dengan anak-anak yang lain. Berikut ini merupakan data tentang anak asuh di Propinsi Lampung.

Tabel 14

Jumlah Anak Yatim/Anak Asuh Propinsi Lampung yang Diasuh dalam Panti Asuhan/Yayasan, Tahun 2001

Nama Panti Asuhan	Kabupaten/Kota	Jenis Kel		Jumlah
		Laki	Prp	
P.A. St. Vincentius Pringsewu	Tanggamus	-	-	50
P.A. Budi Asih	Bandar Lampung	46	39	85
Y.Y. Sunan Gunung Jati	Bandar Lampung	-	-	65
P.A. Nurul Islam cab Kecapi	Lampung Selatan	-	-	65
P.A. Nurul Islam cab. Way Mull	Lampung Timur	-	-	65
P.A. Babul Hikmah Kalianda	Lampung Selatan	-	-	60
P.A. Nurul Islam Cab. Seputih Surabaya	Lampung Tengah	-	-	45
P.A. Trisna Asih	Bandar Lampung	28	22	50
P.A. Qoroba Mulya Sukarame	Bandar Lampung	-	-	60
P.A. Mulya Pusat	Bandar Lampung	-	-	60
P.A. Imam Bonjol	Bandar Lampung	-	-	30
P.A. Fajar Mulya Islam	Lampung Utara	-	-	50
P.A. Budi Utomo	Bandar Lampung	-	-	67
P.A. Nurul Islam Pusat	Bandar Lampung	-	-	150
P.A. Istiqomah Al Amin	Bandar Lampung	-	-	115
P.A. Riyadlatul 'Ulum	Bandar Lampung	-	-	45
<b>Jumlah</b>				<b>1.062</b>

Sumber: BPS Propinsi Lampung, Lampung Dalam Angka 2001 (diolah kembali).

Sementara itu anak asuh yang tidak diasuh dalam panti asuhan akan tetapi mendapat dana bantuan dari Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (GN-OTA) terdapat sejumlah 10.972 anak yang terdiri 5.617 anak (51,20%) yang bersekolah SD dan 5.355 anak (48,80%) yang bersekolah di SLTP. Keberadaan GN-OTA ini merupakan salahsatu solusi untuk mengatasi berbagai permasalahan sosial khususnya yang menimpa anak. Jumlah anak fakir miskin, anak yatim, anak terlantar, dan anak cacat nampak mengalami peningkatan terus menerus. Keberhasilan program (gerakan) tersebut merupakan bukti kerjasama pemerintah dan masyarakat dalam menanggulangi berbagai permasalahan sosial yang dialami anak.

Di masa mendatang gerakan ini perlu terus dikembangkan agar semakin banyak anak asuh yang mendapat bantuan. Selain itu besaran bantuan untuk setiap anak juga makin meningkat sehingga dapat meringankan

beban secara signifikan. Saat ini besarnya bantuan untuk anak SD adalah sebesar Rp60.000/anak/tahun dan untuk anak SLTP sebesar Rp90.000/anak/tahun. Jumlah ini nampaknya tidak sebanding dengan beban biaya pendidikan dan kebutuhan lain yang cenderung terus meningkat.

Tabel 15

Jumlah Anak Asuh dan Besarnya Dana Bantuan Menurut Kabupaten dan Tingkat Pendidikan, Tahun 2001

Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Asuh			Besarnya Dana Bantuan (000) Rp		
	SD	SLTP	Jumlah	SD	SLTP	Jumlah
Lampung Barat	439	566	1.005	26.340	50.940	77.280
Tanggamus	359	616	975	21.540	55.440	76.980
Lampung Selatan	1.608	699	2.307	96.480	62.910	159.390
Lampung Timur	711	658	1.369	42.660	59.220	101.390
Lampung Tengah	735	471	1.206	44.100	42.390	86.490
Lampung Utara	382	520	902	22.920	46.800	69.720
Way Kanan	576	518	1.094	34.560	46.620	81.180
Tulang Bawang	98	468	566	5.880	42.120	48.000
Bandar Lampung	585	486	1.071	35.100	43.740	78.840
Metro	124	353	477	7.440	31.770	39.210
<b>Jumlah</b>	<b>5.617</b>	<b>5.355</b>	<b>10.972</b>	<b>337.020</b>	<b>481.950</b>	<b>818.970</b>

Sumber: GN-OTA Prop. Lampung dalam BPS Propinsi Lampung, 2002. Lampung dalam Angka 2001.

Bentuk bantuan lain yang diberikan kepada anak asuh ini berasal dari dana bantuan kompensasi Bahan Bakar Minyak (BBM). Pada tahun 2003, jumlah dana yang dialokasikan untuk anak asuh mencapai 3,1 Milyar. Berasal dari dana tersebut, perinciannya setiap anak mendapatkan Rp2.250 per hari selama satu tahun. Jadi setiap anak mendapatkan dana Rp821.250. Jumlah panti asuhan yang mendapat bantuan dana mencapai 81 panti asuhan. Secara terperinci panti asuhan yang berhak menerima dana kompensasi BBM adalah: Bandar Lampung 10 panti (448 anak asuh), Metro 6 panti (260), Lampung Selatan 29 (1.047), Lampung Timur 8 (427), Lampung Tengah 10 (471), Tanggamus 12 (519), Lampung Utara 8 (367), Way Kanan 2 (105), Tulang Bawang 4 (156), dan Lampung Barat 1 (50) (Radar Lampung, 13 Juli 2003).

Jumlah panti asuhan dan anak asuh tersebut meningkat dari kondisi tahun 2001. Anak asuh yang diasuh di panti asuhan tersebut meliputi anak yang bersekolah SD hingga SMU. Setiap anak asuh mendapatkan biaya pendidikan rata-rata sebesar Rp25.000 setiap bulan yang berasal dari APBD. Selain itu panti asuhan juga mendapatkan dana atau bantuan (dalam bentuk natura) dari donatur dengan jumlah terbatas dan tidak tetap setiap bulannya. Kesulitan yang dihadapi panti asuhan saat ini adalah keterbatasan dana terutama untuk pendidikan seiring dengan meningkatnya biaya pendidikan (untuk pembelian buku). Sumber dana lain seperti misalnya dari BAZIS (Badan Amal, Zakat, Infaq, Sadaqoh) pada umumnya hingga saat ini tidak sampai ke panti-panti asuhan.

#### **3.4. Anak Adopsi**

Dalam Konvensi Hak Anak disebutkan bahwa negara mengakui dan/atau membolehkan sistem adopsi yang dapat menjamin bahwa kepentingan terbaik anak yang bersangkutan dapat merupakan pertimbangan yang paling utama. Adopsi anak idealnya dilakukan setelah melalui proses pengadilan, oleh karena kepentingan terbaik anak dapat diketahui oleh pihak pengadilan, dan selanjutnya menjadi dasar bagi hakim dalam memutuskan suatu perkara (adopsi). Namun dalam kenyataannya tidak setiap anak yang diadopsi didaftarkan di pengadilan negeri setempat. Hal itu mungkin berkaitan dengan berbagai faktor penyebab antara lain persepsi masyarakat bahwa biaya pengurusan mahal dan prosedur pengurusan yang berbelit-belit. Selain itu terdapat anggapan di kalangan masyarakat bahwa pengurusan adopsi anak ke pengadilan negeri justru akan mengganggu hubungannya dengan anak itu sendiri. Berikut ini merupakan data adopsi anak yang tercatat pada Pengadilan Negeri Kelas I.A Bandar Lampung.

Tabel 16  
 Jumlah Anak yang Diadopsi Melalui Pengadilan Negeri Kelas Ia Bandar  
 Lampung, Tahun 2002

Bulan	Jumlah Perkara Masuk	Jumlah Perkara yang Diputuskan	Sisa Perkara Bulan ybs.
Januari	6	3	3
Februari	7	6	4
Maret	9	8	5
April	1	3	2
Mei	2	2	2
Juni	5	5	2
Juli	2	4	-
Agustus	5	2	3
September	6	6	3
Oktober	8	11	-
Nopember	6	5	1
Desember	-	1	-
<b>Jumlah</b>	<b>57</b>	<b>57</b>	<b>0</b>

Sumber: Pengadilan Kelas Ia Bandar Lampung, 2003.

## **BAB IV**

# **KESEHATAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL**

Kesehatan merupakan unsur penting bagi manusia untuk dapat melakukan aktivitas kehidupan dengan baik. Penduduk yang sehat mencerminkan tingginya tingkat kesejahteraan penduduk, yang juga berarti meningkatnya kualitas hidup. Pembangunan yang terus digalakkan ditujukan bagi peningkatan kualitas hidup penduduk dan upaya peningkatan kualitas hidup penduduk secara fisik, melalui peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan status kesehatan masyarakat.

Program pembangunan kesehatan yang dilaksanakan antara lain peningkatan fasilitas kesehatan, upaya peningkatan status gizi anak, dan kesehatan halita. Indikator kesehatan yang dipakai untuk menggambarkan derajat kesehatan masyarakat adalah angka kematian bayi dan angka harapan hidup. Sedangkan indikator yang dipakai untuk menggambarkan status kesehatan masyarakat adalah angka yang menunjukkan keluhan masyarakat terhadap gangguan kesehatan. Angka harapan hidup di Propinsi Lampung terus meningkat dari tahun ke tahun. Hasil Sensus Penduduk 1971 menunjukkan bahwa angka harapan hidup masih berada pada angka 45,6. Angka ini meningkat menjadi 54,0 pada tahun 1980 (SP 1980); 60,2 tahun pada tahun 1990 (SP 1990); dan 65,1 pada tahun 1995 (SUPAS). Hasil Susenas 1998 menunjukkan bahwa angka harapan hidup di Propinsi Lampung adalah 65,32.

Pengembangan sumberdaya manusia memerlukan strategi dan perencanaan matang serta implementasi program yang dilakukan secara sistematis, terarah dan profesional. Hal ini disebabkan karena permasalahan sumberdaya manusia merupakan permasalahan yang kompleks. Menurut Sofian Effendi (1991), secara konseptual sumberdaya manusia dapat dipandang terdiri atas 3 dimensi yakni: dimensi penentuan, pengembangan, dan pemanfaatan. Dimensi penyediaan sumberdaya manusia mencakup variabel-variabel jumlah dan struktur penduduk dan mobilitas serta partisipasi angkatan kerja. Dimensi pengembangan sumberdaya manusia terdiri atas dua variabel yakni kualitas sumberdaya yang menentukan produktivitasnya. Dimensi ketiga adalah ukuran dan struktur pekerjaan.



Implementasi kebijakan bagi ketiga dimensi pengembangan sumberdaya manusia tersebut idealnya berlangsung secara sinergis dan simultan, serta selalu memperhatikan berbagai segi perubahan sosial yang selama ini dianggap sebagai variabel yang bersifat *given*. Sebagai contoh, kebijakan yang dilakukan untuk mempengaruhi jumlah dan struktur penduduk antara lain adalah Keluarga Berencana yang disertai upaya-upaya untuk menekan angka kematian bayi, perbaikan gizi masyarakat dan sebagainya. Sistem target yang digunakan sebagai indikator keberhasilan pelaksanaan Keluarga Berencana sering menjadi sasaran kritik karena dianggap hal itu melupakan aspek kualitas pelayanan dan bahkan telah melanggar hak reproduksi perempuan sebagai bagian hak asasi manusia. Krisis ekonomi yang berkepanjangan secara langsung akan berdampak pada kemampuan masyarakat dalam ber KB secara mandiri, selain kemampuan pemerintah dalam menyediakan alat kontrasepsi. Hal ini merupakan sisi lain yang menjadi kendala dalam pelaksanaan Keluarga Berencana.

Pembangunan sumberdaya manusia merupakan suatu proses untuk meningkatkan kualitas maupun memperbesar kemungkinan pilihan hidup lebih sehat, berumur panjang, berpendidikan tinggi, dan dapat menikmati kehidupan yang layak (Tukiran, 1992). Untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia ini terdapat banyak instrumen kebijakan dan keberhasilannya dapat dilihat dari berbagai indikator. Angka harapan hidup, tingkat melek huruf, derajat kesehatan masyarakat merupakan beberapa indikator dimaksud. Permasalahan yang masih sering dijumpai adalah selain rendah juga terjadi ketimpangan antar wilayah (kota - desa) maupun antar kelompok (pria - wanita) dari berbagai indikator kualitas sumberdaya manusia tersebut. Hal ini mengisyaratkan terjadinya diskrepansi pelayanan publik antar wilayah maupun antar kelompok masyarakat.

Permasalahan kependudukan memiliki akar atau keterkaitan antar variabel yang relatif kompleks. Sebagai contoh, penurunan fertilitas akan sangat dipengaruhi oleh persepsi masyarakat yang menginginkan jumlah anak sedikit dengan mutu tinggi, dan tersedia alat pengatur kelahiran yang murah dan berdaya guna (Mantra, 1991). Sementara itu faktor yang berperan dalam menurunkan angka kematian bayi adalah faktor ibu (umur, jumlah anak yang dilahirkan), kontaminasi lingkungan, kekurangan nutrisi, kecelakaan (*injury*), dan pemeriksaan kesehatan. Semua faktor sosial ekonomi hanya dapat dipahami mempengaruhi kelangsungan hidup anak melalui satu atau

lebih variabel langsung tersebut. Faktor sosial ekonomi dapat beragam mulai dari level individual (produktivitas individual, tradisi/norma/perilaku). Level rumah tangga (pendapatan/kekayaan), maupun komunitas (setting ekologis, ekonomi politik, sistem kesehatan nasional) (Tjiptoheryanto & Sumitro, 1998).

Upaya mengidentifikasi faktor penyebab juga dapat dilakukan melalui model statistik walaupun perlu diingatkan bahwa pemanfaatan model statistik memerlukan pemahaman yang memadai mengenai statistik. Melalui model statistik dapat diidentifikasi daya ungkit relatif suatu variabel. Sebagai ilustrasi, perhatikan model regresi linear sederhana berikut ini:

$$\text{Log (AHH)} = 3,14 + 0,13 \log \text{PDB}/n + 0,03 \text{PS} - 0,3 \text{SPT}$$

$$(3,95) \quad (11,1) \quad (0,1) \quad (-0,7)$$

$$(\text{Adjusted } R^2=0,77; n=66)$$

Model di atas menggambarkan hubungan antara angka harapan hidup (sebagai variabel tak bebas, data tahun 1992) dengan PDB per kapita (1980), rata-rata pengeluaran untuk bidang sosial (% PDB yang diinvestasikan di bidang pendidikan, dan kesehatan), dan sumbangan kelompok 20% penduduk termiskin (rata-rata tahun 1970-1992) (Dikutip dari Human Resources Development, 1996,113). Model ini didasarkan pada data dari 66 negara dan berhasil menjelaskan 77% variasi dari variabel tak bebas.

#### 4.1. Indikator Kesehatan Balita

Angka harapan hidup di Propinsi Lampung terus mengalami peningkatan, sementara itu angka kematian bayi mengalami penurunan. Kedua indikator tersebut secara umum menunjukkan angka yang lebih baik dibandingkan angka nasional. Peningkatan kesadaran masyarakat dalam membentuk pola hidup sehat memberikan kontribusi bagi peningkatan angka harapan hidup. Selain itu peningkatan taraf kesejahteraan masyarakat juga mempunyai sumbangan yang sama. Hal ini disebabkan masyarakat mempunyai pilihan yang lebih baik untuk memperoleh perawatan kesehatan yang lebih baik sehingga dapat memperpanjang usia.

Tabel 17

Perkembangan Angka Kematian Bayi dan Angka Harapan Hidup  
Propinsi Lampung, Tahun 1997-2001

Indikator Kesehatan	1997	1999	2000	2001
Angka Kematian Bayi	50	46	49	41
Angka Harapan Hidup	65	66	67	69

Sumber: BPS Propinsi Lampung, 2002. Indikator Kesejahteraan Rakyat, 2001.

Angka kematian bayi di Propinsi Lampung pada khususnya dan di Indonesia umumnya, meskipun mengalami kecenderungan menurun, akan tetapi secara relatif masih lebih tinggi dibanding negara-negara ASEAN. Berdasarkan laporan pemantauan gizi dari Dinas Kesehatan Propinsi Lampung, tahun 2002, penyebab utama kematian bayi adalah pneumonia, diare, dan lain-lain. Kasus kematian bayi terbesar terdapat di Kabupaten Lampung Utara dan terkecil terdapat di Kabupaten Way Kanan. Sementara itu angka kematian bayi baru lahir (AKBBL) di Propinsi Lampung sampai tahun 2002 belum ada angka yang signifikan, namun masih berupa jumlah kasus kematian. Pada tahun 2001 tercatat kasus kematian bayi baru lahir berjumlah 463 kasus, dengan penyebab utamanya adalah: BBLR=148 kasus, Asfiksia=126 kasus, TN=10 kasus, Pneumonia= 5 kasus, lain-lain=174 kasus. Kasus terbesar terdapat di Lampung Tengah yaitu 72 kasus, dan terkecil di kabupaten Way Kanan dengan 24 kasus.

Hal ini merupakan tantangan berat di masa depan, oleh karena indikator ini merupakan indikator kunci peningkatan indek pengembangan sumberdaya manusia. Angka kematian bayi merupakan pencerminan berbagai macam kondisi sosial ekonomi masyarakat. Indikator ini sangat dipengaruhi oleh fasilitas kesehatan yang sangat berkaitan dengan proses persalinan, pola pengasuhan anak yang berkaitan dengan pemberian ASI dan makanan tambahan, serta pemberian imunisasi. Selain itu, mitos-mitos yang berkembang di masyarakat merupakan variabel lain yang juga mempunyai kontribusi bagi tingginya angka kematian bayi. Mitos tersebut misalnya adalah pentabuan pemberian kolustrum dan jenis makanan tertentu yang sebenarnya sangat baik untuk kesehatan dan daya tahan tubuh bayi.

Tabel 18  
Indikator Kesehatan Balita Propinsi Lampung, Tahun 1998-2001

Indikator	1998	1999	2000	2001
Lama Mendapatkan ASI (Rata-rata /bulan)	15,58	21,10	19,88	18,51
Tanpa Makanan Tambahan	3,98	4,15	4,56	4,81
Dengan Makanan Tambahan	11,60	16,95	15,32	13,70

Sumber: BPS Propinsi Lampung, 2002. Indikator Kesejahteraan Rakyat, 2001.

Masalah pemberian ASI dapat dikatakan merupakan hal yang sangat strategis dalam pembangunan sumber daya manusia. Penelitian baru mengungkapkan bahwa anak sekolah yang ketika bayi mendapatkan ASI dapat mengikuti pelajaran lebih baik dan nilai tes matematika standar dan membacanya lebih tinggi dibandingkan mereka yang tidak mendapatkan ASI (BPS, 2000). Lama pemberian ASI di Propinsi Lampung menunjukkan kecenderungan yang fluktuatif, dan secara keseluruhan masih lebih rendah dari standar ideal pemberian ASI yakni 24 bulan. Kondisi ini kemungkinan disebabkan semakin banyak ibu yang bekerja sebagai wanita karir sehingga tidak memiliki kesempatan untuk memberikan ASI kepada bayinya.

Kebiasaan pemberian ASI ini nampaknya terdapat pola yang berbeda antara daerah perdesaan dengan daerah perkotaan. Dalam indikator Kesejahteraan anak Tahun 1999, disebutkan bahwa ibu-ibu yang tinggal di daerah perdesaan relatif lebih lama memberikan ASI pada bayinya dibandingkan dengan ibu-ibu yang tinggal di daerah perkotaan. Namun demikian, para ibu yang berdomisili di daerah perkotaan rata-rata lebih lama memberikan ASI eksklusif pada bayinya dibandingkan dengan para ibu yang berdomisili di daerah perdesaan (BPS, 2000).

Variabel lain yang mempengaruhi angka kematian bayi adalah persentase penolong kelahiran (persalinan) oleh tenaga medis. Di Propinsi Lampung, persentase penolong kelahiran oleh tenaga medis masih relatif rendah. Kondisi dari tahun 1998 hingga tahun 2001, menunjukkan bahwa hampir separoh proses persalinan di Propinsi Lampung masih ditangani (ditolong) oleh tenaga tidak terdidik. Hal ini mengisyaratkan rendahnya aksesibilitas masyarakat terhadap fasilitas kesehatan terutama di daerah perdesaan. Meskipun program pemerintah yang ditujukan bagi peningkatan kesehatan bayi (balita) cukup banyak diantaranya penyediaan polindes dan bidan

desa, namun nampaknya program tersebut belum dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat. Hal ini kemungkinan disebabkan antara lain rendahnya tingkat kehadiran (keberadaan) bidan desa di tempat bertugas, oleh karena kenyataan menunjukkan bahwa sebagian bidan desa tersebut berdomisili di daerah perkotaan.

Tabel 19

Persentase Kelahiran Bayi Menurut Penolong Kelahiran Propinsi Lampung, Tahun 1998-2001

Penolong	1998	1999	2000	2001
Dokter	4,4	3,6	2,8	13,5
Bidan	43,1	52,7	50,6	51,0
Tenaga Medis Lain	1,8	2,3	1,1	0,6
Dukun dan lainnya	50,7	41,4	45,5	44,9

Sumber: BPS Propinsi Lampung, 2002. Indikator Kesejahteraan Rakyat, 2001.

Proses persalinan yang ditolong oleh dukun bayi atau tenaga lain yang tidak terdidik pada umumnya sangat berkaitan dengan insidensi tetanus neonatal yang merupakan salahsatu penyebab utama kematian bayi. Menurut Ross (dalam Singarimbun, 1988) terdapat beberapa penelitian tentang insidensi tetanus neonatal dalam program di mana dukun-dukun bayi telah dilatih sebagai bagian dari program kesehatan yang lebih komprehensif (termasuk imunisasi toksoid). Hasil-hasil penelitian tersebut menunjukkan adanya penurun-an yang berarti mortalitas bayi akibat tetanus neonatal. Hal tersebut dapat dipandang sebagai dampak dari program pelatihan terhadap dukun-dukun bayi yang biasanya melakukan pertolongan persalinan.

#### 4.2. Imunisasi

Keadaan kesehatan dan daya tahan tubuh terhadap serangan penyakit merupakan salah satu modal utama untuk mencapai kesehatan yang baik. Program imunisasi telah digalakkan oleh pemerintah terutama selama Pelita IV yang dilakukan bersama-sama dengan masyarakat. Sedemikian pentingnya program imunisasi tersebut, hingga berbagai upaya telah dilaksanakan pemerintah, seperti halnya PIN (Pekan Imunisasi Nasional) yang telah sukses selama tiga tahun berturut-turut, kemudian menyusul dengan digalakkannya BIAS (Bulan Imunisasi Anak Sekolah). Program BIAS ini telah diakui oleh WHO sebagai kegiatan inovatif yang efektif dan efisien,

sehingga dianjurkan untuk dilaksanakan di negara-negara WHO Asia Tenggara tahun 1999 (BPS, 2000).

Data berikut ini merupakan cakupan imunisasi di Propinsi Lampung pada tahun 2002. Data tersebut menunjukkan bahwa Kota Metro merupakan daerah yang paling baik dalam hal cakupan imunisasi. Cakupan imunisasi untuk berbagai jenis imunisasi di kota ini telah mencapai angka di atas 100%. Sementara itu di daerah lain, belum semua bayi mendapatkan imunisasi secara lengkap.

Tabel 20

Cakupan (%) Imunisasi Bayi Propinsi Lampung Menurut Jenis Imunisasi dan Kabupaten/Kota Tahun 2002

Kab/Kota	Sasaran	Jenis Imunisasi				
		BCG	DPT-1-3	Polio1-4	Campak	Hep. B 1-3
L. Selatan	27.459	99,9	96,53	95,40	96,2	90,16
B. Lampung	17.478	100,1	99,93	98,20	97,6	55,36
L. Tengah	27.015	98,5	98,10	94,75	94,0	60,50
L. Utara	13.103	94,1	95,03	94,55	94,8	78,75
L. Barat	9.227	93,2	94,20	88,72	85,2	86,53
T. Bawang	17.982	88,9	87,13	83,53	90,2	72,03
Tanggamus	18.046	91,9	97,93	92,77	89,8	33,76
Metro	2.831	100,1	104,66	103,27	110,6	106,4
L. Timur	24.616	94,9	94,66	91,20	90,5	40,86
W. Kanan	10.410	97,9	97,23	96,27	95,5	91,13
Jumlah	168.167	96,0	95,93	93,15	93,3	65,83

Sumber: Dinas Kesehatan Propinsi Lampung, 2003 (diolah kembali).

Kekurangan kalori protein (KKP) bersama-sama dengan penyakit infeksi seperti diare dan infeksi saluran pernafasan bagian atas (ISPA) merupakan gabungan penyebab tingginya AKB di Indonesia. Dalam rangka menurunkan AKB tersebut, Indonesia telah mengadopsi teknik GOBI FF (G=Growth monitoring, O=Oral electrolyte rehydration, B=Breastfeeding, I=Immunization, F=Food supplements, dan F=Family Spacing). Sejak tahun 1975, Usaha Perbaikan Gizi Keluarga (UPGK) telah dikembangkan di pedesaan seluruh Indonesia sebagai wadah untuk melaksanakan G, O, dan B. Program ini dikembangkan menjadi Posyandu untuk dapat memasukkan unsur I, ditambah keluarga berencana (KB) dan pelayanan kesehatan Ibu dan anak (KIA) (Muis, 1988).

Penyakit diare di Propinsi Lampung merupakan penyakit yang paling banyak diderita oleh penduduk. Apabila dilihat dari jumlah penderita baru rawat jalan di puskesmas dan rumahsakit, terlihat bahwa jumlah penderita diare di seluruh propinsi mencapai 100.574 orang (46,40%) dari seluruh penderita rawat jalan. Urutan ke dua adalah penyakit malaria klinis (49.308=22,75%) dan kemudian diikuti oleh penyakit disentri dengan 25.581 penderita (11,80%) (BPS, 2002, Lampung dalam Angka 2001). Data tersebut menunjukkan rendahnya kualitas lingkungan hidup masyarakat yang berkaitan dengan sanitasi dan akses terhadap air bersih. Berdasarkan data Susenas 2000, rumah tangga di pedesaan yang memiliki fasilitas air bersih yang bersumber dari sumur dan mata air terlindung mencapai 48,1%, atau lebih tinggi dibandingkan daerah perkotaan (42,8%). Sementara rumah tangga di pedesaan yang memiliki fasilitas air bersih yang bersumber dari sumur dan mata air tak terlindung mencapai 47,5% atau lebih besar dibandingkan daerah perkotaan (28,6%) (BPS, 2001. Profil Kependudukan Propinsi Lampung, 2001).

Tabel 21  
Fasilitas Kesehatan Masyarakat Propinsi Lampung Menurut  
Kabupaten/Kota, Tahun 2001

Kabupaten/Kota	Puskesmas	Pustu	Pus. Ling	Pus. Rawat Inap	Pos Yandu	Rasio Balita-Posyandu *)
Lampung Barat	17	57	18	9	328	1:123
Tanggamus	25	74	16	3	839	1: 99
Lampung Selatan	30	102	23	1	1203	1: 99
Lampung Timur	26	89	20	1	1187	1: 74
Lampung Tengah	30	95	20	2	1325	1: 79
Lampung Utara	17	73	17	1	529	1:108
Way Kanan	11	61	10	1	382	1:101
Tulang Bawang	24	73	14	3	421	1:185
Bandar Lampung	22	55	25	2	555	1:134
Metro	5	6	-	-	141	1: 79
Jumlah	207	685	163	23	6.910	

Sumber: BPS Propinsi Lampung, 2002. Lampung dalam Angka 2001(diolah kembali)  
Keterangan: \*) Dihitung berdasarkan Data Proyeksi Penduduk Lampung 2001.

Jumlah Posyandu sebesar 6.910 tersebut ternyata mengalami penurunan dari tahun sebelumnya 6.998 buah. Penyebab terjadinya penurunan tersebut tidak dapat diketahui, namun yang pasti penurunan tersebut mengakibatkan kualitas pelayanan kesehatan balita menjadi menurun pula. Jika dilihat dari rasio posyandu-balita seperti yang tercantum dalam tabel di atas, menunjukkan bahwa kualitas pelayanan tersebut masih sangat memprihatinkan. Pelayanan konsultasi terutama terhadap balita yang memerlukan perhatian khusus (misalnya berat badan yang tidak naik dalam tiga kali penimbangan secara berturut-turut atau berat badan balita yang berada di bawah garis merah dalam KMS) tidak akan cukup memadai oleh karena jumlah balita yang harus dilayani cukup banyak. Demikian pula halnya dengan balita yang memerlukan rujukan untuk mendapatkan perawatan yang lebih intensif di puskesmas atau rumah sakit.

#### 4.3. Status Gizi Balita

Identik dengan permasalahan pada tingkat nasional maka ada 4 (empat) masalah gizi utama di Propinsi Lampung, yaitu Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY), dan Kurang Vitamin A (KVA). Hasil Pemantauan Status Gizi (PSG) yang dikumpulkan sejak tahun 1995 sampai 1998, menunjukkan bahwa telah terjadi penurunan prevalensi KEP nyata (gizi buruk) dari 6,4% menjadi 3,8%, tetapi akibat krisis ekonomi ternyata prevalensi KEP nyata ini meningkat kembali menjadi 3,9% pada tahun 1999 kemudian menjadi 5,1% pada tahun 2001. Untuk anemia gizi besi, prevalensinya pada ibu hamil diketahui mencapai 73,7% (Survai Cepat Anemia, 1997). Angka prevalensi tersebut jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan angka nasional yang hanya mencapai 50,9% (SKRT 1997). Sedangkan pada balita, anemia gizi besi mencapai 55,7% dan pada wanita usia subur (WUS) 60,4%.

Pada masalah Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY), berdasarkan hasil survai GAKY tahun 1998 dapat diketahui bahwa Propinsi Lampung sudah termasuk kategori daerah endemis GAKY dengan tingkatan ringan karena angka kesakitannya (*Total Goiter Rate*) hanya 11,9%. Namun demikian, ternyata masih ada 7 (tujuh) kecamatan yang termasuk dalam kategori daerah endemis berat ( $TGR > 30\%$ ) dan 16 kecamatan yang lain termasuk dalam kategori daerah endemis tingkat sedang ( $TGR=20-30\%$ ).



Secara spesifik sampai saat ini di Propinsi Lampung tidak tersedia angka kesakitan akibat kekurangan vitamin A (KVA), tetapi secara nasional telah diketahui bahwa berdasarkan indikator klinis (Xerophthalmia) maka kekurangan vitamin A bukan lagi menjadi masalah kesehatan masyarakat di Indonesia karena prevalensinya hanya 0,33% (Survei Vitamin A, 1992) yang berarti sudah lebih rendah dari batasan WHO sebesar 0,5%. Kejadian kekurangan Vitamin A mungkin akan tetap menjadi perhatian karena > 50% dari seluruh balita di Indonesia ternyata kandungan vitamin A dalam darahnya < 20ug (Sumber: Laporan PSG Propinsi Lampung, Tahun 2002. Dinas Kesehatan Propinsi Lampung, 2002).

Selanjutnya berdasarkan hasil Pemantauan Status Gizi (PSG) Balita yang dilakukan pada 50.691 sampel yang diukur melalui indikator Berat Badan menurut Umur (BB/U), ditemukan bahwa terdapat sekitar 723 orang anak yang menderita gizi buruk dan 6.211 anak gizi kurang, sehingga total jumlah anak balita yang menderita Kekurangan Energi Protein (KEP) adalah sebanyak 6.934 orang. Selanjutnya gambaran status gizi balita di Propinsi Lampung berdasarkan Pemantauan Status Gizi pada tahun 2002 dapat dilihat dalam tabel lampiran (L.6 dan L.7).

#### **4.4. Anak Penyandang Cacat**

Anak yang cacat fisik dan mental berhak untuk menikmati kehidupan penuh dan layak, dalam keadaan-keadaan yang menjamin martabat, meningkatkan percaya diri dan mempermudah peran aktif anak dalam masyarakat. Negara juga mengakui kebutuhan-kebutuhan khusus anak cacat, bantuan yang diberikan untuk pemeliharaan khusus sesuai dengan sumber yang tersedia yang akan diberikan secara cuma-cuma, atau bila mungkin dengan memperhatikan sumber-sumber keuangan orang tua atau orang lain yang memelihara anak yang bersangkutan.

Bantuan yang diberikan akan dirancang sedemikian rupa untuk menjamin bahwa anak cacat bisa memperoleh dan menerima pendidikan, pelatihan, pelayanan kesehatan, pelayanan pemulihan, persiapan untuk lapangan pekerjaan dan kesempatan untuk rekreasi dengan cara membantu anak untuk mencapai integrasi sosial sepełuh mungkin dan pengembangan individu termasuk pengembangan budaya dan rohaninya. Negara juga menjamin untuk meningkatkan kerjasama internasional, pertukaran

informasi yang layak dalam bidang pelayanan kesehatan, pencegahan dan perawatan medis, psikologis, dan fungsional anak-anak cacat termasuk penyebarluasan dan akses pada informasi-informasi mengenai metoda-metoda pemulihan, pendidikan, dan pelayanan-pelayanan kejuruan untuk meningkatkan kemampuan dan ketrampilan mereka.

Jumlah anak penderita cacat di Propinsi Lampung mencapai kurang lebih 4.000 anak. Jenis kecacatan yang paling banyak dijumpai adalah cacat mental. Secara lebih terperinci gambaran anak penderita cacat di Propinsi Lampung terlihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 22

Jumlah Anak Penyandang Cacat Propinsi Lampung Menurut Jenis Kecacatan, Jenis Kelamin, dan Kabupaten/Kota, Tahun 2001

Kabupaten/Kota	Jenis Kecacatan/Jenis Kelamin							
	Cacat Netra		Cacat Tubuh		Cacat Mental		Cacat Ganda	
	L	P	L	P	L	P	L	P
Lampung Selatan	48	39	98	117	201	134	38	29
Lampung Tengah	51	41	101	82	115	109	17	23
Lampung Utara	34	32	63	71	135	167	11	19
Lampung Barat	29	22	109	89	92	101	8	9
Tanggamus	19	21	78	71	95	81	12	16
Tulang Bawang	17	23	91	83	72	79	11	8
Lampung Timur	14	16	78	72	91	109	13	19
Way Kanan	41	39	115	91	121	78	7	5
Bandar Lampung	32	38	77	81	101	119	21	19
Metro	19	21	32	38	27	31	3	4
<b>Jumlah</b>	<b>304</b>	<b>292</b>	<b>842</b>	<b>795</b>	<b>1.050</b>	<b>1.008</b>	<b>141</b>	<b>151</b>

Sumber: Dinas Kesejahteraan Sosial Propinsi Lampung, 2001.

Dalam kenyataannya tidak semua anak cacat dapat menikmati kehidupan yang penuh dan layak, sesuai dengan kondisi yang dikehendaki dalam Konvensi Hak Anak tersebut di atas. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan anak cacat tidak dapat menikmati kehidupan yang penuh dan layak. Respon orangtua (keluarga) dan masyarakat yang cenderung negatif terhadap eksistensi anak cacat merupakan salah satu faktor yang dimaksud. Sebagian orang tua (keluarga) yang memiliki anak cacat masih mempunyai

anggapan bahwa anak cacat merupakan aib keluarga, sehingga kemudian anak tersebut diisolasi dari pergaulan sosial secara wajar. Sementara itu masyarakat pada umumnya menganggap bahwa anak cacat merupakan sosok individu yang "tidak berguna", sehingga kehadirannya tidak perlu diperhatikan dan dikembangkan potensinya.

Solusi alternatif mengirimkan anak cacat ke Sekolah Luar Biasa (SLB) tidak dapat dilakukan oleh semua keluarga, oleh karena hal tersebut membutuhkan biaya. Pada umumnya hanya keluarga yang mempunyai kemampuan ekonomi cukup baik, yang dapat menyekolahkan anaknya ke SLB. Jumlah anak cacat yang bersekolah di SLB/SDLB kurang lebih hanya 10% dari jumlah anak cacat secara keseluruhan. Adapun data tentang jumlah anak cacat yang bersekolah di SLB dapat dilihat dalam Tabel L.8 pada lampiran. Berdasarkan tabel 24 di atas, jumlah anak yang mengalami cacat mental merupakan yang terbesar diantara jenis kecacatan yang lain. Hal ini memiliki implikasi bahwa di masa mendatang diperlukan prasarana dan sarana (termasuk pendamping, pekerja sosial, psikolog/psikiatri) yang cukup memadai untuk menangani anak cacat mental tersebut.

## **BAB V**

# **PENDIDIKAN, KEGIATAN BUDAYA DAN WAKTU LUANG**

Pendidikan mempunyai peranan penting dan sudah menjadi kebutuhan pokok bagi anak-anak. Hal ini karena pendidikan dapat berperan untuk meningkatkan kesejahteraan anak-anak, sehingga pendidikan dapat digunakan sebagai salah satu indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan anak. Oleh karena itu pembangunan di bidang pendidikan memerlukan peran serta aktif tidak saja dari pemerintah, tetapi juga dari masyarakat dan seluruh keluarga. Adanya kepedulian yang tinggi dari ketiganya harus berlangsung secara terus menerus dan dilaksanakan secara kongkrit dan terpadu (BPS, 2000).

Pendidikan yang ditamatkan merupakan indikator pokok kualitas pendidikan formal. Tingginya tingkat pendidikan yang dapat dicapai oleh rata-rata penduduk suatu daerah mencerminkan tinggi-rendahnya potensi sumberdaya manusia. Untuk Propinsi Lampung, persentase penduduk yang berhasil menamatkan pendidikan sampai jenjang pendidikan menengah (SMU/SMA) ke atas masih kurang dari 20 persen. Hal ini menandakan bahwa secara umum tingkat pendidikan penduduk di Propinsi Lampung masih relatif rendah. Selain itu persentase penduduk usia 16-18 tahun yang tidak bersekolah lagi di Propinsi Lampung mencapai kurang lebih 50% (lihat tabel L.4. Lampiran). Hal ini berarti Propinsi Lampung telah kehilangan potensi sumberdaya manusia dalam jumlah yang cukup besar. Kemiskinan dan terbatasnya prasarana pendidikan terutama di daerah terpencil merupakan faktor yang mempunyai kontribusi besar terhadap masalah tersebut.

### **5.1. Angka Partisipasi Kasar**

Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan indikator untuk mengukur proporsi anak sekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu dalam kelompok umur yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. Angka ini memberikan gambaran secara umum tentang banyaknya anak yang menerima pendidikan pada jenjang pendidikan tertentu. Semakin tinggi jenjang pendidikan pada umumnya Angka Partisipasi Kasarnya menjadi semakin rendah. Hal ini disebabkan semakin tinggi pendidikan pada umumnya diikuti

dengan semakin tinggi pula biaya pendidikan, sehingga semakin banyak keluarga yang tidak mampu mengirimkan anaknya ke sekolah tersebut.

Tabel 23  
Perkembangan Angka Partisipasi Kasar Tingkat SD/MI + Paket A di  
Propinsi Lampung, Tahun 1996-2001

No.	Tahun	Tingkat			
		APK SD + MI	APK SD + MI + Paket A	APM SD + MI	APM SD + MI + Paket A
1	1996	110,26	112,37	94,08	94,81
2	1997	107,21	107,62	92,93	93,28
3	1998	108,08	108,35	94,52	94,70
4	1999	105,11	105,20	90,86	90,89
5	2000	105,93	106,39	91,61	91,61
6	2001	106,94	106,59	92,33	92,33

Sumber: Dinas Pendidikan Propinsi Lampung, 2001

Tabel di atas menunjukkan bahwa APK pada jenjang pendidikan SD/MI melebihi angka 100%. Angka ini menunjukkan bahwa murid SD yang menerima pendidikan lebih banyak dari jumlah penduduk yang berumur 7-12 tahun. Hal ini disebabkan karena ada sebagian anak yang berumur kurang dari 7 tahun akan tetapi sudah memasuki sekolah dasar. Selain itu juga terdapat sejumlah penduduk berusia lebih dari 12 tahun yang mengikuti pendidikan Paket A.

## 5.2. Angka Partisipasi Murni

Sementara itu, Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur proporsi anak sekolah pada suatu kelompok umur tertentu yang bersekolah pada tingkat yang sesuai dengan kelompok umurnya. APM merupakan indikator yang menunjukkan proporsi penduduk yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan dan berusia sesuai dengan usia sekolah jenjang pendidikannya. Tabel 24 menunjukkan bahwa APM tingkat SLTP mengalami penurunan pada tahun 1998 dan 1999 dibandingkan tahun 1996 dan 1997, dan kemudian meningkat lagi pada tahun 2000 dan 2001. Krisis ekonomi yang mengalami puncaknya pada tahun 1998 dan 1999 nampaknya telah memaksa sebagian penduduk tidak lagi dapat

menikmati pendidikan. Melalui program wajib belajar (wajib) 9 tahun yang mulai dicanangkan pada tahun 1994, pemerintah membebaskan SPP untuk tingkat SD dan SMP. Meskipun demikian hal itu nampaknya belum dapat menjamin seluruh penduduk usia 7-15 dapat menikmati pendidikan. Di Propinsi Lampung, masih terdapat sekitar 40% penduduk usia 13-15 tahun yang tidak dapat menikmati pendidikan setingkat SMP. Hal ini merupakan pekerjaan berat yang mendesak untuk segera ditangani.

**Tabel 24**  
**Perkembangan Angka Partisipasi Kasar Tingkat SLTP/MTs + Paket B**  
**di Propinsi Lampung, Tahun 1996-2001**

No.	Tahun	Tingkat			
		APK SLTP + MTs	APK SLTP + MTs + Paket A	APM SLTP + MTs	APM SLTP + MTs + Paket A
1	1996	69,16	72,03	56,00	57,99
2	1997	73,52	75,84	58,76	60,66
3	1998	72,90	75,50	57,80	59,25
4	1999	71,41	72,87	50,47	51,23
5	2000	75,84	77,39	56,23	57,03
6	2001	80,27	81,91	61,98	62,82

Sumber: Dinas Pendidikan Propinsi Lampung, 2001

### 5.3. Angka Partisipasi Sekolah

Salahsatu indikator untuk mengukur keberhasilan pembangunan di bidang pendidikan adalah Angka Partisipasi Sekolah (APS). Angka partisipasi sekolah merupakan persentase penduduk dalam kelompok usia sekolah tertentu dan masih sekolah terhadap seluruh penduduk pada kelompok umur tersebut. Secara umum dapat digambarkan bahwa angka partisipasi sekolah turun seiring dengan meningkatnya umur. Hal ini dapat disebabkan adanya kecenderungan anak-anak yang berhasil menamatkan sekolah pada jenjang pendidikan tertentu dan tidak melanjutkan lagi ke jenjang pendidikan berikutnya. Tabel 25 berikut ini menunjukkan adanya perbedaan dalam hal APS pada semua kelompok usia sekolah, antardaerah khususnya antara Bandar Lampung dengan daerah lain. Hal ini diduga karena Bandar Lampung memiliki prasarana pendidikan yang lebih baik dibandingkan dengan daerah lain di Propinsi Lampung.

Tabel 25  
 Angka Partisipasi Sekolah (APS) menurut Kabupaten/Kota dan  
 Kelompok Umur di Propinsi Lampung Tahun 2000

Kabupaten/Kota	Kelompok Umur (Tahun)				
	7-12	13-15	16-18	19-24	7-15
Lampung Selatan <sup>1)</sup>	93,96	75,15	40,80	5,82	87,51
Lampung Tengah <sup>2)</sup>	96,13	84,14	46,68	5,79	91,91
Lampung Utara <sup>3)</sup>	96,20	81,35	42,54	5,77	91,43
Lampung Barat	96,04	84,27	48,72	4,79	92,68
Bandar Lampung	97,10	91,96	71,90	27,89	95,15
Propinsi	95,54	81,46	47,09	8,87	90,76

Sumber: BPS, Profil Kependudukan Propinsi Lampung Tahun 2000.

Keterangan:

- 1) termasuk kabupaten Tanggamus
- 2) termasuk Kabupaten Lampung Timur dan Kota Metro
- 3) termasuk kabupaten Way Kanan dan Tulang Bawang

#### 5.4. Angka Putus Sekolah

Angka Putus Sekolah (APTS) merupakan indikator yang menunjukkan tingkat kegagalan anak usia sekolah dalam menyelesaikan pendidikan pada jenjang pendidikannya. Namun demikian indikator ini tidak dapat menjelaskan penyebab dari gejala putus sekolah tersebut. Hal yang menarik dari tabel 29, adalah angka putus sekolah pada kelompok usia 16-18 tahun di Bandar Lampung yang jauh melebihi daerah (kabupaten) lain. Kondisi seperti ini nampaknya menjadi fenomena nasional terutama pada kurun waktu 1997-1999. Pada penduduk yang tinggal di perkotaan, angka putus sekolah selama kurun waktu 1997-1999, cenderung mengalami kenaikan, sebaliknya angka putus sekolah penduduk yang tinggal di perdesaan cenderung turun, meskipun angka ini masih dianggap tinggi bila dibandingkan dengan angka putus sekolah di perkotaan (BPS, 2000).

Semenjak krisis ekonomi yang terjadi pada pertengahan tahun 1997, pemerintah mengeluarkan program Jaring Pengaman Sosial (JPS). Dalam bidang pendidikan dana JPS ini dialokasikan untuk beasiswa dan DBO (Dana Bantuan Operasional) untuk sekolah. Program ini dimaksudkan antara lain agar tidak terjadi peningkatan angka putus sekolah sebagai dampak krisis

ekonomi tersebut. Hasil penelitian yang dilakukan oleh CIMU (*Central Independent Monitoring Unit*), sebuah lembaga independen yang bertugas mengawasi pelaksanaan program beasiswa dan DBO, menunjukkan bahwa meskipun krisis ekonomi yang mulai terjadi pada 1997 secara substansial tidak berpengaruh pada angka penurunan pendaftaran bersekolah maupun angka meningkatnya *drop-out*, tetapi dari riset menunjukkan bahwa masih ada ancaman-ancaman ke arah itu. Penelitian tersebut merupakan kajian dampak program Beasiswa dan DBO didasarkan pada temuan-temuan studi dampak yang dilakukan oleh CIMU sebelumnya tahun 2000 dan juga didasarkan pada sumber data sekunder (<http://www.cimu.or.id/>), diakses tanggal 18 Juli 2003.

Tabel 26

Jumlah Penerima Bea Siswa JPS, Bantuan Khusus Murid (BKM), dan Bea Siswa Bakat dan Motivasi, Propinsi Lampung Menurut Tingkat Pendidikan dan Kabupaten/Kota, Tahun 2002

Kabupaten/Kota	Beasiswa JPS			BKM			Bakat & Motivasi *)
	Tingkat Pendidikan						
	SD/MI	SLTP	SLTA	SD/MI	SLTP	SLTA	
Lampung Selatan	2.242	1.653	294	15.450	6.584	1.740	245
Lampung Utara	4.407	4.043	910	22.977	9.651	3.402	281
Lampung Barat	649	272	291	15.541	6.203	776	238
Lampung Timur	2.826	3.277	494	11.718	6.452	2.530	238
Lampung Tengah	4.137	4.673	538	11.718	6.453	2.530	360
Tanggamus	1.574	1.574	343	5.064	2.312	804	259
Tulang Bawang	2.595	3.230	418	4.562	1.660	353	216
Way Kanan	2.652	1.742	341	2.645	1.377	170	224
Bandar Lampung	1.146	1.723	775	3.427	2.300	1.509	180
Metro	269	448	273	5.861	1.500	562	130
<b>Jumlah</b>	<b>22.497</b>	<b>22.635</b>	<b>4.677</b>	<b>98.963</b>	<b>44.492</b>	<b>14.376</b>	<b>2.371</b>

Sumber: KPRK Bandar Lampung, Metro, dan Kota Bumi, 2003.

\*) Radar Lampung, 2 Maret 2002.

Tabel di atas menunjukkan bahwa jenis beasiswa yang diberikan kepada siswa sudah cukup bervariasi. Bea Siswa JPS dan Bantuan Khusus Murid diberikan untuk siswa SD/MI, SLTP, maupun SLTA sedangkan beasiswa bakat dan motivasi saat ini hanya diberikan untuk siswa SLTP. Beasiswa



bakat dan motivasi ini diberikan kepada siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu akan tetapi mempunyai kemampuan akademik yang baik. Adapun mengenai mekanisme pengusulan untuk setiap jenis beasiswa tersebut pada tahap pertama, dilakukan oleh komite sekolah yang sudah terbentuk pada masing-masing sekolah.

Tabel 27  
**Angka Putus Sekolah (APTS) Menurut Kabupaten/Kota dan Kelompok Umur di Propinsi Lampung, Tahun 2000**

Kabupaten/Kota	Kelompok Umur		
	7-12	13-15	16-18
Lampung Selatan <sup>1)</sup>	2,3	4,1	2,4
Lampung Tengah <sup>2)</sup>	1,4	2,5	3,1
Lampung Utara <sup>3)</sup>	1,9	1,1	3,9
Lampung Barat	1,0	1,1	3,9
Bandar Lampung	1,3	1,7	7,0
Propinsi	1,8	2,5	3,6

Sumber: BPS, Profil Kependudukan Propinsi Lampung Tahun 2000.

Keterangan:

- 1) termasuk Kabupaten Tanggamus
- 2) termasuk Kabupaten Lampung Timur dan Kota Metro
- 3) termasuk Kabupaten Way Kanan dan Tulang Bawang

Tabel tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan maka semakin tinggi pula persentase angka putus sekolah. Hal ini sangat berkaitan dengan biaya pendidikan yang semakin tinggi untuk jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Hal yang menarik lain adalah angka putus sekolah untuk kelompok umur 16-18 tahun di Bandar Lampung justru paling tinggi di banding daerah lain. Fenomena ini sulit untuk dijelaskan, oleh karena studi yang lebih intensif mengenai berbagai faktor yang mempengaruhi angka putus sekolah belum banyak dilakukan. Merujuk hasil studi yang dilakukan oleh CIMU seperti yang diutarakan di atas, nampaknya ancaman meningkatnya angka putus sekolah dan menurunnya angka pendaftaran sekolah, akhir-akhir ini menjadi semakin nyata mengingat biaya pendidikan yang cenderung meningkat tajam.

Salahsatu kemungkinan penyebab tingginya angka putus sekolah adalah perkawinan di bawah umur. Di propinsi Lampung angka perkawinan di

bawah umur (10-14 tahun dan 15-19 tahun) menunjukkan angka yang cukup tinggi (Tabel 28). Sebagian dari perkawinan tersebut berakhir dengan kematian pada salahsatu pasangan. Apabila dilihat dari persentase kematian, nampak bahwa perkawinan pada umur 10-14 tahun lebih tinggi jika dibandingkan pada kelompok umur 15-19 tahun. Sementara itu jika dibedakan menurut jenis kelamin, terlihat bahwa angka kematian pasangan perempuan lebih tinggi dibandingkan dengan pasangan laki-laki. Hal ini berarti lebih banyak duda dibandingkan janda, dan hal ini terutama terlihat nyata pada kelompok umur 10-14 tahun. Penyebab kematian pada perkawinan di bawah umur ini secara umum memang tidak diketahui secara pasti, namun jika dilihat kecenderungan antar kabupaten (Daerah Tingkat II) nampak adanya pola yang sama. Hal itu berarti penyebab kematian bukanlah suatu hal yang kebetulan. Kemungkinan penyebab kematian tersebut adalah proses persalinan, oleh karena secara medis, anak yang berumur 10-14 tahun memiliki resiko besar (kematian) dalam proses persalinannya.

Tabel 28

Perkawinan di Bawah Umur Propinsi Lampung Berdasarkan Status Perkawinan, Kelompok Umur, dan Daerah Tingkat II, Tahun 2000

Kabupaten/Kota	Kelompok Umur/Status Perkawinan					
	10-14			15-19		
	Kawin	Cerai Hidup	Cerai Mati	Kawin	Cerai Hidup	Cerai Mati
Lampung Selatan	783	422	32	8.419	762	64
Lampung Utara	352	215	16	3.951	322	25
Lampung Barat	240	99	13	3.960	178	24
Lampung Timur	494	292	15	6.761	494	36
Lampung Tengah	672	401	43	7.897	669	71
Tanggamus	475	269	17	4.395	391	41
Tulang Bawang	512	303	16	6.836	377	30
Way Kanan	255	132	4	3.186	202	12
Bandar Lampung	322	222	13	3.189	379	51
Metro	46	23	2	391	38	2
Jumlah	4.151	2.378	171	48.985	3.812	356

Sumber: BPS Propinsi Lampung, 2002. Karakteristik Penduduk Lampung.

Tabel tersebut menunjukkan bahwa dari 6.700 perkawinan pada kelompok usia 10-14 tahun, 171 (2,6%) diantaranya berakhir dengan kematian.

Sementara itu pada kelompok usia 15-19 tahun terdapat 53.153 perkawinan dan 356 (0,67%) berakhir dengan kematian. Tingkat kegagalan perkawinan (cerai hidup) ternyata juga cukup tinggi. Pada kelompok usia 10-14 tingkat kegagalan tersebut mencapai 35,49%, sedangkan pada kelompok usia 15-19 tahun mencapai 7,17%. Meskipun dalam Undang-Undang Perkawinan, disebutkan batas umur minimal bagi perempuan adalah 16 tahun dan bagi laki-laki 19 tahun, namun dalam pelaksanaannya ternyata masih banyak dijumpai perkawinan di bawah umur.

Tabel 29

Jumlah Cerai Mati Perkawinan di Bawah Umur Propinsi Lampung Berdasarkan Kelompok Umur, Jenis Kelamin, dan Daerah Tingkat II, Tahun 2000

Kabupaten/Kota	Kelompok Umur /Jenis Kelamin				Jumlah
	10-14		15-19		
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	
Lampung Selatan	29	3	29	35	96
Lampung Utara	13	3	11	14	41
Lampung Barat	13	0	18	6	37
Lampung Timur	13	2	23	13	51
Lampung Tengah	36	7	33	38	114
Tanggamus	16	1	26	15	58
Tulang Bawang	14	2	11	19	46
Way Kanan	4	0	3	9	16
Bandar Lampung	9	4	23	28	64
Metro	2	0	1	1	4
<b>Jumlah</b>	<b>149</b>	<b>22</b>	<b>178</b>	<b>178</b>	<b>527</b>

Sumber: BPS Propinsi Lampung 2002. Karakteristik Penduduk Lampung.

### 5.5. Cakupan Program Pendidikan Luar Sekolah (PLS)

Pada dasarnya negara menjamin bahwa pendidikan anak akan diarahkan pada pengembangan kepribadian anak, bakat dan kemampuan mental dan fisik sampai mencapai potensi mereka sepenuhnya, pengembangan sikap hormat kepada orang tua atau ke orang lain yang lebih dewasa, identitas budaya, bahasa dan nilai-nilai serta peradabannya sendiri serta peradaban yang berbeda dari peradabannya, mempersiapkan anak untuk kehidupan yang bertanggungjawab dengan semangat pengertian, perdamaian,

tenggangrasa, kesetaraan, persaudaraan antar etnis, bangsa dan agama; serta menjauhkan dari sikap konflik psiko-sosial.

Dalam kenyataannya tidak semua anak mempunyai kesempatan yang sama untuk mengikuti pendidikan formal. Meskipun pemerintah telah mencangkan program Wajib Belajar 9 tahun, namun masih terdapat sejumlah anak yang tidak dapat mencapai pendidikan dasar dan menengah setingkat SLTP. Oleh karena alasan tertentu, banyak anak yang mengalami putus sekolah. Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah menjalankan program Pendidikan Luar Sekolah (PLS). Program ini terdiri dari program kejar paket A untuk tingkat SD (kelas IV, V, dan VI); kejar paket B untuk tingkat SLTP (kelas I, II, dan III), kejar paket C untuk tingkat SLTA (kelas I, II, dan III), Penyetaraan Ujian Akhir Nasional, Kelompok Belajar Usaha (KBU), dan Magang.

Tabel 30

Jumlah Warga Belajar Yang Mengikuti Program Belajar PLS Propinsi Lampung Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2002

Kabupaten/Kota	KF	Paket			PUAN SLTP	KBU	Magang	Jumlah TLD	Jumlah PKBM
		A	B	C					
Lampung Selatan	60	60	410	367	180	30	30	6	13
Lampung Tengah	60	40	318	80	117	40	30	3	10
Lampung Utara	60	40	265	120	40	40	30	3	8
Lampung Barat	60	60	224	194	36	40	30	3	5
Tulang Bawang	60	60	235	30	39	40	30	3	4
Tanggamus	60	40	299	77	54	40	30	3	8
Lampung Timur	60	40	264	30	106	40	30	5	7
Way Kanan	60	40	236	180	78	35	30	3	5
Bandar Lampung	60	35	312	60	62	65	38	7	10
Metro	60	20	128	-	-	35	22	3	4
Jumlah	600	435	2721	1138	712	405	300	29	74

Sumber: Dinas Pendidikan Propinsi Lampung, 2002. Data Program PLS, 2002.

Program-program tersebut selain ditujukan untuk meningkatkan tingkat *literacy* dan taraf pendidikan masyarakat juga dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dimungkinkan mengingat melalui program tersebut, para warga belajar selain diberikan pengetahuan dasar juga diberikan pelatihan ketrampilan teknis dalam berbagai bidang kegiatan

ekonomis. Harapannya, setelah mengikuti program tersebut, warga belajar dapat menerapkan pengetahuan dan keterampilan teknisnya dalam kehidupan sehari-hari sehingga aktivitas yang dijalankan mengalami kemajuan yang berarti. Pada gilirannya, tingkat kehidupan dan kesejahteraan warga belajar dapat meningkat.

Hal yang perlu dicatat di sini adalah bahwa cakupan program PLS terutama yang ditujukan bagi pemberantasan buta huruf bagi penduduk usia di atas 10 tahun masih sangat terbatas dan terlalu kecil jika dibandingkan dengan ruang lingkup permasalahan yang ada. Penduduk usia 10 tahun ke atas yang masih buta huruf di Propinsi Lampung pada tahun 2001 rata-rata per kabupaten mencapai 7,54% (BPS, 2002. Profil Pendidikan Propinsi Lampung, 2001). Secara absolut angka persentase tersebut mencapai jumlah penduduk sebesar kurang lebih 402.400 jiwa (dihitung berdasarkan proyeksi penduduk Lampung tahun 2001)(BPS.2001. Proyeksi Penduduk Lampung 2000-2005). Apabila dikaitkan dengan target pencapaian 100% penduduk dewasa melek huruf pada tahun 2015, maka masih terdapat pekerjaan besar yang memerlukan berbagai upaya terobosan, agar target tersebut dapat tercapai yang sekaligus dapat meningkatkan indeks pengembangan manusia khususnya di Propinsi Lampung.

#### 5.6. Cakupan BKB/PADU/Play Group/TK/TPA

Usia lahir sampai dengan memasuki pendidikan dasar merupakan masa keemasan sekaligus masa kritis dalam tahapan kehidupan manusia, yang akan menentukan perkembangan anak selanjutnya. Masa ini merupakan masa yang tepat untuk meletakkan dasar-dasar pengembangan kemampuan fisik, bahasa, sosial-emosional, konsep diri, seni, moral dan nilai-nilai agama. Sehingga upaya pengembangan seluruh potensi anak usia dini harus dimulai agar pertumbuhan dan perkembangan anak tercapai secara optimal (Departemen Pendidikan Nasional, 2002).

Hal ini sesuai dengan hak anak, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak yang menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Salah satu implementasi dari hak ini, setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam

rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya (Departemen Pendidikan Nasional, 2002).

Layanan pendidikan bagi anak usia dini merupakan bagian dari pencapaian tujuan pendidikan nasional, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang sistem Pendidikan Nasional. Program-program pendidikan anak dini usia yang telah ada di masyarakat antara lain adalah Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak (TPA), Pendidikan Anak Usia Dini (PADU) dan lain-lain. Program PADU ini merupakan salah satu bentuk komitmen pemerintah terhadap kerangka aksi pendidikan untuk semua (PUS), hasil deklarasi Forum Pendidikan Dunia Dakar, Senegal tahun 2000. Namun demikian layanan PADU di Indonesia baru menjangkau sebagian kecil masyarakat. Program PADU juga ada yang diintegrasikan dalam Posyandu dengan tiga komponen utama yang diperhatikan yakni gizi, kesehatan dan pendidikan. Kegiatan PADU ini bersifat fleksibel disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing baik mengenai frekuensi kegiatan/minggu, pendanaan, kader yang melaksanakan tugas, maupun dalam hal sarana bermain yang disediakan.

Di Propinsi Lampung, kegiatan PADU dilaksanakan secara intensif di tiga kabupaten yakni Lampung Selatan, Lampung Tengah, dan Kota Bandar Lampung. Sementara itu di kabupaten lain (Lampung Timur, Tulang Bawang, Tanggamus, Metro, dan Lampung Barat) juga dilaksanakan untuk beberapa lembaga. Program PADU terbagi menjadi dua berdasarkan besarnya dana yang dialokasikan yakni dana rintisan yang besarnya Rp 25 juta/tahun/lembaga dan program dana kelembagaan yang besarnya Rp 2 juta/tahun/lembaga. Kegiatan PADU yang dilakukan di tiga kabupaten (Lampung Selatan, Lampung Tengah, dan bandar Lampung), keseluruhannya terdapat 24 lembaga, 9 lembaga diantaranya merupakan PADU yang mendapat dana rintisan dan 15 lembaga merupakan PADU yang mendapat dana kelembagaan. Selanjutnya daftar lembaga PADU yang terdapat di tiga kabupaten/kota tersebut dapat dilihat dalam tabel L.11. pada lampiran.

Sementara itu data mengenai jumlah taman kanak-kanak yang terdapat di Propinsi Lampung, tidak tersedia untuk seluruh kabupaten. Hal ini disebabkan tidak semua kabupaten/kota melaporkan ke dinas pendidikan Propinsi Lampung. Hal ini nampaknya menjadi fenomena umum untuk seluruh dinas instansi yang ada.

Tabel 31

Jumlah Taman Kanak-Kanak/Raudhatul Atfal dan Jumlah Peserta Didik Propinsi Lampung, Tahun 2002

Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Menurut Perijinannya		Jumlah Tenaga	Jumlah Peserta didik per kelompok Usia		
	Ada	Belum		0-4	5-6	7-8
Lampung Barat	23	8	105	0	946	0
Lampung Utara	96	0	-	45.621	26.588	58.063
Way Kanan	348	0	1.270	863	3.149	4.660
Tulang Bawang	1060	0	-	-	-	-
Metro	368	0	1.269	861	3.147	4.658

Sumber: Dinas Pendidikan Propinsi Lampung, 2002.

### 5.7. Pemanfaatan Waktu Luang, Kegiatan Rekreasi dan Budaya

Dalam Konvensi Hak Anak, disebutkan bahwa anak berhak untuk beristirahat dan bersantai, bermain dan turut serta dalam kegiatan-kegiatan rekreasi yang sesuai dengan usianya dan untuk turut serta secara bebas dalam kehidupan budaya dan seni. Untuk itu, negara mendorong pengadaan peluang yang layak dan sama untuk kegiatan-kegiatan budaya, seni, santai, dan rekreasi. Data tentang pemanfaatan waktu luang, kegiatan rekreasi dan budaya hingga saat ini masih sangat terbatas. Dalam hal ini digunakan pendekatan dengan data jumlah anggota pramuka sebagai salahsatu bentuk kegiatan yang dilakukan anak di luar aktivitasnya belajar di sekolah (ekstra kurikuler). Kegiatan kepramukaan yang dilakukan anak sekolah terutama SD dan SLTP merupakan kegiatan yang bertujuan membentuk kepribadian anak sehingga diharapkan dapat menjadi anak yang tangguh dalam menghadapi tantangan kehidupan di masa mendatang.

Tabel 32  
 Jumlah Anggota Pramuka Menurut Tingkatan Dan Daerah Tingkat II  
 Di Propinsi Lampung Tahun 2001

Kabupaten	Tingkatan /Jenis Keanggotaan				
	Slaga	Penggalang	Penegak	Pandega	Pembina
Lampung Selatan	121.040	158.354	21.421	101	8.208
Lampung Utara	93.988	117.665	25.838	7.518	7.969
Lampung Barat	24.854	44.311	4.170	10	1.841
Lampung Timur	70.860	67.952	14.639	-	2.331
Lampung Tengah	61.266	100.083	11.344	-	10.227
Tanggamus	69.430	54.136	22.814	760	1.832
Tulang Bawang	49.645	79.725	5.906	-	1.352
Way Kanan	27.456	71.807	4.710	241	610
Bandar Lampung	34.808	25.422	18.397	713	2.271
Metro	4.050	3.037	921	267	274
<b>Jumlah</b>	<b>557.397</b>	<b>722.492</b>	<b>130.160</b>	<b>9.621</b>	<b>38.355</b>

Sumber: BPS Propinsi Lampung, Lampung dalam Angka, 2001 (diolah kembali).



## BAB VI PERLINDUNGAN KHUSUS

Dalam Konvensi Hak Anak, ruang lingkup upaya-upaya perlindungan khusus bagi anak mencakup berbagai hal yakni: (a) anak yang berada dalam situasi darurat yang meliputi anak dalam pengungsian dan anak yang berada dalam situasi konflik bersenjata, (b) anak yang sedang berkonflik dengan hukum, (c) anak dalam situasi eksploitasi yang meliputi eksploitasi ekonomi, penyalahgunaan obat dan penyalahgunaan seks, perdagangan anak, dan bentuk eksploitasi lain, (d) anak dari kalangan minoritas baik suku bangsa, agama, bahasa ataupun orang pribumi. Pada prinsipnya anak-anak yang berada dalam situasi-situasi tersebut mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan hak-hak dan kemerdekaannya serta terjamin kesejahteraannya dari seluruh komponen masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, terdapat banyak kesulitan untuk melakukan upaya perlindungan terhadap anak-anak yang berada dalam situasi-situasi tersebut. Kesulitan pertama adalah tidak tersedianya data yang akurat baik mengenai besar maupun sebarannya dalam suatu wilayah. Hal ini disebabkan berbagai hal antara lain:

- (1) Tidak ada pemilahan data antara kelompok penduduk yang tergolong "anak" dengan kelompok penduduk "dewasa", terutama hal ini terjadi pada anak yang berada dalam pengungsian.
- (2) Ketidaktahuan, keengganan, dan ketakutan masyarakat untuk melaporkan anak-anak yang berada dalam situasi yang kurang menguntungkan. Kondisi ini berkaitan dengan berbagai hal seperti adanya tekanan dari pihak-pihak tertentu, ketidaktahuan kepada siapa harus melaporkan kasusnya, perasaan malu bila kasusnya menjadi "urusan" publik, persepsi bahwa kasusnya tidak akan selesai meskipun sudah dilaporkan, serta sebab-sebab yang lain. Akibatnya beberapa kasus anak yang sedang dalam eksploitasi menjadi masalah yang relatif "tersembunyi".
- (3) Sistem pendataan terhadap anak yang berada dalam situasi-situasi tersebut belum tersedia.

Kesulitan kedua, hingga saat ini belum ada program-program khusus yang memadai baik dari instansi pemerintah maupun dari Lembaga Swadaya

Masyarakat untuk menangani masalah tersebut. Hal ini berkaitan dengan keterbatasan dana, keterbatasan pengetahuan teknis mengenai metode pendekatan dan penanganan masalah, serta masih adanya tumpang tindih kewenangan antarinstansi.

Di Propinsi Lampung, tidak tersedia cukup banyak data mengenai anak-anak yang berada dalam situasi darurat, anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang berada dalam situasi eksploitasi maupun anak minoritas. Jumlah anak yang berada dalam situasi darurat (dalam pengungsian) maupun dalam konflik bersenjata, di Propinsi Lampung dapat dikatakan tidak ada. Bencana alam dan konflik dalam skala kecil memang pernah terjadi namun hal itu tidak mengakibatkan pengungsian penduduk dalam jangka waktu yang lama. Konflik antar kampung akhir-akhir ini memang terjadi di Kabupaten Lampung Timur dan mengakibatkan beberapa penduduk harus mengungsi, namun hal itu hanya berlangsung dalam beberapa hari. Tempat pengungsiannya pun tidak dalam tenda darurat melainkan pada umumnya di tempat sanak saudara yang berada di kampung terdekat dengan lokasi konflik. Hak, kebebasan, dan kesejahteraan anak dengan demikian menjadi relatif terjamin.

#### **6.1. Anak yang Berkonflik dengan Hukum**

Data tentang anak yang berkonflik hukum di Propinsi Lampung juga tidak cukup memuaskan. Badan Pusat Statistik Propinsi Lampung mempublikasikan Statistik Kriminal yang berisi data tentang kasus-kasus tindak kejahatan "kerah biru" (*blue collar crime*) yang terjadi di Propinsi Lampung. Publikasi ini terakhir diterbitkan pada tahun 1999 untuk menggambarkan kondisi kriminal pada tahun 1998. Namun dalam publikasi itu data yang menyangkut tindak kejahatan yang dilakukan anak sangat terbatas. Selain itu juga tidak dijelaskan tentang definisi yang digunakan untuk menyebut penduduk yang tergolong "anak".

Tabel 33

Jumlah Anak yang Berkonflik dengan Hukum Propinsi Lampung Berdasarkan Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin, Tahun 2002.

Kabupaten/Kota	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
Bandar Lampung	124	1	125
Lampung Selatan	64	0	64
Lampung Utara	68	0	68
Lampung Barat	17	0	17
Lampung Tengah	51	3	54
Lampung Timur	64	0	64
Way Kanan	18	0	18
Tulang Bawang	20	0	20
Metro	22	0	22
Tanggamus	29	0	29
<b>Jumlah</b>	<b>477</b>	<b>4</b>	<b>481</b>

Sumber: BAPAS, Propinsi Lampung, 2002 (diolah kembali).

Permasalahan yang dihadapi di Propinsi Lampung berkaitan dengan anak yang berkonflik dengan hukum ini adalah belum adanya Lembaga Pemasyarakatan (LP) khusus anak yang memadai. Saat ini Lembaga Pemasyarakatan khusus anak di Propinsi Lampung hanya terdapat di Kota Bumi (Lampung Utara). Namun demikian tidak semua anak yang berkonflik dengan hukum ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan ini. Hal ini disebabkan karena pada umumnya orang tua pihak anak tidak menghendaki anaknya ditempatkan di LP tersebut karena alasan jauh jaraknya. Oleh karena itu, banyak anak yang kemudian ditempatkan di LP terdekat dan bercampur dengan narapidana lain yang berumur lebih tua. Jumlah penghuni LP yang melebihi kapasitas daya tampungnya bahkan dapat mengakibatkan napi anak bercampur dengan napi dewasa dalam satu ruangan. Kondisi seperti ini dapat menyebabkan anak mengalami tindak kekerasan (aniaya fisik maupun seksual) oleh narapidana lain yang berumur lebih tua.

Tabel 34

Jumlah Anak Yang Berkonflik dengan Hukum di Propinsi Lampung,  
Berdasarkan Jenis Tindak Pidana, Tahun 2002

Tindak Pidana	Keterangan	Jumlah	%
170 KUHP	Pengeroyokan	29	6,03
287, 289, dan 290 KUHP	Pencabulan	9	1,87
303 KUHP	Perjudian	2	0,004
310 KHUP	Penghinaan	1	0,002
332 KUHP	Pelanggaran Kemerdekaan orang	1	0,002
335 KUHP	Pemaksaan	1	0,002
340 KUHP	Pembunuhan terencana	3	0,006
351 KUHP	Penganiayaan	37	7,69
359 dan 360 KUHP	Kealpaan yg menyebabkan kematian	3	0,006
362 KUHP	Pencurian Biasa	42	8,73
363 KUHP	Pencurian dengan pemberatan	199	41,37
365 KUHP	Pencurian dengan kekerasan	48	9,99
368 KUHP	Pemerksaan	11	2,29
372 KUHP	Penipuan	2	0,004
406 KUHP	Perusakan Barang	1	0,002
480 KUHP	Penadahan	2	0,004
385 KUHP	Pemerksaan	7	1,45
UU DRT No 12/51	Senjata tajam	35	7,28
UU No 22/1997 UU No 5/ 1997	Narkoba dan Psicotropika	39	8,10
Tidak diketahui		9	1,87
	<b>Jumlah</b>	<b>481</b>	<b>100</b>

Sumber: BAPAS Propinsi Lampung, 2002.

Kondisi tersebut dapat mengakibatkan hak-hak anak tidak dapat dipenuhi. Selain itu anak yang berkonflik dengan hukum ini sangat rentan terhadap tindak kekerasan yang dilakukan oleh narapidana lain. Permasalahan seperti ini perlu mendapat perhatian dari semua pihak mengingat jumlah anak yang berkonflik dengan hukum cenderung mengalami kenaikan dari waktu ke waktu. Pemerintah Propinsi Lampung melalui Kanwil Kehakiman dan Hak Asasi Manusia serta LP Raja Basa sebenarnya sudah mengajukan usulan, namun hingga saat ini belum ada tanggapan dari pemerintah pusat (Radar, 30 Juni 2003; hal. 14). Meskipun anak yang terpidana dan masuk LP mendapatkan berbagai program pembinaan baik pembinaan mental,

kerohanian, pendidikan dan ketrampilan; namun bukan berarti hak-hak dan kebebasan anak bebas dari ancaman pelanggaran.

Kualifikasi hukuman bagi anak yang berkonflik dengan hukum ini bermacam-macam sesuai dengan tingkat pelanggaran yang telah dilakukan. Jenis-jenis vonis yang dijatuhkan hakim antara lain: (1) membebaskan, (2) mengembalikan kepada orangtua/masyarakat dibawah pengawasan BAPAS (Badan Pemasyarakatan), (3) Pidana bersyarat, (4) pidana pengawasan. Selain itu untuk perkara deponir yakni bagi anak di bawah usia 8 tahun, tidak dilakukan pro yustisia melainkan dikembalikan kepada orang tua tanpa pengawasan dari pihak BAPAS. Dalam hal ini hakim hanya memberikan peringatan kepada orangtua (wali) agar lebih memperhatikan anaknya.

Sesuai dengan Undang-undang Peradilan Anak, setiap anak yang berkonflik dengan hukum dilakukan penelitian masyarakat (litmas) yang dilakukan oleh BAPAS. Penelitian ini meliputi latar belakang sosial pelaku, korban, dan keluarga korban, serta pihak lain seperti aparat setempat, pemuka masyarakat dan sebagainya. Hasil litmas tersebut menjadi acuan baik polisi, jaksa maupun hakim dalam memutuskan perkara. Namun dalam praktiknya, terdapat kecenderungan bahwa hasil litmas tersebut tidak atau kurang dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam proses peradilan. Akibatnya seringkali anak mendapatkan kualifikasi hukuman yang maksimal sesuai dengan tuntutan jaksa. Vonis hukuman pidana bersyarat dalam hal ini jarang sekali dijatuhkan bagi anak yang berkonflik dengan hukum. Proses peradilan anak hingga saat ini masih sering disamakan dengan peradilan orang dewasa.

## 6.2. Anak yang Mengalami Eksploitasi

Salahsatu bentuk eksploitasi yang dilakukan terhadap anak adalah eksploitasi ekonomi akibat krisis ekonomi, menyebabkan jumlah pekerja anak 5-9 tahun dan 10-14 tahun meningkat. Anak yang terpaksa bekerja, sampai dengan bulan Oktober 1990 tercatat 2,05 juta anak, pada bulan agustus 1997 menurun menjadi 1,64 juta anak, akan tetapi pada bulan Desember 1998 meningkat kembali menjadi 1,8 juta (BPS). Sebagian pekerja anak tersebut berada di perdesaan pada sektor informal atau pertanian. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh BPS, di Bandung dan Medan, ditemukan 30% anak bekerja lebih dari 30 jam perminggu, 11% diantaranya bekerja lebih dari 40

jam atau lebih. Hal ini telah melanggar KEPMENAKER No. 10 tahun 1987. Dari pekerja anak tersebut, 64% diantaranya adalah anak perempuan. Selain jumlah jam kerja yang berlebih anak-anak juga mengalami bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, bekerja di sektor industri perikanan laut (jermal), pertambangan, konstruksi, transportasi, industri kimia. Pekerjaan terburuk anak telah diatur dalam Surat Edaran No. 12/M/BW/1997 mengenai Ketetapan 25 Jenis Pekerjaan yang Terlarang Untuk Anak (RIP-KPA, Kementrian PP RI, 2002).

Menurut Nachrowi dan Muhidin (1997), terdapat enam alasan utama mengapa permasalahan pekerja anak ini masih dan selalu dijadikan pembahasan penting di Indonesia. Pertama, meningkatnya jumlah pekerja anak akan menimbulkan dinamika tersendiri dalam proses pembangunan sumberdaya manusia selama duapuluh lima tahun mendatang (PJP II). Kedua, upaya mengantisipasi secara dini permasalahan yang mungkin timbul sebagai akibat semakin bertambahnya jumlah absolut pekerja anak dari tahun ke tahun dan permasalahan ketenagakerjaan yang mungkin muncul sebagai akibat adanya persaingan dan peningkatan penanaman modal dalam sektor industri di Indonesia. Ketiga, era ekonomi global telah mengubah sistem perdagangan dunia internasional. Negara-negara maju semakin *concern* dengan kesejahteraan dan kehidupan buruh. Negara-negara tersebut menerapkan *social dumping* atau *social closed* dalam traktat perjanjian ekonomi. Pemakaian buruh murah dan pekerja anak menjadi "haram" dalam sistem ketenagakerjaannya. Keempat, melonjaknya jumlah pekerja anak berimplikasi terhadap pasar tenaga kerja. Penggunaan pekerja anak dalam suatu perusahaan ternyata berdampak kepada pengurangan kesempatan kerja pada pekerja dewasa. Kelima, banyak perusahaan industri manufaktur yang mempergunakan tenaga kerja di bawah umur menjadi isu yang sering diperdebatkan belakangan ini. Keenam, masih banyak pekerja di bawah umur yang harus bekerja tanpa mengetahui hak-hak yang mereka miliki, seperti hak cuti dan beberapa hak lainnya yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan mereka.

Menurut White dan Tjandraningsih (1998), saat ini anak-anak Indonesia menghadapi serangkaian kecenderungan dan tekanan yang kontradiktif. Pertama, tekanan untuk tetap bersekolah yang untuk rumah-rumah tangga miskin tidak akan menyebabkan anak-anak tidak bekerja (untuk anak-anak miskin bekerja merupakan salah satu cara untuk tetap dapat bersekolah).

Kedua, globalisasi ide tentang gaya hidup dan menyebarnya budaya konsumen menyebabkan pentingnya dimiliki akses terhadap uang bagi anak-anak. Ketiga, kenyataan yang menunjukkan begitu banyaknya pengangguran di kalangan orang muda menyebabkan anak-anak segera mengambil kesempatan bekerja upahan begitu kesempatan tersebut muncul, didukung oleh kesadaran bahwa lulus SD maupun SMP tidak dengan sendirinya akan memberikan kemungkinan yang lebih baik di pasar tenaga kerja. Yang terakhir, khusus untuk anak perempuan tekanan dari orang tua agar tetap tinggal di rumah untuk melakukan pekerjaan rumah tangga dan tidak perlu melanjutkan sekolah atau memasuki pasar tenaga kerja, menimbulkan persoalan khusus yang seringkali mendorong lahirnya keputusan yang diambil oleh anak perempuan itu sendiri untuk masuk dalam pasar tenaga kerja. Meskipun ada kasus-kasus yang menunjukkan bahwa anak-anak memang didorong untuk melakukan kerja upahan oleh orang tua mereka sendiri, bagi banyak anak keputusan untuk masuk ke pasar kerja upahan maupun sektor informal merupakan sebuah pemecahan dari persoalan melakukan kerja rumah tangga yang tidak dibayar dan tidak memadainya sistem pendidikan.

Salahsatu permasalahan ketenagakerjaan yang krusial di Indonesia adalah meningkatnya pekerja anak. Kondisi perekonomian yang kurang menguntungkan pada sebagian keluarga, merupakan faktor pendorong munculnya masalah ini. Anak yang seharusnya menikmati keceriaan bermain bersama teman-temannya, dan menikmati pendidikan pada usianya, terpaksa harus bekerja membantu orangtua. Jumlah pekerja anak di suatu wilayah, dengan demikian dapat menjadi indikator tingkat kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut. Di Propinsi Lampung, pekerja anak pada umumnya merupakan pekerja di sektor pertanian dan sedikit di industri.

Tantangan yang dihadapi propinsi ini dalam masalah pekerja anak di masa mendatang cukup berat. Hal ini disebabkan kecenderungan peningkatan angkatan kerja (tabel 36) yang tidak diikuti perbaikan secara berarti dalam berbagai hal di sektor-sektor yang lain, terutama perlindungan hak dan kesejahteraan terhadap pekerja anak. Sebagian pekerja anak, melakukan pekerjaan yang membahayakan bagi keselamatan jiwa dan kesehatannya. Pekerjaan-pekerjaan di bidang transportasi, konstruksi (sebagai buruh bangunan), manufaktur (pekerja pabrik), pekerja produksi, dan pekerja kasar lainnya merupakan pekerjaan-pekerjaan yang berisiko tinggi bagi

anak. Resiko tersebut hampir sepenuhnya ditanggung anak itu sendiri oleh karena tidak ada sistem jaminan baik dari pengusaha maupun pemerintah yang mampu memberikan perlindungan kepada pekerja anak.

**Tabel 35**  
**Perkembangan Jumlah Angkatan Kerja Usia 15-19 Tahun**  
**Menurut Jenis Kelamin Propinsi Lampung, Tahun 1996-2001**

No.	Tahun	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	1996	224.172	132.363	356.535
2	1997	230.330	133.186	364.146
3	1998	277.116	143.339	370.455
4	1999	235.252	149.374	384.626
5	2000	243.731	156.265	399.996
6	2001	206.555	164.073	417.541

Sumber: BPS Propinsi Lampung, 2002.  
 Indikator Kesejahteraan Rakyat, 2001.

Terbaikannya hak-hak buruh anak tidak terlepas dari persepsi masyarakat luas mengenai latar belakang keberadaan buruh anak itu sendiri. Buruh anak dipandang sebagai individu yang terpaksa bekerja karena keterbatasan ekonomi keluarga. Selain itu, terdapat pula anggapan di kalangan sebagian orang tua bahwa memperkerjakan anak merupakan bagian dari "pendidikan" bagi anak dalam menghadapi tantangan masa depan. Oleh karena itu jika masalah buruh anak di "ganggu-gugat" justru akan memperburuk kemiskinan. Kondisi ini nampaknya kemudian dimanfaatkan oleh pengusaha terutama yang bergerak dalam industri manufaktur dan jasa untuk mengeksploitasi anak yang terpaksa menjadi buruh.



Tabel 36

Jumlah Anak Usia Kurang dari 18 Tahun Yang Bekerja dan Berstatus Buruh Menurut Jenis Kelamin Di Propinsi Lampung, Tahun 2001

Lapangan Usaha	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
Pertanian dan Perkebunan	4.334	1.027	5.363
Peternakan	463	225	688
Perikanan	293	604	897
Industri Makanan dan Minuman	1.240	1.779	3.019
Industri Tekstil	-	487	487
Industri Kayu	-	1.091	1.091
Industri Pengolahan Barang dan Tanah Liat	262	-	262
Industri Furniture	272	-	272
Konstruksi	1.796	225	2.021
Penjualan, Pemeliharaan dan Reparasi Mobil	293	-	293
Perdagangan	-	1.092	1.092
Rumah Makan/Restoran	-	290	290
Angkutan	725	-	725
Jasa Administrasi	463	-	463
Jasa Kebersihan	-	586	586
Jasa Kegiatan Lainnya	463	-	463
Pembantu Rumah Tangga	-	1.840	1.840
<b>Jumlah</b>	<b>10.604</b>	<b>9.246</b>	<b>19.850</b>

Sumber: BPS Propinsi Lampung, 2002. Indikator Kesejahteraan Rakyat, 2001.

Tabel di atas menunjukkan bahwa pekerja anak di sektor industri dan jasa cukup besar dan melebihi pekerja di sektor pertanian. Secara keseluruhan, jumlah pekerja anak kemungkinan lebih besar dari angka yang tertera dalam tabel. Menurut Irwanto (dalam Nachrowi dan Muhidin, 1997), rendahnya hasil pencatatan jumlah anak yang bekerja dengan sistem SAKERNAS yang dilakukan BPS, disebabkan oleh beberapa kemungkinan. Pertama, informasi yang diperoleh adalah bukan dari pihak pertama, melainkan dari orangtua atau orang dewasa lainnya yang mewakili anak. Kedua, pencatatan dilakukan pada saat yang tidak tepat, terutama jika pada minggu sebelumnya adalah hari libur besar. Selain itu banyak anak yang bekerja membantu orang tua di rumah atau di tempat lain yang bersifat ekonomis tetapi tidak dilaporkan (*under reported*).

Perubahan struktur perekonomian yang mengarah ke industri dan jasa di masa mendatang berpotensi meningkatkan jumlah pekerja anak secara lebih cepat. Hal ini mengingat kecenderungan pada sisi permintaan terhadap pekerja anak yang mengalami peningkatan. Menurut Nachrowi dan Muhidin (1997), sebagian besar industri yang memperkerjakan anak ternyata memiliki alasan karena upah mereka yang relatif murah dan kecenderungan dari sikap mereka yang penurut (tidak banyak menuntut). Selain itu, mereka melihat adanya beberapa pekerjaan yang cocok untuk pekerja anak. Misalnya, jenis pekerjaan yang ringan dan sederhana tetapi tidak ada (tidak banyak) pekerja dewasa yang mau mengerjakan pekerjaan tersebut.

Selain dalam industri manufaktur, jasa, dan pertanian, terdapat sebagian anak yang mengalami eksploitasi secara seksual. Faktor-faktor yang melatarbelakangi anak terjun dalam "lembah hitam" ini tidak dapat diketahui secara pasti. Namun demikian terdapat dugaan kuat selain karena alasan ekonomi, terdapat alasan lain seperti misalnya hilangnya harga diri karena hubungan dengan pacar yang terlalu "intensif" sebelumnya mengalami keretakan. Globalisasi ide gaya hidup modern juga telah meracuni kehidupan anak (remaja), sehingga untuk meraih kehidupan yang penuh glamour tersebut ditempuh dengan jalan pintas yakni menjadi pelacur. Sebagaimana anak yang mengalami eksploitasi seksual mempunyai anggapan bahwa "profesi" pelacur merupakan alternatif yang paling memungkinkan untuk meraih itu semua. Selain itu, juga tidak sedikit anak yang menjadi pelacur ini karena "dijebak" oleh pihak lain yang sebelumnya memberikan "iming-iming" berupa pekerjaan yang "layak" di kota.

Fenomena kemunculan pelacur anak terutama di Jakarta, pernah digambarkan secara baik oleh Maki Hatanaka. Pelacur anak di Jakarta terkenal dengan istilah "*Pechun*" yang merupakan singkatan dari dialek "*perek*" (perempuan yang berpengalaman dalam seks dan tempat para lelaki muda pertama kali mencoba pengalaman seks) dan "*chulun*" (muda). Menurut Hatanaka (1999), kehidupan "*pechun*" adalah penderitaan, dengan resiko tinggi dan eksploitasi dari hari ke hari. Meskipun *pechun* dihadapkan dengan bahaya dan eksploitasi dalam keseharian mereka di jalanan, tidak terdapat lembaga atau pelayanan dalam masyarakat untuk menyokong mereka. Banyak LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) setempat yang memiliki sasaran kelompok anak-anak dan remaja di jalanan membatasi usaha mereka hanya pada pertolongan kepada anak laki-laki, dan belum

Perubahan struktur perekonomian yang mengarah ke industri dan jasa di masa mendatang berpotensi meningkatkan jumlah pekerja anak secara lebih cepat. Hal ini mengingat kecenderungan pada sisi permintaan terhadap pekerja anak yang mengalami peningkatan. Menurut Nachrowi dan Muhidin (1997), sebagian besar industri yang memperkerjakan anak ternyata memiliki alasan karena upah mereka yang relatif murah dan kecenderungan dari sikap mereka yang penurut (tidak banyak menuntut). Selain itu, mereka melihat adanya beberapa pekerjaan yang cocok untuk pekerja anak. Misalnya, jenis pekerjaan yang ringan dan sederhana tetapi tidak ada (tidak banyak) pekerja dewasa yang mau mengerjakan pekerjaan tersebut.

Selain dalam industri manufaktur, jasa, dan pertanian, terdapat sebagian anak yang mengalami eksploitasi secara seksual. Faktor-faktor yang melatarbelakangi anak terjun dalam "lembah hitam" ini tidak dapat diketahui secara pasti. Namun demikian terdapat dugaan kuat selain karena alasan ekonomi, terdapat alasan lain seperti misalnya hilangnya harga diri karena hubungan dengan pacar yang terlalu "intensif" sebelumnya mengalami keretakan. Globalisasi ide gaya hidup modern juga telah meracuni kehidupan anak (remaja), sehingga untuk meraih kehidupan yang penuh glamour tersebut ditempuh dengan jalan pintas yakni menjadi pelacur. Sebagaimana anak yang mengalami eksploitasi seksual mempunyai anggapan bahwa "profesi" pelacur merupakan alternatif yang paling memungkinkan untuk meraih itu semua. Selain itu, juga tidak sedikit anak yang menjadi pelacur ini karena "dijebak" oleh pihak lain yang sebelumnya memberikan "iming-iming" berupa pekerjaan yang "layak" di kota.

Fenomena kemunculan pelacur anak terutama di Jakarta, pernah digambarkan secara baik oleh Maki Hatanaka. Pelacur anak di Jakarta terkenal dengan istilah "*Pechun*" yang merupakan singkatan dari dialek "*perek*" (perempuan yang berpengalaman dalam seks dan tempat para lelaki muda pertama kali mencoba pengalaman seks) dan "*chulun*" (muda). Menurut Hatanaka (1999), kehidupan "*pechun*" adalah penderitaan, dengan resiko tinggi dan eksploitasi dari hari ke hari. Meskipun *pechun* dihadapkan dengan bahaya dan eksploitasi dalam keseharian mereka di jalanan, tidak terdapat lembaga atau pelayanan dalam masyarakat untuk menyokong mereka. Banyak LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) setempat yang memiliki sasaran kelompok anak-anak dan remaja di jalanan membatasi usaha mereka hanya pada pertolongan kepada anak laki-laki, dan belum

memperhatikan resiko yang mengkhawatirkan dari lingkungan pechun terhadap remaja perempuan.

Tabel 37

Jumlah Anak Propinsi Lampung yang Mengalami Eksploitasi Seksual

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah
1	Bandar Lampung	27
2	Lampung Selatan	14
3	Lampung Utara	19
4	Lampung Tengah	12
5	Lampung Barat	18
6	Tanggamus	11
7	Tulang Bawang	13
8	Lampung Timur	9
9	Way Kanan	7
10	Metro	15
	Jumlah	145

Sumber: Dinas Kesejahteraan Sosial Propinsi Lampung, 2001.

### 6.3. Penyalahgunaan dan Kesalahgunaan NAPZA

Penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat aditif atau yang terkenal dengan NAPZA banyak terjadi di kalangan usia remaja. Saat ini kasus-kasus penyalahgunaan NAPZA tersebut cenderung meningkat. Peredaran barang haram ini bahkan telah sampai sekolah-sekolah dasar dengan modus operandi yang makin beragam seperti misalnya pemberian permen yang telah dilapisi narkotika sebelumnya. Melalui modus seperti ini, anak-anak sekolah lama kelamaan akan menjadi ketagihan (ketergantungan). Perkembangan yang lebih mengkhawatirkan, saat ini banyak pula anak sekolah yang tidak lagi sekedar konsumen melainkan sudah menjadi pedang narkotika.

Jumlah anak-anak pemakai (kasus penyalahgunaan dan kesalahgunaan) NAPZA di Propinsi Lampung tidak diketahui secara jelas. Data yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Propinsi Lampung, menyebutkan bahwa anak kelompok usia 16-20 terdapat 55 kasus pada tahun 2002. Jumlah ini meningkat dari 22 kasus pada tahun 2001 dan 19 kasus pada tahun 2000. Selanjutnya gambaran mengenai perkembangan kasus penyalahgunaan dan kesalahgunaan NAPZA di Propinsi Lampung dari tahun 2000 hingga tahun 2002 dapat dilihat dalam tabel 36.

Tabel 38  
Perkembangan Kasus Penyalahgunaan dan Kesalahgunaan NAPZA  
Propinsi Lampung Tahun 2000-2002

Data Penderita	2000	2001	2002
1	2	3	4
1. Jumlah Penderita	140	127	81
• Tertolong	130	125	76
• Meninggal	10	2	5
2. Jenis Kelamin			
• Laki-laki	98	69	66
• Perempuan	42	58	15
3. Kelompok Usia			
• 16-20 tahun	19	22	55
• 21-25 tahun	42	47	12
• 26-35 tahun	37	38	9
• 36-45 tahun	31	17	3
• 45 tahun ke atas	11	3	-
4. Tingkat Pendidikan			
• Sarjana	9	5	3
• Mahasiswa	52	38	12
• SLTA	41	35	55
• SLTP	29	43	9
• SD	-	-	-
• Tidak Sekolah	9	6	-
5. Status Pekerjaan			
• PNS/ABRI/POLRI	6	8	3
• Swasta/Karyawan	18	13	27
• Petani/Nelayan	23	27	-
• Wiraswasta	17	7	3
• Buruh	36	24	-
• Ibu Rumah Tangga	4	16	4
• Pengangguran	5	4	12
• Ikut Orang Tua	31	28	32

Tabel 38  
(Lanjutan)

	1	2	3	4
6. Motivasi Penggunaan				
• Pergaulan bebas		55	46	45
• Kesenangan/fun		33	29	15
• Coba-coba/Iseng		16	4	8
• Kecewa/Broken Home		20	31	6
• Tertekan/Stress		10	17	4
• Tidak Sengaja		-	-	-
• Tidak jelas		-	-	-

Sumber: Dinas Kesehatan Propinsi Lampung, 2003.

## BAB VII PENUTUP

Secara umum beberapa permasalahan menonjol yang berkaitan dengan kesejahteraan dan perlindungan anak di Propinsi Lampung antara lain:

1. Data tentang jumlah anak berdasarkan kepemilikan identitas kelahiran (akta kelahiran, surat kenal lahir dan sebagainya) hingga saat ini belum tersedia. Sementara itu di kalangan masyarakat terdapat kecenderungan untuk tidak segera melaporkan kelahiran anaknya guna mendapatkan identitas kelahiran tersebut.
2. Jumlah anak penyandang masalah kesejahteraan sosial seperti anak terlantar dan anak jalanan cukup besar. Permasalahan ini tidak diimbangi dengan perhatian yang cukup memadai dari berbagai elemen masyarakat.
3. Berbagai indikator kesehatan anak masih sangat memprihatinkan seperti rendahnya status gizi anak, status imunisasi, dan cakupan pelayanan kesehatan untuk anak. Secara khusus rendahnya derajat kesehatan masyarakat terutama yang berkaitan dengan anak ini ditunjukkan dengan tingginya angka kematian bayi dan juga angka kematian ibu (melahirkan).
4. Dalam bidang pendidikan, angka partisipasi sekolah terutama untuk tingkat SLTA (kelompok umur 16-18) masih sangat rendah. Selain itu pencapaian program wajar 9 tahun masih jauh dari target. Hal ini ditunjukkan dengan rendahnya angka partisipasi sekolah untuk kelompok umur 13-15 tahun. Sementara itu cakupan program Pendidikan Luar Sekolah (PLS) jauh dari memadai jika dibandingkan dengan permasalahan yang ada yakni tingginya angka buta huruf penduduk dewasa.
5. Anak-anak yang memerlukan perlindungan khusus di Propinsi Lampung meliputi anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang tereksplotasi secara ekonomi dan anak yang mengalami penyalahgunaan seksual. Hingga saat ini anak yang berkonflik hukum yang kemudian resmi menjalani hukuman penjara, ditempatkan menjadi satu dengan narapidana lain yang berumur lebih tua.

Karakteristik masing-masing permasalahan tersebut berbeda-beda dan beberapa diantaranya saling berkaitan. Keterkaitan antar variabel yang menjadi penyebab terjadinya permasalahan tersebut sangat kompleks.

Kemiskinan dalam hal ini bukanlah satu-satunya penyebab melainkan hanya merupakan salahsatu dari faktor penyebab lain. Oleh karena itu penanganan terhadap permasalahan-permasalahan tersebut memerlukan pendekatan komprehensif.

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka beberapa saran (rekemendasi) yang perlu dikemukakan di sini antara lain:

1. Pelaksanaan Sensus Penduduk, SUPAS, SUSENAS, dan berbagai jenis pendataan penduduk lainnya perlu memasukkan perihal identitas kelahiran anak ke dalam instrumen pendataan yang digunakan. Hal ini dimaksudkan sebagai langkah awal penyediaan data tentang kepemilikan identitas kelahiran anak. Untuk meningkatkan jumlah anak yang memiliki akta kelahiran diperlukan program khusus seperti pemberian akte massal dengan prioritas atau sebagai *pilot project* kepada anak-anak panti asuhan.
2. Penanganan terhadap anak terlantar dan anak jalanan memerlukan pendekatan khusus. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak sesuai dengan Konvensi Hak Anak hendaknya menjadi acuan utama dalam upaya tersebut. Untuk itu diperlukan beberapa langkah awal seperti studi banding terhadap model-model penanganan anak jalanan yang dianggap telah berhasil di daerah lain, studi *need assement* terhadap anak jalanan dan juga anak terlantar untuk menentukan model penanganan permasalahan tersebut, pembentukan/pemberdayaan lembaga-lembaga lokal yang ada sehingga mampu mengoptimalkan potensi sumberdaya yang ada seperti misalnya dana yang terkumpul dari BAZIS.
3. Untuk menurunkan angka kematian bayi yang masih cukup tinggi, diperlukan langkah-langkah yang melibatkan banyak sektor di masyarakat. Pendekatan sosial budaya yang selama ini agak terabaikan sebaiknya mendapatkan porsi yang cukup memadai. Hal ini mengingat faktor sosial budaya merupakan faktor yang memberi kontribusi besar dalam pembentukan perilaku sehat khususnya dalam reproduksi.
4. Upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan derajat pendidikan masyarakat antara lain: peningkatan penyediaan prasarana pendidikan dasar dan menengah khususnya untuk daerah terpencil, peningkatan kualitas pendidikan untuk meningkatkan kompetensi, serta perluasan cakupan pendidikan luar sekolah yang dikaitkan dengan program pemberdayaan masyarakat secara umum. Kebijakan afirmatif dalam hal ini perlu dilakukan terutama bagi golongan masyarakat kurang



beruntung yang jumlahnya masih cukup besar. Kebijakan ini ditempuh antara lain melalui pemberian bea siswa, pembebasan biaya pendidikan dan sebagainya. Studi intensif yang bersifat mikro perlu dilakukan untuk mengetahui tingginya angka putus sekolah terutama untuk penduduk kelompok umur 16-18 tahun.

5. Upaya perlindungan khusus bagi anak yang perlu dilakukan antara lain meliputi:

- Penyediaan Lembaga Pemasyarakatan (LP) Khusus untuk anak untuk setiap kabupaten. Sebagai langkah awal dan juga sebagai pilot project, LP tersebut didirikan di Bandar Lampung mengingat jumlah anak berkonflik dengan hukum terbanyak terdapat di kota ini.
- Pemantauan dan penanganan terhadap anak yang tereksplotasi secara ekonomi perlu dilakukan secara terus menerus.
- Pembinaan terhadap anak yang tereksplotasi secara seksual perlu dilakukan dengan menggunakan pendekatan khusus seperti penanganan masalah kasus per kasus (*case by case*) dan tidak secara *general* seperti yang dilakukan selama ini.

Secara umum, data tentang berbagai indikator sesuai dengan Konvensi Hak Anak belum tersedia baik pada tingkat propinsi maupun kabupaten. Keterbatasan tersebut disebabkan karena belum tersedia sistem pendataan yang memadai. Selain itu juga karena "efek samping" pelaksanaan otonomi daerah, yang mengakibatkan daerah kabupaten/kota tidak mempunyai "kewajiban" melaporkan kepada daerah propinsi. Oleh karena itu, di masa mendatang perlu dibangun sistem pendataan yang baik sehingga memungkinkan tersedianya data tentang anak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. 2000. *Indikator Kesejahteraan Anak 1999*. Jakarta.
- Badan Pusat Statistik. 2002. *Profil Kependudukan Provinsi Lampung Tahun 2000*. Jakarta.
- Badan Pusat Statistik Propinsi Lampung. 1999. *Statistik Kriminal Propinsi Lampung 1998*. Bandar Lampung.
- Badan Pusat Statistik Propinsi Lampung. 2000. *Indikator Kesehatan Balita Propinsi Lampung*. Bandar Lampung.
- Badan Pusat Statistik Propinsi Lampung. 2001. *Karakteristik Penduduk Lampung Hasil Sensus Penduduk 2000*. Bandar Lampung.
- Badan Pusat Statistik Propinsi Lampung. 2001. *Proyeksi Penduduk Lampung 2000-2005*. Bandar Lampung.
- Badan Pusat Statistik Propinsi Lampung. 2002. *Lampung dalam Angka 2001*. Bandar Lampung.
- Badan Pusat Statistik Propinsi Lampung. 2002. *Indikator Kesejahteraan Rakyat Propinsi Lampung Tahun 2001*. Bandar Lampung.
- Badan Pusat Statistik Propinsi Lampung. 2002. *Profil Pendidikan Propinsi Lampung. 2001*. Bandar Lampung.
- Badan Pusat Statistik Kota Metro. 2002. *Profil KPA Kota Metro*.
- Badan Pusat Statistik Lampung Barat. 2002. *Lampung Barat dalam Angka 2001*.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2002. *Acuan Menu Pembelajaran pada Penitipan Anak*. Jakarta.
- Effendi, Sofian. 1991. "Kebijaksanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia Menghadapi Era Tinggal Landas". Dalam *Populasi*. No. 1(2). Yogyakarta: Pusat Penelitian Kependudukan, UGM.
- Hatanaka, Maki. 1999. "Makhluk-makhluk Terabaikan di Kota Jakarta: 'Pechun' dan Gaya Hidup Mereka". Dalam *Jurnal Perempuan*. Edisi 09. November 1998-Januari 1999.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan R.I. 2002. *Rencana Induk Pembangunan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak (RIP-KPA)*. Jakarta.
- Mantra, Ida Bagus. 1991. "Profil Penduduk Indonesia Menjelang Era Tinggal Landas". Dalam *Populasi*. No. 1 (2) Yogyakarta: P3PK Univ. Gadjah Mada.
- Muis, Fatimah. 1988. "Pemantauan Pertumbuhan dan Keadaan Gizi Balita di Dua Desa Jawa Tengah". Dalam Masri Singarimbun (ed). *Kelangsungan Hidup Anak*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

- Nachrowi, Nachrowi D. dan Alahudin A. Muhidin. 1997. "Pekerja Anak dan Industrialisasi". Dalam *Prisma*. No. 2 Februari 1997. Jakarta: LP3ES.
- Ross, David A. 1988. "Apakah Latihan Dukun Bayi Dapat Mencegah Tetanus Neonatal?". Dalam Masri Singarimbun (ed). *Kelangsungan Hidup Anak*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Tjiptoherijanto, Prijono dan Sutyastutie Sumitro. 1998. *Pemberdayaan Penduduk dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Citra Putra Bangsa.
- Tukiran. 1992. "Kualitas Sumber Daya Manusia di Indonesia: Suatu Tinjauan Tentang IMH dan IPM". Makalah Seminar Nasional *Kualitas Sumber Daya Manusia dan Pembangunan Berwawasan Lingkungan*, PAU, Studi Sosial, Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta. 28-29 April 1992.
- White, Ben dan Indrasari Tjandraningsih. 1998. *Child Workers in Indonesia*. Bandung: Yayasan Akatiga.

# Lampiran

## **ASPEK-ASPEK KONVENSI HAK ANAK (KHA)**

### **1. Hak-hak Sipil dan Kebebasan**

#### **a. Nama dan Kebangsaan**

Anak didaftarkan segera setelah kelahiran dan sejak lahir berhak atas sebuah nama, berhak memperoleh kewarganegaraan dan sejauh yang memungkinkan berhak dipelihara oleh orangtuanya.

#### **b. Mempertahankan Identitas**

Anak berhak untuk mempertahankan identitasnya, termasuk kewarganegaraan, nama dan hubungan keluarga sebagaimana diakui oleh Undang-undang tanpa campur tangan yang sah.

#### **c. Bebas Menyatakan Pendapat**

Anak berhak untuk secara bebas menyatakan pendapat, hal ini akan mencakup kebebasan yang terlepas dari pembebasan untuk meminta, menerima dan memberi informasi dan gagasan dalam segala jenis, baik secara lisan, tertulis atau cetakan, dalam bentuk seni atau melalui media lain menurut pilihan anak yang bersangkutan. Penggunaan hak ini dapat disertai pembatasan-pembatasan tertentu, tetapi pembatasan ini hanya dapat ditetapkan oleh undang-undang yang diperlukan untuk menghormati hak atau reputasi orang lain dan/atau untuk melindungi keamanan nasional atau ketertiban umum, kesehatan umum, dan moral.

#### **d. Memperoleh Informasi yang Tepat**

Anak berhak untuk memperoleh informasi dan bahan berbagai sumber nasional dan internasional, terutama sumber-sumber yang dimaksudkan untuk meningkatkan kehidupan sosial, spiritual dan moralnya serta untuk kesehatan rohani dan jasmaninya. Untuk kepentingan ini perlu dilakukan upaya mendorong media massa

untuk menyebarluaskan informasi dan bahan yang bermanfaat dari segi sosial dan budaya yang sesuai dengan tingkat perkembangan anak, selain itu, kerjasama internasional juga perlu untuk pengadaan, pertukaran dan penyebarluasan informasi dari berbagai sumber kebudayaan internasional dan nasional, pengadaan dan penyebarluasan buku-buku anak, serta mengupayakan perlindungan anak dari informasi dan bahan-bahan yang berbahaya bagi kehidupannya, baik secara sosial, moral, maupun fisiknya.

e. **Kemerdekaan Berpikir, Berhati Nurani dan Beragama**

Anak berhak atas kemerdekaan berpikir, hati nurani, dan beragama, juga menghormati hak dan kewajiban orang tua untuk memberi pengarahan kepada anak dalam menerapkan haknya dengan cara yang sesuai dengan perkembangan anak. Namun demikian negara juga menggariskan agar manifestasi kebebasan tersebut harus tunduk pada pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang yang diperlukan untuk melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan umum, moral, hak asasi dan kebebasan orang lain.

f. **Kemerdekaan Berserikat dan Kemerdekaan Berkumpul dengan Damai**

Anak berhak atas kemerdekaan berserikat dan kemerdekaan berkumpul dengan damai. Untuk ini, tidak ada pembatasan apapun yang dikenakan untuk melakukan hak-hak tersebut selain yang ditetapkan undang-undang yang diperlukan di dalam masyarakat yang demokratis demi kepentingan nasional atau keselamatan umum, ketertiban umum, moral atau untuk melindungi hak dan kemerdekaan orang lain.

g. **Melindungi Kehidupan Pribadi**

Tidak seorang anakpun akan tunduk pada campur tangan sewenang-wenang dan tidak sah atas kehidupan pribadinya, keluarga, rumahtangganya, atau serangan-serangan yang tidak sah atas kehormatan dan reputasinya. Sehubungan dengan hak ini, anak berhak atas perlindungan hukum terhadap campur tangan atau serangan seperti ini.

**h. Hak Untuk Tidak Disiksa atau Diperlakukan dengan Kejam, Perlakuan atau Hukuman yang Tidak Manusiawi atau Menurunkan Martabat.**

Tak seorang anakpun boleh menjalani siksaan atau perlakuan yang kejam atau hukuman yang tidak manusiawi atau yang menurunkan martabat. Hukuman mati dan hukuman seumur hidup tidak akan dijatuhkan tanpa kemungkinan pembebasan untuk kejahatan yang dilakukan anak.

**2. Lingkungan Keluarga dan Perawatan Alternatif**

**a. Bimbingan Orang Tua**

Negara menghormati tanggungjawab, hak dan kewajiban orangtua atau para anggota keluarga besar (bila dapat diterapkan) atau masyarakat sebagaimana yang ditentukan oleh adat istiadat setempat, wali yang sah atau orang lain yang secara hukum bertanggungjawab atas anak yang bersangkutan untuk memberi pengarahan dan bimbingan yang layak kepada anak dalam penerapan hak-haknya yang diakui oleh Undang-Undang No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak dan Konvensi Hak-Hak Anak (KHA), dengan cara yang sesuai dengan kemampuannya.

**b. Tanggungjawab Orang Tua**

Negara akan membuat upaya terbaik untuk menjamin pengakuan atas prinsip bahwa kedua orangtua memikul tanggung jawab bersama untuk membesarkan dan mengembangkan anak. Orang tua atau walinya yang sah memikul tanggungjawab utama untuk membesarkan dan mengembangkan anak yang bersangkutan. Kepentingan terbaik anak akan menjadi perhatian utama. Untuk menjamin dan meningkatkan hak-hak anak yang dinyatakan dalam Konvensi ini, negara akan memberikan bantuan yang layak kepada orangtua atau wali yang sah dalam pelaksanaan tanggungjawab membesarkan anak dan akan menjamin pengembangan lembaga-lembaga, fasilitas, dan pelayanan untuk memelihara anak.

**c. Seorang Anak Berhak untuk Tidak Dipisahkan dari Orang Tua**

Anak berhak untuk tidak akan dipisahkan dari orangtuanya bertentangan dengan keinginan anak, kecuali bila penguasa yang berwenang yang tunduk pada peninjauan kembali oleh pengadilan menetapkan, sesuai dengan undang-undang dan prosedur yang berlaku, bahwa pemisahan tersebut diperlukan untuk kepentingan yang terbaik dari anak itu sendiri. Penetapan seperti itu mungkin diperlukan dalam kasus khusus seperti kasus yang melibatkan penyalahgunaan atau penelantaran anak oleh orangtuanya, atau kasus dimana kedua orangtuanya terpisah, dan sesuatu keputusan yang harus menetapkan tempat tinggal anak tersebut. Untuk anak yang terpaksa terpisah dari orang tuanya, negara menjamin untuk mempertahankan hubungan pribadi dan hubungan langsung secara tetap dengan kedua orang-tuanya, kecuali hal ini bertentangan dengan kepentingan terbaik anak.

**d. Penyatuan Kembali Keluarga**

Upaya penyatuan kembali anak dengan keluarganya dilakukan dengan cara yang positif, cepat, dan manusiawi. Lebih jauh negara menjamin bahwa permintaan penyatuan kembali keluarga tersebut tidak akan membawa akibat yang merugikan bagi pemohon dan bagi anggota keluarganya.

**e. Pemulihan Pemeliharaan Anak**

Negara akan mengambil langkah-langkah yang layak untuk menjamin pemulihan pemeliharaan anak dari orang tua atau orang lain yang memikul tanggungjawab keuangan atas anak.

**f. Anak Berhak Mendapatkan Dukungan dari Lingkungan Keluarga**

Seorang anak yang kehilangan lingkungan keluarga baik sementara maupun tetap atau untuk kepentingan terbaik bagi anak, akan berhak memperoleh dukungan dan bantuan dari negara, dan negara menjamin pemeliharaan alternatif untuk anak tersebut yang meliputi antara lain penitipan anak, adopsi atau penempatan pada panti-panti yang sesuai.



**g. Adopsi**

Negara mengakui dan/atau membolehkan sistem adopsi yang dapat menjamin bahwa kepentingan terbaik anak yang bersangkutan dapat merupakan pertimbangan yang paling utama.

**h. Memberantas Penyerahan Anak ke Luar Negeri yang Dilakukan Secara Gelap dan Tidak Dapat Kembali**

Untuk memberantas penyerahan anak ke luar negeri yang dilakukan secara gelap dan tidak dapat kembali tersebut, negara akan meningkatkan persetujuan-persetujuan bilateral, dan multilateral, atau penambahan pasal atau ayat atas persetujuan-persetujuan yang ada.

**i. Penyalahgunaan dan Penelantaran**

Negara akan mengambil langkah-langkah legislatif administratif, sosial dan pendidikan yang layak guna melindungi anak dari semua bentuk kekerasan fisik atau mental, penyalahgunaan atau perlakuan salah dan penelantaran, tindakan melalui anak, atau eksploitasi termasuk penyalahgunaan seksual, sementara mereka dalam pemeliharaan orang tua, wali yang sah, atau setiap orang lain yang memelihara anak tersebut. Langkah-langkah tersebut juga dilengkapi dengan upaya pencegahan dan upaya identifikasi, pelaporan, rujukan, pemeriksaan, perlakuan dan tindak lanjut dari pemeliharaan tersebut.

**j. Peninjauan Kembali Secara Periodik Penempatan Anak**

Anak berhak untuk ditempatkan oleh penguasa yang berwenang untuk tujuan pemeliharaan, perlindungan atau perawatan kesehatan rohani dan jasmaninya yang ditinjau secara berkala yang diberikan kepada anak tersebut dan semua keadaan lain yang terkait dengan penempatannya itu.

### 3. Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

#### a. Kelangsungan Hidup dan Pengembangan Anak

Negara semaksimal mungkin akan menjamin kelangsungan hidup dan pengembangan anak.

#### b. Anak yang Cacat Fisik dan Mental Hendaknya Menikmati Kehidupan Penuh dan Layak

Anak yang cacat fisik dan mental berhak untuk menikmati kehidupan penuh dan layak, dalam keadaan-keadaan yang menjamin martabat, meningkatkan percaya diri dan mempermudah peran aktif anak dalam masyarakat. Negara juga mengakui kebutuhan-kebutuhan khusus anak cacat, bantuan yang diberikan untuk pemeliharaan khusus sesuai dengan sumber yang tersedia yang akan diberikan secara cuma-cuma, atau bila mungkin dengan memperhatikan sumber-sumber keuangan orangtua atau orang lain yang memelihara anak yang bersangkutan.

Bantuan yang diberikan akan dirancang sedemikian rupa untuk menjamin bahwa anak cacat bisa memperoleh dan menerima pendidikan, pelatihan, pelayanan kesehatan, pelayanan pemulihan, persiapan untuk lapangan pekerjaan dan kesempatan untuk rekreasi dengan cara membantu anak untuk mencapai integrasi sosial sepe-nuh mungkin dan pengembangan individu termasuk pengembangan budaya dan rohaninya. Negara juga menjamin untuk meningkatkan kerjasama internasional, pertukaran informasi yang layak dalam bidang pelayanan kesehatan, pencegahan dan perawatan medis, psikologis, dan fungsional anak-anak cacat termasuk penyebaran dan akses pada informasi-informasi mengenai metoda-metoda pemulihan, pendidikan, dan pelayanan-pelayanan kejuruan untuk meningkatkan kemampuan dan ketrampilan mereka.

#### c. Kesehatan dan Pelayanan Kesehatan

Anak berhak untuk memperoleh pelayanan perawatan kesehatan dan pemulihan kesehatan, sesuai dengan hal tersebut negara akan

mengupayakan untuk mengurangi kematian bayi dan anak, menjamin pengadaan bantuan kesehatan dan perawatan, memberantas penyakit dan kekurangan gizi, menjamin perawatan kesehatan ibu sebelum dan sesudah melahirkan, menjamin penyampaian informasi, pendidikan, dan dukungan dalam penggunaan pengetahuan dasar kesehatan anak dan gizi serta manfaat pemberian Air Susu Ibu (ASI), kebersihan, penyehatan lingkungan dan pencegahan kecelakaan.

**d. Jaminan Sosial dan Pelayanan Perawatan Anak serta Fasilitas**

Anak berhak untuk memperoleh manfaat dari jaminan sosial, termasuk asuransi sosial dan akan mengambil langkah-langkah yang perlu guna mencapai perwujudan sepenuhnya dan hak ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Negara juga akan mengambil langkah-langkah yang layak untuk menjamin bahwa anak yang kedua orangtuanya berhak untuk memperoleh manfaat dari jasa pelayanan pemeliharaan anak (penitipan anak) sesuai dengan persyaratan.

**e. Hak Setiap Anak atas Tingkat Kehidupan**

Anak berhak atas tingkat kehidupan yang layak untuk pengembangan fisik, mental, spiritual, dan moral.

**4. Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya**

**a. Pendidikan yang Meliputi Bimbingan dan Pelatihan Ketrampilan**

Anak berhak atas pendidikan, mencapai hak ini secara bertahap dan berdasarkan kesempatan yang sama. Mengambil langkah-langkah yang tepat untuk memastikan bahwa disiplin sekolah dilaksanakan dengan cara yang lebih sesuai dengan martabat kemanusiaan anak sejalan dengan Konvensi Hak Anak.

## **b. Tujuan Pendidikan**

Negara menjamin bahwa pendidikan anak akan diarahkan pada pengembangan kepribadian anak, bakat dan kemampuan mental dan fisik sampai mencapai potensi mereka sepenuhnya, pengembangan sikap hormat kepada orang tua atau ke orang lain yang lebih dewasa, identitas budaya, bahasa dan nilai-nilai serta peradabannya sendiri serta peradaban yang berbeda dari peradabannya, mempersiapkan anak untuk kehidupan yang bertanggung-jawab dengan semangat pengertian, perdamaian, tenggang rasa, kesetaraan, persaudaraan antar etnis, bangsa dan agama, serta menjauhkan diri dari sikap konflik psiko sosial.

## **c. Pemanfaatan Waktu Luang, Kegiatan Rekreasi dan Budaya**

Anak berhak untuk beristirahat dan bersantai, bermain dan turut serta dalam kegiatan-kegiatan rekreasi yang sesuai dengan usianya dan untuk turut serta secara bebas dalam kegiatan budaya dan seni. Untuk itu negara mendorong pengadaan peluang yang layak dan sama untuk kegiatan-kegiatan budaya, seni, santai, dan rekreasi.

## **5. Upaya-upaya Perlindungan Khusus**

### **a. Anak dalam Situasi Darurat**

#### **1) Anak Pengungsi Berhak Untuk Dilindungi**

Negara akan mengambil langkah-langkah yang layak untuk menjamin anak yang mempunyai status pengungsi atau yang dianggap sebagai pengungsi sesuai dengan prosedur dan hukum yang berlaku baik didampingi maupun tidak didampingi orangtuanya atau orang lain, akan memperoleh perlindungan dan bantuan kemanusiaan yang layak dalam menikmati hak-haknya.

#### **2) Anak Berhak Dilindungi dalam Situasi Konflik Bersenjata**

Negara berupaya untuk menghormati dan menjamin penghargaan terhadap ketentuan-ketentuan hukum kemanusiaan internasional dan yang berlaku bagi anak-anak dalam masa konflik

bersenjata. Negara akan mengambil langkah-langkah guna menjamin bahwa mereka yang belum mencapai usia 15 tahun tidak terlibat langsung dalam permusuhan. Selain itu, negara akan mengambil langkah-langkah untuk menjamin perlindungan dan pemeliharaan bagi anak-anak yang terpengaruh oleh suatu konflik bersenjata. Untuk anak-anak yang menjadi korban dari setiap bentuk penelantaran, eksploitasi, penyiksaan atau setiap bentuk kekejaman atau perlakuan penghukuman yang tidak manusiawi atau merendahkan martabat, negara akan meningkatkan pemulihan rohani, jasmani dan penyatuan kembali dalam masyarakat.

#### **b. Anak dalam Konflik dengan Hukum**

- 1) Hak Setiap Anak untuk Diperlakukan dengan Baik Apabila Melanggar Hukum Sesuai dengan Martabat dan Nilai Anak**  
Anak yang diduga, dituduh atau diakui sebagai telah melanggar Undang-Undang Hukum Pidana (KUH Pidana), berhak untuk diperlakukan dengan cara yang sesuai dengan peningkatan martabat dan nilai-nilai anak yang memperkuat penghargaan pada hak asasi manusia dan kebebasan dasar dari orang lain dengan memperhatikan usia anak dan hasrat untuk meningkatkan penyatuan kembali hak anak dalam masyarakat.
- 2) Anak Berhak Mendapatkan Kemerdekaan**  
Anak berhak untuk tidak dirampas kemerdekaannya secara tidak sah atau sewenang-wenang. Oleh karena itu, setiap anak yang dirampas kemerdekaannya akan diperlakukan secara manusiawi dan dihormati martabat kemanusiaannya dengan memperhatikan kebutuhan orang seusianya.
- 3) Hukuman Anak**  
Tidak seorangpun boleh menjalani siksaan atau perlakuan yang kejam, perlakuan atau hukuman yang tidak manusiawi atau menurunkan martabat. Hukuman mati dan hukuman seumur hidup tidak akan dijatuhkan tanpa kemungkinan pembebasan untuk kejahatan yang dilakukan oleh anak.

- 4) **Pemulihan Fisik, Psikologis dan Reintegrasi**  
Negara akan mengambil langkah-langkah yang layak untuk meningkatkan pemulihan rohani dan jasmani dan penyatuan kembali dalam masyarakat seorang anak yang menjadi korban.

**c. Anak dalam Situasi Eksploitasi**

- 1) **Eksploitasi Ekonomi**

Anak berhak untuk dilindungi terhadap eksploitasi ekonomi dan terhadap pelaksanaan setiap pekerjaan yang mungkin berbahaya atau mengganggu pendidikan, atau merugikan kesehatan anak atau perkembangan fisik, mental, spiritual, moral atau sosial anak.

- 2) **Penyalahgunaan Obat**

Negara akan mengambil langkah-langkah yang layak termasuk langkah-langkah legislatif, administratif, sosial dan pendidikan guna melindungi anak dari pemakaian obat-obatan narkotika dan zat-zat psiktropika seperti yang ditetapkan dalam perjanjian-perjanjian yang relevan dan untuk mencegah penggunaan anak dalam pembuatan dan pengedaran secara gelap zat-zat tersebut.

- 3) **Penyalahgunaan Seks**

Negara berusaha untuk melindungi anak dari segala bentuk eksploitasi seksual dan penyalahgunaan seksual. Untuk tujuan ini, negara khususnya akan mengambil langkah-langkah yang layak baik bilateral maupun multilateral untuk mencegah bujukan atau paksaan agar anak terlibat dalam kegiatan seksual yang tidak sah, eksploitasi anak dalam pelacuran, dan eksploitasi anak dalam pertunjukan-pertunjukan dan perbuatan-perbuatan yang bersifat pornografis.

- 4) **Bentuk-bentuk Eksploitasi Lain**

Negara akan melindungi anak dari semua bentuk lain dari eksploitasi yang merugikan bagi setiap aspek dari kesejahteraan anak.

**5) Mencegah Penculikan, Penjualan atau Jual Beli Anak untuk Tujuan atau dalam Bentuk Apapun**  
Negara akan mengambil semua langkah yang layak baik secara nasional, bilateral, dan multilateral untuk mencegah penculikan, penjualan, atau jual beli anak untuk tujuan atau dalam bentuk apapun.

**d. Anak dari Kalangan Minoritas Berhak untuk Mengakui dan Menikmati Kehidupannya**

Anak-anak dari kalangan minoritas baik suku bangsa, agama, bahasa atau orang-orang pribumi tidak akan dirampas haknya dalam bermasyarakat dengan anggota lain dari kelompoknya, dijamin haknya untuk menikmati budayanya sendiri, untuk mengakui dan melaksanakan agamanya atau menggunakan bahasanya sendiri.

Tabel L.1  
Jumlah Sekolah, Murid, Guru, Pendidikan dasar dan Menengah Propinsi  
Lampung, Tahun 2001

Tingkat Pendidikan	Indikator				
	Jumlah Sekolah	Jumlah kelas	Jumlah Murid	Jumlah Guru	Rasio Guru - Murid
SD Negeri	4.340		930.155	36.304	1: 26
SD Swasta	164		13.867	1.254	1:11
MI Negeri	48	287	9.254	623	1:15
MI Swasta	575	3.402	68.445	2.772	1:25
SLTP Negeri	306		161.008	17.712	1:16
SLTP Swasta	807		135.008		
MTs Negeri	21	264	10.978	716	1:15
MTs Swasta	433	1.853	64.203	6.133	1:10
SMU Negeri	86		48.195	2.874	1:17
SMU Swasta	171		41.381	3.000	1:14
SMK Negeri	19		11.091	3.385	1:3
SMK Swasta	149		58.849	14.716	1:4
MA Negeri	12	302	7.471	459	1:16
MA Swasta	127	420	11.233	1.543	1:7
Pondok Pesantren	388	-	46.627	3.520	1:13

Sumber: BPS Propinsi Lampung, Lampung dalam Angka 2001 (diolah kembali).



Tabel L.2  
 Persentase Penduduk Usia 7-12 tahun Propinsi Lampung Menurut Kabupaten/Kota,  
 jenis Kelamin, dan Partisipasi Sekolah, Tahun 2001

Kabupaten/Kota	jenis Kelamin								
	Laki-laki				Perempuan				
	Partisipasi Sekolah				Partisipasi Sekolah				
	Tidak/Bim pernah sekolah	Masih Bersekolah	Tidak Bersekolah lagi	Jumlah	Tidak/Bim pernah sekolah	Masih Bersekolah	Tidak Bersekolah lagi	Jumlah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
Lampung Barat	5,13	94,40	0,47	100,00	3,19	95,61	1,20	100,00	
Tanggamus	3,06	95,19	1,75	100,00	3,19	95,82	1,00	100,00	
Lampung Selatan	3,77	94,07	2,16	100,00	4,17	95,29	0,54	100,00	
Lampung Timur	1,54	98,08	0,38	100,00	1,68	97,90	0,42	100,00	
Lampung Tengah	1,71	97,95	0,34	100,00	1,19	98,02	0,79	100,00	
Lampung Utara	1,47	96,56	1,96	100,00	1,83	98,17	-	100,00	
Way Kanan	3,21	95,26	0,53	100,00	2,52	96,86	0,63	100,00	
Tulang Bawang	2,93	96,53	0,54	100,00	0,64	98,72	0,64	100,00	
Bandar Lampung	1,19	97,53	1,28	100,00	-	97,77	2,23	100,00	
Metro	1,73	98,27	-	100,00	0,90	98,65	0,45	100,00	
<b>Jumlah</b>	<b>2,57</b>	<b>96,32</b>	<b>1,11</b>	<b>100</b>	<b>2,18</b>	<b>97,03</b>	<b>0,79</b>	<b>100,00</b>	

Sumber: SUSENAS, 2001 dalam BPS Propinsi Lampung.  
 Profil Pendidikan Propinsi Lampung, 2001.

Tabel L.3  
 Persentase Penduduk Usia 13-15 tahun Propinsi Lampung Menurut Kabupaten/Kota, Jenis Kelamin,  
 dan Partisipasi Sekolah, Tahun 2001.

Kabupaten/Kota	Jenis Kelamin								
	Laki-laki				Perempuan				
	Partisipasi Sekolah				Partisipasi Sekolah				
	Tidak/Bim pernah sekolah	Masih Bersekolah	Tidak Bersekolah lagi	Jumlah	Tidak/Bim pernah sekolah	Masih Bersekolah	Tidak Bersekolah lagi	Jumlah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
Lampung Barat	-	84,83	15,17	100,00	-	89,29	10,71	100,00	
Tanggamus	-	82,68	17,32	100,00	-	80,23	19,77	100,00	
Lampung Selatan	-	75,60	24,40	100,00	-	82,16	17,84	100,00	
Lampung Timur	0,74	78,90	20,36	100,00	0,84	91,21	7,94	100,00	
Lampung Tengah	0,71	80,12	19,17	100,00	0,80	82,32	16,87	100,00	
Lampung Utara	1,12	79,70	19,18	100,00	1,02	86,22	12,77	100,00	
Way Kanan	-	84,78	15,22	100,00	1,23	88,89	9,88	100,00	
Tulang Bawang	-	76,71	23,29	100,00	2,68	71,32	26,00	100,00	
Bandar Lampung	-	88,84	11,16	100,00	-	86,83	13,17	100,00	
Metro	0,84	95,64	3,53	100,00	-	97,49	2,51	100,00	
<b>Jumlah</b>	<b>0,31</b>	<b>80,73</b>	<b>18,96</b>	<b>100</b>	<b>0,67</b>	<b>88,83</b>	<b>15,51</b>	<b>100,00</b>	

Sumber: SUSENAS, 2001 dalam BPS Propinsi Lampung.  
 Profil Pendidikan Propinsi Lampung, 2001.

Tabel L.4  
 Persentase Penduduk Usia 16-18 tahun Propinsi Lampung Menurut Kabupaten/Kota, Jenis Kelamin,  
 dan Partisipasi Sekolah, Tahun 2001

Kabupaten/Kota	jenis Kelamin								
	Laki-laki					Perempuan			
	Partisipasi Sekolah					Partisipasi Sekolah			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
	Tidak/Bim pernah sekolah	Masih Bersetelah	Tidak Bersetelah lagi	Jumlah	Tidak/Bim pernah sekolah	Masih Bersetelah	Tidak Bersetelah lagi	Jumlah	
Lampung Barat	-	36,99	61,01	100,00	1,58	54,12	44,31	100,00	
Tanggamus	-	46,32	53,68	100,00	-	56,46	43,54	100,00	
Lampung Selatan	2,19	44,24	53,57	100,00	-	54,53	45,47	100,00	
Lampung Timur	-	43,25	56,75	100,00	0,85	48,56	50,59	100,00	
Lampung Tengah	0,68	39,14	60,18	100,00	-	43,87	56,13	100,00	
Lampung Utara	-	52,66	47,34	100,00	1,20	55,34	43,46	100,00	
Way Kanan	-	25,86	74,14	100,00	-	28,57	71,43	100,00	
Tulang Bawang	1,54	44,30	54,16	100,00	1,51	41,38	57,11	100,00	
Bandar Lampung	-	65,47	34,53	100,00	-	69,22	30,78	100,00	
Metro	-	88,30	11,70	100,00	-	87,96	12,04	100,00	
<b>Jumlah</b>	<b>0,61</b>	<b>46,83</b>	<b>52,56</b>	<b>100</b>	<b>0,44</b>	<b>52,35</b>	<b>47,21</b>	<b>100,00</b>	

Sumber: SUSENAS, 2001 dalam BPS Propinsi Lampung.  
 Profil Pendidikan Propinsi Lampung, 2001.

Tabel L.5  
Tahapan Keluarga Hasil Pendataan Keluarga Propinsi Lampung Tahun 2001 s.d. 2002

Kabupaten/Kota	Tahun	Tahapan keluarga										Juml. KK	% PS & KS I A E
		Pra Sejahtera		KS I		KS II	KS III	KS III +	KS III +	KS III +	KS III +		
		AE	BAE	AE	BAE								
Lampung Selatan	2001	78.711	25.194	50.875	39.224	50.918	20.159	2.633	267.714	48,40			
	2002	87.035	25.423	52.878	38.385	52.313	20.138	2.810	278.980	50,15			
Lampung Tengah	2001	42.518	36.301	35.218	36.088	65.757	39.053	3.235	248.170	30,11			
	2002	41.941	36.726	34.755	39.295	66.588	38.946	3.240	261.491	29,33			
Lampung Utara	2001	35.198	9.783	31.761	16.842	27.782	4.689	245	126.300	53,02			
	2002	36.392	9.956	32.488	16.888	27.987	4.746	242	128.699	53,52			
Bandar Lampung	2001	17.793	3.155	49.450	15.335	27977	25.145	7.453	146.308	45,96			
	2002	26.790	2.329	44.203	14.313	30.905	23.495	6.956	148.992	47,65			
Lampung Barat	2001	12.977	8.575	13.353	12.057	27.521	7.943	238	82.664	31,85			
	2002	15.349	8.498	13.842	11.873	27.561	7.773	245	85.141	34,29			
Tulang Bawang	2001	87.584	24.771	32.050	22.204	11.727	2.005	28	180.369	66,33			
	2002	106.856	17.510	31.725	18.349	14.132	1.722	428	190.722	72,66			
Tanggarnus	2001	55.750	19.917	29.229	22.571	40.815	14.975	2.533	185.790	45,74			
	2002	56.801	20.251	29.949	23.109	41.954	15.161	2.575	189.800	45,71			
Metro	2001	2.948	1.195	3.233	3.803	8.545	6.469	1.327	27.520	22,46			
	2002	2.657	1.146	3.644	3.985	9.075	6.290	1.365	28.162	22,37			
Lampung Timur	2001	56.874	19.432	28.659	30.040	45.501	35.565	4.011	220.082	38,86			
	2002	57.924	20.394	32.100	30.204	45.698	35.732	4.016	226.068	39,82			
Way Kanan	2001	39.563	4.441	23.183	7.858	12.442	639	45	88.171	71,16			
	2002	44.303	4.432	22.536	7.969	11.745	685	46	91.716	72,87			
Propinsi	2001	429.916	152.764	297.011	206.022	318.985	156.642	21.748	1.583.088	45,92			
	2002	476.048	146.665	298.121	204.370	327.956	154.888	21.923	1.629.711	47,50			

Sumber: BKKBN Propinsi Lampung, 2003.

Keterangan: 1. AE: Alasan Ekonomi 2. BAE: Bukan Alasan Ekonomi

Tabel L.6  
 Hasil Pemantauan Status Gizi (PSG) Balita Propinsi Lampung Berdasarkan Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota, Tahun 2002

Kabupaten/ Kota	Jml. Kec.	Juml. Balita daerah	Status Gizi														
			Laki-laki						Perempuan						Laki-laki + Perempuan		
			Brk	Krg	Baik	Lbh	Jml	Brk	Krg	Baik	Lbh	Juml	Brk	Krg	Baik	Lbh	Juml
Metro	5	2.309	11	125	942	26	1104	3	134	1041	27	1205	14	259	1983	53	2309
L. Timur	4	4.477	4	249	1936	67	2256	11	197	1944	69	2221	15	446	3880	136	4477
B. Lampung	13	4.603	32	303	1949	65	2349	19	251	1913	71	2254	51	554	3862	136	4603
L. Tengah	26	7.939	16	253	3699	38	4006	25	280	3597	31	3933	41	533	7296	69	7939
L. Barat	14	6.508											117	751	5573	67	6508
L. Utara	16	3.436											18	721	2294	403	3436
Tanggarnus	11	9.216	130	564	3624	137	4455	127	566	3935	133	4761	257	1130	7559	270	9216
L. Selatan	10	3.328	53	253	1300	25	1631	48	249	1363	37	1697	101	502	2663	62	3328
W. Kanan *)	9	2.520	13	142	1088	26	1269	11	141	1069	30	1251	24	283	2157	56	2520
T. Bawang *)	14	6.355	24	527	2662	59	3272	61	505	2462	55	3083	85	1032	5124	114	6355
Propinsi	122	50.691	283	2416	17200	443	20842	305	2323	17324	453	20405	723	6211	42391	1365	50691

Sumber: Dinas Kesehatan Propinsi Lampung, 2002.

Tabel L.7

Persentase Status Gizi Hasil Pemantauan Status Gizi (PSG) Balita Propinsi Lampung Berdasarkan Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota, Tahun 2002

Kabupaten/ Kota	Jml. Kec	Juml. Balita diukur	Status Gizi														
			Laki-laki						Perempuan								
			Brk	Krg	Baik	Lbh	Jml	Brk	Krg	Baik	Lbh	Juml	Brk	Krg	Baik	Lbh	Juml
Metro	5	2.309	1,00	11,32	85,33	2,36	47,81	0,25	11,12	86,39	2,24	52,19	0,61	11,22	85,87	2,30	100
L. Timur	4	4.477	0,18	11,04	85,82	2,97	50,39	0,50	8,87	87,53	3,11	49,61	0,34	9,96	86,67	3,03	100
B. Lampung	13	4.603	1,36	12,90	82,97	2,77	51,03	0,84	11,14	84,87	3,15	88,97	1,11	12,04	83,90	2,95	100
L. Tengah	26	7.939	0,40	6,32	92,34	0,95	50,46	0,64	7,12	91,46	0,79	49,54	0,52	6,71	91,90	0,87	100
L. Barat	14	6.508											1,80	11,50	85,60	1,00	100
L. Utara	16	3.436											0,5	21,50	66,80	11,7	100
Tanggamus	11	9.216	2,92	12,66	81,35	3,08	48,34	2,67	11,89	82,65	2,79	51,66	2,79	12,26	82,02	2,93	100
L. Selatan	10	3.328	3,25	15,51	79,71	1,53	49,01	2,83	14,67	80,32	2,18	50,99	3,03	15,08	80,02	1,86	100
W. Kanan *)	9	2.520	1,02	11,19	85,74	2,05	50,36	0,88	11,27	85,45	2,40	49,64	0,95	11,23	85,60	2,22	100
T. Bawang *)	14	6.355	0,73	16,11	81,36	1,80	51,49	1,98	16,38	79,86	1,78	48,51	1,34	16,24	80,63	1,79	100
Propinsi	122	50.691	1,39	11,88	84,55	2,18	40,13	1,49	11,38	84,90	2,22	40,25	1,43	12,25	83,83	2,69	100

Sumber: Dinas Kesehatan Propinsi Lampung, 2002.

Tabel L.8  
Jumlah Siswa SLB SDLB Se Propinsi Lampung, Tahun 2003

Nama Sekolah	Jumlah Pendidikan																							
	Jur. A						Jur. B						Jur. C						Jumlah Murid					
	TK	SD	TK	SD	TK	SD	TK	SD	TK	SD	TK	SD	TK	SD	TK	SD	TK	SD						
SLB Dharma Bakti			7	28	12	59					6				13	6	6	0	3	8	148			
SLB PKK Sukarame			24	26	4	56															110			
SLB Wiyata Dharma			6	16	16	22															60			
SLB Bina Insani	15																				15			
SDLB Pringsewu	1	2	8	4		29															44			
SDLB Punggur				21		16	10			6	0	13	6	0	3	8	0				53			
SDLB Kota Bumi				8		16															24			
<b>Jumlah</b>	<b>1</b>	<b>17</b>	<b>45</b>	<b>103</b>	<b>48</b>	<b>182</b>	<b>10</b>			<b>12</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>654</b>			

Sumber: Dinas Pendidikan Propinsi Lampung, 2003.

Tabel L.9  
 Jumlah Mengulang Kelas, Putus Sekolah, dan Nilai Ujian Akhir Sekolah (NUAS) Tingkat SD/MI  
 Propinsi Lampung, TA 2002/2003

Kabupaten/Kota	Mengulang Tahun 2002/2003			Putus Sekolah Tahun 2002/2003			Jumlah Siswa Tahun 2002/2003			Nilai Ujian Akhir Sekolah (NUAS)		
	SD	MI	Jumlah	SD	MI	Jumlah	SD	MI	Jumlah	SD	MI	ME
Bandar Lampung	3.177	386	3.563	322	151	473	83.715	9.919	93.634	624.00		542.00
Lampung Selatan	313	81	394	273	64	337	161.413	18.834	180.247	606.00		599.00
Lampung Tengah	9.445	159	9.604	361	53	414	150.538	2.716	153.254			
Lampung Utara	2.197	95	2.292	41	5	46	97.728	4.635	102.363	35.10		16.39
Lampung Barat	1.335	46	1.381	261	14	275	51.407	4.547	55.954	97.00		4.15.
Tanggamus	7.388	254	7.642	291	42	333	118.851	10.073	128.924	0.00		0.00
Tulang Bawang	5.087	81	5.168	930	38	968	121.449	2.194	123.643			
Lampung Timur	6.991	196	7.187	636	184	820	110.413	13.332	123.745	57.00		58.00
Metro	631	62	693	33	9	42	12.998	845	13.843	44.41		49.68
Way Kanan	3.225	21	3.246	1.101	71	1.172	60.260	3.133	63.393	6.04		0.00
Jumlah	39.789	1.361	41.150	4.249	631	4.880	968.772	70.228	1.039.000	183.69		158.65

Sumber: Dinas Pendidikan Propinsi Lampung 2003.



Tabel L.10  
 Angka Mengulang dan Putus Sekolah Tingkat Pendidikan Dasar  
 Propinsi Lampung, T.A 2002/2003

Kabupaten/Kota	Angka Mengulang (AU)			Angka Putus Sekolah (APS)			Angka Mengulang (AU)			Angka Putus Sekolah (APS)			Tingkat Dikdas	
	SD	MI	SD+MI	SD	MI	SD+MI	SLTP	MTs	SLTP+MTs	SLTP	MTs	SLTP+MTs	AU	APS
Bandar Lampung	3,80	3,89	3,81	0,38	1,52	0,51	0,25	1,53	0,36	0,30	2,73	0,51	2,84	0,51
Lampung Selatan	0,19	0,43	0,22	0,17	0,34	0,19	0,17	0,24	0,19	0,24	0,52	0,32	0,21	0,22
Lampung Tengah	6,27	5,85	6,27	1,24	1,95	0,27	0,13	0,15	0,13	0,67	0,81	0,69	4,61	0,38
Lampung Utara	2,25	2,05	2,24	0,04	0,11	0,04	1,04	4,19	1,69	1,02	4,62	1,77	2,12	0,44
Lampung Barat	2,60	1,01	2,47	0,51	0,31	0,49	0,08	0,09	0,09	0,20	0,49	0,29	2,00	0,45
Tanggamus	6,22	2,52	5,93	0,24	0,42	0,26	0,10	0,08	0,10	0,48	0,19	0,41	4,46	0,30
Tulang Bawang	4,19	3,69	4,18	0,77	1,73	0,78	0,27	0,17	0,25	1,25	2,32	1,43	3,39	0,91
Lampung Timur	6,33	1,47	5,81	0,58	1,38	0,66	0,20	0,22	0,21	0,84	0,14	0,65	4,26	0,66
Metro	4,85	7,34	5,01	0,25	1,07	0,30	0,85	0,44	0,78	1,25	0,88	1,19	4,32	0,45
Way Kanan	5,35	0,67	5,12	1,83	2,27	1,85	0,21	0,49	0,27	0,70	2,53	1,06	4,17	1,69
Rata-rata	4,11	1,97	3,96	0,44	0,90	0,47	0,26	0,60	0,34	0,63	1,12	0,74	3,08	0,53

Sumber: Dinas Pendidikan Propinsi Lampung, 2003.

Tabel L.11  
 Daftar Lembaga Penerima Dana Bantuan Program PADU  
 Propinsi Lampung, Tahun 2002

Nama Lembaga	Kabupaten	Jumlah Siswa	Keterangan
1. PADU Terintegrasi Posyandu "Cempaka"	B. Lampung	20	Rintisan
2. TPA "Intan Pertiwi"	B. Lampung	16	Rintisan
3. Kelompok Bermain "Mutlara"	B. Lampung	15	Rintisan
4. PADU TPQ PKBM Antasari	B. Lampung	20	Kelembagaan
5. Yayasan Pendidikan "Ratulangi"	B. Lampung	20	Kelembagaan
6. Panti Asuhan "Tresna Asih"	B. Lampung	15	Kelembagaan
7. Pesantren "Raudhatul Jinan"	B. Lampung	25	Kelembagaan
8. Yayasan Pendidikan TK AlQur'an	L. Selatan	-	Kelembagaan
9. Ponpes Suffah Hizbullah Natar	L. Selatan	-	Kelembagaan
10. Yayasan Pendidikan Islam Daruttauhid	L. Selatan	-	Kelembagaan
11. Yayasan Sosial Penyantunan anak Yatim	L. Selatan	-	Kelembagaan
12. Yayasan Darul Qolam	L. Selatan	-	Kelembagaan
13. Yayasan Pendidikan Agama Islam	L. Selatan	-	Kelembagaan
14. Sanggar Kegiatan Belajar Gedong Tataan	L. Selatan	-	Rintisan
15. Pusat Pengembangan PADU Harapan Bgs	L. Selatan	-	Rintisan
16. Yayasan Istiqomah Al Amin Cinta Mulya	L. Selatan	-	Rintisan
17. Kelompok Bermain "Mentari"	L. Tengah	24	Rintisan
18. Kelompok Bermain "Mawar"	L. Tengah	74	Rintisan
19. Kelompok Bermain "Margo Baru"	L. Tengah	21	Rintisan
20. T P Al Qur'an "Miftahul Huda"	L. Tengah	45	Kelembagaan
21. TP Al Qur'an " Mambaul Huda"	L. Tengah	32	Kelembagaan
22. Yay. Sekolah Minggu Tanggul Angin	L. Tengah	60	Kelembagaan
23. TP Al Qur'an "Jami' "	L. Tengah	32	Kelembagaan
24. TP Al Qur'an Sido Waras Bumi Ratu	L. Tengah	35	Kelembagaan

Sumber: Dinas Pendidikan Propinsi Lampung, 2002.

Tabel L.12  
Indikator Mutu Pendidikan Propinsi Lampung Tahun 2000/2001

No.	Indikator	SD+MI	SLTP+MTs	SM+MA
1	Persentase Lulusan TK/RA/BA	16,99		
2	Angka Mengulang	41.129	3.582	3.539
3	Angka Putus Sekolah	12.597	1.088	1.060
4	Angka Lulusan	155.452	105.098	50.163
5	Angka Kelayakan Mengajar			
	a. Layak	13.039	1.542	7520
	b. Semi Layak	27.729	2.319	3546
	c. Tidak Layak		2.701	- 1074
6	Persentase Kondisi Ruang Kelas			
	a. Baik	51,25	76,98	88,40
	b. Rusak Ringan	33,05	18,35	9,26
	c. Rusak Berat	15,66	4,67	2,34
7	Persentase Fasilitas Sekolah			
	a. Perpustakaan	34,51	43,28	50,08
	b. Lapangan OR	41,32	56,36	59,93
	c. UKS	24,19	16,96	28,32
	d. Laboratorium		42,09	35,40
	e. Ketrampilan			15,19
	f. Bimbingan dan Penyuluhan		25,00	27,11
	g. Serba Guna			10,02
	h. Bengkel			13,81
	i. Ruang Praktek			31,26
8	Angka Partisipasi (persen)			
	a. a. Pemerintah Pusat	30,15	48,13	
	b. b. Orang Tua	12,71	45,07	
	c. c. Pemerintah Daerah	57,14	0,045	
9	Satuan biaya (000 Rp)	16.865.000	41.225.125	

Sumber: Dinas Pendidikan Propinsi Lampung, 2002

Tabel L.13

Jumlah Kasus Kematian Balita Propinsi Lampung Berdasarkan Penyebab Kematian, Kelompok Umur Balita, dan Kabupaten/Kota, Tahun 2002

Kabupaten/ Kota	Bayi Lahir Hidup	Penyebab Kematian/Kelompok Umur Balita									
		0-1 tahun					1-5 tahun				
		BBLR	Asfitisia	Tetanus Neonatal	Diare	Pneumonia	Lain-lain	Pneumonia	Diare	Lain-lain	
L. Barat	5.757	8	16	0	0	10	9	6	0	9	
Tanggamus	17.658	12	9	0	0	2	29	0	0	0	
L. Selatan	17.496	26	19	2	5	7	34	0	0	3	
L. Timur	17.509	17	20	1	1	3	12	1	0	2	
L. Tengah	22.553	16	12	0	0	5	41	3	0	0	
L. Utara	8.892	26	34	1	8	11	18	5	4	12	
Way Kanan	4.954	10	10	0	0	1	11	1	0	3	
T. Bawang	16.562	16	8	0	2	3	36	1	0	7	
B. Lampung	16.293	14	16	1	2	1	71	1	0	14	
Metro	2.484	3	5	0	0	0	18	0	0	1	
<b>Jumlah</b>	<b>130.158</b>	<b>148</b>	<b>149</b>	<b>5</b>	<b>18</b>	<b>43</b>	<b>279</b>	<b>18</b>	<b>4</b>	<b>51</b>	

Sumber: Dinas Kesehatan Propinsi Lampung, 2003 (diolah Kembali)